



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBALIAN
KREDIT BLM - PUAP OLEH ANGGOTA LKM-A MASRA
GAPOKTAN HARAPAN JAYA KELURAHAN GURUN LAWAS
KECAMATAN NANGGALO**

SKRIPSI



**DINI SYAFITRI
07 115 033**

**JURUSAN PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGEMBALIAN DANA PUAP OLEH ANGGOTA LKM-A
MASRA GAPOKTAN HARAPAN JAYA KELURAHAN
GURUN LAWAS KECAMATAN NANGGALO KOTA
PADANG**

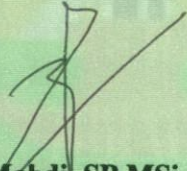
OLEH

DINI SYAFITRI
07 115 033

MENYETUJUI:

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


Dr. Mahdi, SP.MSi
NIP.19710410 200003 1 002

Syofyan Fairuzi, STP.MSi
NIP. 132 315 389



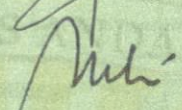
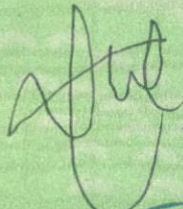
**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**


Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc.
NIP. 19531216 198003 1 004


Prof. Ir. Yonariza, M.Sc. PhD
NIP. 19650505 199103 1 003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 9 Januari 2012

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS		Ketua
2.	Dr. Mahdi, SP. MSi		Sekretaris
3.	Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, MSc		Anggota
4.	Ferdhinal Asful, SP. MSi		Anggota



Allah SWT berfirman, "...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S: Al-mujadilah, 11)

Perjuangan itu pada akhirnya selesai juga, perjuangan yang diiringi dengan ketabahan dan kesabaran orang-orang tercintaku. Papa dan mama tercinta Syafrullah Tanjung dan Ismaniar Iskandar yang menjadi motivasi terbesarku, kubertahan untuk kalian. serta seluruh keluargaku tercinta, kakak perempuanku Dewi Syafitri dan Yunia D.Syafitri dan juga sodara laki- laki M. Sadikin, M. ikhsan dan M. ikhwan kita pasti bisa berbuat yang terbaik untuk kel dan orang tua kita, semoga hasil semua ini membuat kalian bangga. Teriring do'a semoga ALLAH SWT membalasnya dengan limpahan berkah dan rahmat-Nya.

Teruntuk keluarga besar: ibuku(yusniar), tek ir, tek ul, tek yet, mak uniang, om di dan kel di klender Jakarta dan semoga kalian rukun, damai dan sejahtera di rantau kekompakan kita bakal jadi senjata ampuh.kakak iparku kak doona yang menjadi kakak ketiga perempuan bagiku.

Buat saudara dan sahabat seperjuangan: lesuik (icha), Niken, ayoo saii, kalian pasti bisa. rizka (kakak), maaf kak printernya jadi rusak gara- gara skripsi ku ini. Bwd teman seperjuangan ku Rika, Icha haswar, rize, ibet 07, tika, nila, siska, dll. untuk Uut Hidayat makasih ya phu atas dukungan dan semangatnya selama ini bersama muu, teristimewa untuk kak opi selaku pembimbing 3 ku atas saran dan masukannya atas kesempurnaan skripsi ku ini. untuk anak PKP 07 lainnya semangat kalian pasti bisa. Kak olen, ibet, ayu, kak melda, kak peni, ami, dan nak 06 PKP dan Agri yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu. semangat kalian telah membuatku tegar. Buat seluruh teman-teman angkatan 2009, 2010: *Keep spirit and Let's make a big change for Agriculture future with our hand.* Senioraku: angkatan 2005, 2004, mari kita buat bangga almamater kita! Sahabatku oja dan pak taya(penganten baru), echa dan yudi yang mau nyusul, buat bang anggun yang menjadi abang terbaikku, kak isil berok, kak sari, kak rara, dedek dan bg doni(semoga langgeng ampe 2013 target mu merit kan dek) buat edya, (ya buat keputusan terbaik untuk hidupmu), dll yang gak bisa disebut satu persatu. terima kasih atas pembelajaran dan kebersamaan ini, semoga tetap jaya!

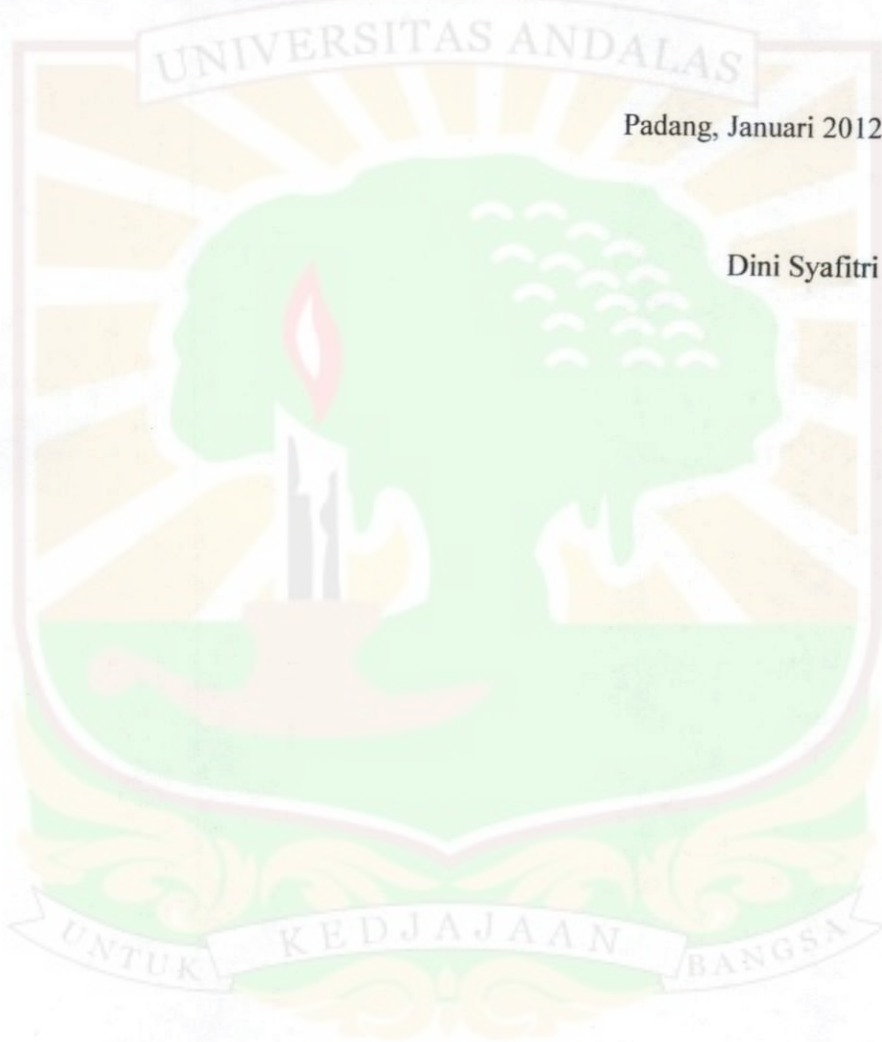
Terima kasih buat teman sepembimbingan pak mahdi , mari kita buat beliau tercinta bangga, do'akan beliau selalu dalam lindungan Allah SWT serta dimudahkan segala urusan beliau, amien.

Saudara-saudaraku anggota KKN :lia (mami), lena, shinta, viki, ncai, dan mega. terima kasih atas segala yang tak terucap (45 hari menjadi keluarga).

"Tiada kesulitan tanpa ada kemudahan dibaliknya, tiada kesulitan yang hanya selalu kesulitan didalamnya, tiada kebahagiaan tanpa perjuangan sebelumnya, tiada kesempurnaan tanpa sebuah proses mengikutinya....."

BIODATA

Penulis dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 23 Januari 1989 sebagai anak kelima, dari pasangan Syafrullah Tanjung dan Ismaniar Iskandar. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SDN 03 Simpang Haru Padang (1995-2001). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SLTP N 30 Padang (2001-2004). Dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di SMA N 9 Padang dan lulus pada tahun 2007. Dan pada tahun 2007 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Jurusan Sosial Ekonomi Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi.



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor – Faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit BLM - PUAP oleh anggota LKM-A Masra Gapoktan Harapan Jaya Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo”**. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan September 2011 di LKM-A Masra Gapoktan Harapan Jaya Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo Padang. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program strata-1 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada Bapak Dr. Mahdi, SP. MSi dan Bapak Syofyan Fairuzi, STP. MSi, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang dalam juga penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan Bapak/Ibu dosen undangan yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, seluruh dosen serta karyawan Fakultas Pertanian yang telah memberi dorongan, semangat, dan bantuan yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota Gapoktan Harapan Jaya dan LKM-A Masra, Camat Nanggalo, Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Sumatera Barat dan Kepala Sekretariat PUAP Sumatera Barat atas segala informasi dan bantuannya. Serta terima kasih juga untuk pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan saudara yang telah memberi semangat, dorongan dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian dan Ilmu Pertanian Pada Umumnya.

Padang, Januari 2012

D.S

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Lembaga Keuangan Mikro dan Fungsinya.....	6
2.2 Tinjauan Tentang Kredit	9
2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit	11
2.4 Tinjauan Umum Kelembagaan.....	14
2.5 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)	21
2.6 Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP)	23
2.7 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu	32
2.8 Kerangka Pemikiran.....	35
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	35
3.3 Variabel Diamati	37
3.4 Metode Pengumpulan Data	43
3.5 Analisis Data	43

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

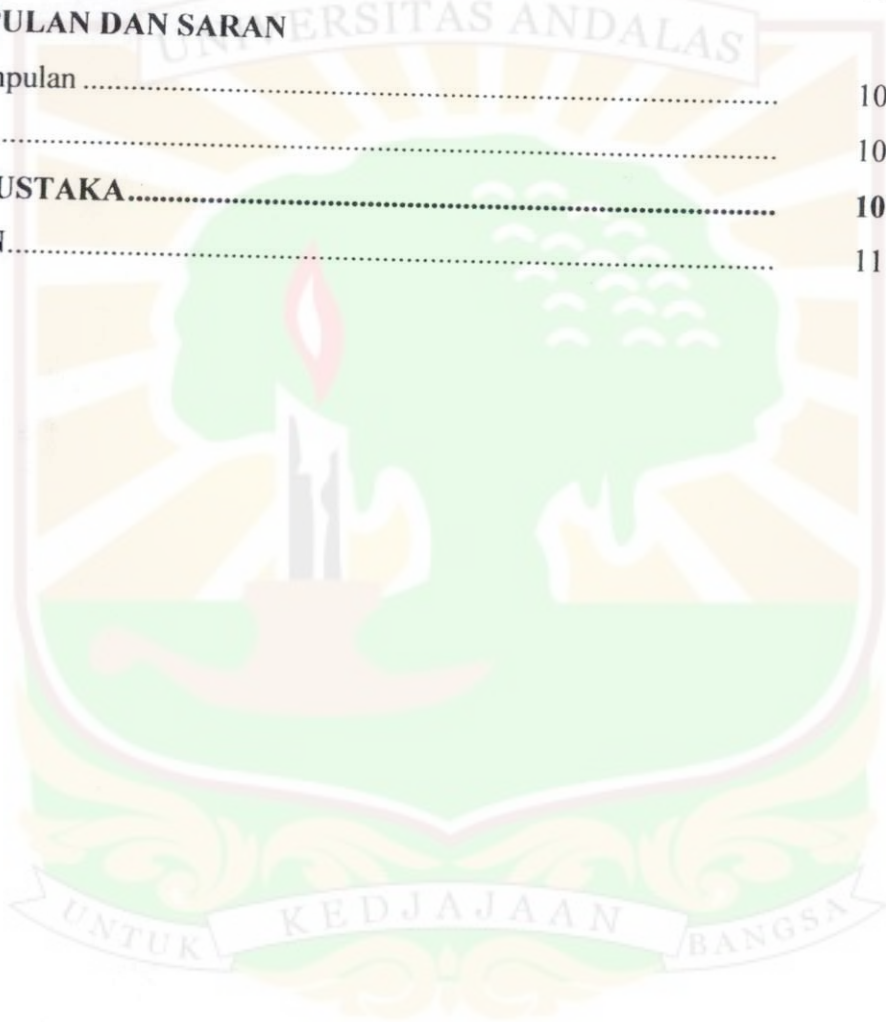
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	46
4.2 Karakteristik Sampel.....	49
4.3 Gambaran Umum Gapoktan/ LKM-A Harapan Jaya (MASRA)...	51
4.4 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Program BLM-PUAP di LKM-A Masra	62
4.5 Sistem Pengembalian Kredit.....	78
4.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengembalian Kredit....	86

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	107
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	111
----------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
1. Kedudukan LKM-A dan Usaha Otonom Lainnya dalam Gapoktan	26
2. Bagan Kerangka Pemikiran	35
3. Struktur Organisasi Gapoktan Harapan Jaya	55
4. Struktur Pengelola LKM-A Masra	58



DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1. Jumlah Anggota LKM-A Masra Menurut Tingkat Pengembalian Kredit	38
2. Rincian Key Informan	39
3. Jenis Data, Teknik dan Sumber Data.....	45
4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Gurun Lawas	46
5. Penggunaan Tanah di Kecamatan Nanggalo Tahun 2009	47
6. Karakteristik Sampel.....	49
7. Rincian Anggota Gapoktan Harapan jaya	60
8. Rincian Usaha Anggota Gapoktan Harapan jaya.....	60
9. Perbandingan Pelaksanaan Pembuatan RUA dengan Pedoman Umum PUAP	65
10. Perbandingan Pelaksanaan Pembuatan RUK dengan Pedoman Umum PUAP	67
11. Realisasi Awal Penyaluran Dana PUAP untuk Bulan Februari 2010	73
12. Perkembangan Usaha Pembiayaan PUAP LKM-A Masra sampai dengan Desember 2010	74
13. Besar Pinjaman Anggota LKM-A Masra	75
14. Jumlah Pinjaman Anggota LKM-A Masra.....	76
15. Jangka Waktu Pengembalian Kredit di LKM-A Masra.....	78
16. Cara Pengembalian Kredit di LKM-A Masra	80
17. Tempat Pengembalian Kredit	80
18. Waktu Pengembalian Kredit LKM-A.....	81
19. Hasil Perhitungan Responden pada Tingkat Pengetahuan.....	89
20. Pendapatan Usaha Anggota	92
21. Tingkat Kemauan Sampel Dalam Pembayaran Kredit	94
22. Alokasi Penggunaan Kredit oleh Anggota LKM-A.....	95
23. Pengalaman Usaha dan Pengalaman Meminjam Kredit Anggota LKM-A	97

24. Perkembangan Usaha Anggota	99
25. Jarak Rumah Anggota Dengan Tempat Pembayaran Kredit	101
26. Sanksi bagi Anggota yang Menunggak	104



DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Kuota Lokasi Penerima PUAP Menurut Propinsi Tahun 2008.....	111
2. Jumlah Gapoktan, LKM-A, dan Petani dalam Program PUAP di SUMBAR	112
3. Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana PUAP Tahun 2009	113
4. Laporan Perkembangan GAPOKTAN/LKM-A Penerima Dana PUAP Tahun 2008 dan 2009 Kota Padang	114
5. Nama Anggota Peminjam Dana PUAP di (LKM-A Masra) Harapan Jaya Per Desember 2010	116
6. Matriks Data Set Penelitian.....	118
7. Data Jumlah Masyarakat Miskin Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008.....	120
8. Surat Penunjukkan Pengurus LKM-A Masra.....	122
9. Daftar Hadir Peserta Gapoktan Kota Padang pada pelatihan LKM-A di Baso.....	123
10. Lampiran Pencairan Dana 100 juta pada LKM-A Masra	125
11. Formulir Rencana Usaha Anggota (RUA)	126
12. Formulir Rencana Usaha Kelompok (RUK).....	127
13. a. RUK Kelompok Tani Tabek Dorom	128
b. RUK Kelompok Tani Sumber Harapan	129
c. RUK Kelompok Tani Nan Sepakat	130
14. Rencana Usaha Bersama Gapoktan Harapan Jaya.....	131
15. Surat Ketentuan Pinjaman.....	132
16. Surat Rekomendasi Anggota.....	133
17. Surat Permohonan Pinjaman.....	134
18. Surat Pengakuan Hutang.....	135
19. Rekapitulasi Peminjaman dan Perkembangan Periode 2010	136
20. Daftar Kehadiran Monitoring dan Bimbingan Lapangan oleh PPL.	138
21. Daftar Hadir Anggota pada RAT LKM-A Masra 2011	139
22. Pertanyaan Seputar Tingkat Pengetahuan Responden.....	140

23. Rata - Rata Pendapatan Responden berdasarkan Strata.....	142
24. Kategori Pendapatan Responden.....	144
25. Keadaan Penerima sampai Bulan Agustus 2011	145



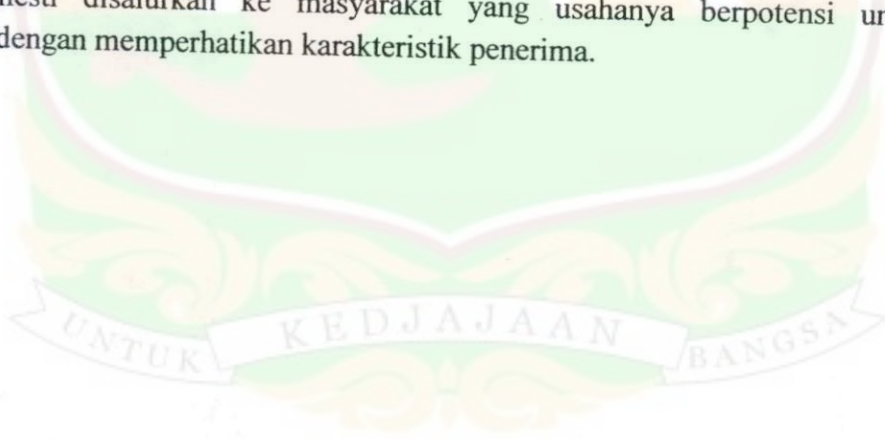
**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBALIAN KREDIT
PUAP OLEH ANGGOTA LKM-A MASRA KELURAHAN GURUN LAWAS
KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor- faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit oleh anggota LKM-A Masra. Tujuan penelitian adalah: (1) Mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Masra; (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit PUAP oleh anggota LKM-A Masra. Dengan metode penelitian studi kasus (*case study*). Pengambilan data dilakukan interview *key informan* yang terdiri dari: a) Penyelia Mitra Tani (PMT), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); b) ketua Gapoktan Harapan Jaya ; dan c) Pengurus LKM-A. Responden adalah semua anggota LKM-A Masra berjumlah 52 orang.

Hasil penelitian memaparkan bahwa pengelolaan kredit program BLM - PUAP di LKM-A Masra Gapoktan Harapan Jaya yang melalui proses penyaluran kredit telah dilakukan sesuai prosedur yang terdapat dalam petunjuk teknis PUAP tahun 2009, namun belum sepenuhnya sesuai. Pengembalian kredit rendah dikarenakan aturan yang tidak tegas dan kontrol yang lemah dari pengurus kelompok masing- masing. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit adalah perilaku, dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan maka semakin rendah kemacetan kredit anggota.

Disarankan agar LKM-A melaksanakan aturan dan ketentuan yang ada, selain itu kredit mesti disalurkan ke masyarakat yang usahanya berpotensi untuk berkembang dengan memperhatikan karakteristik penerima.



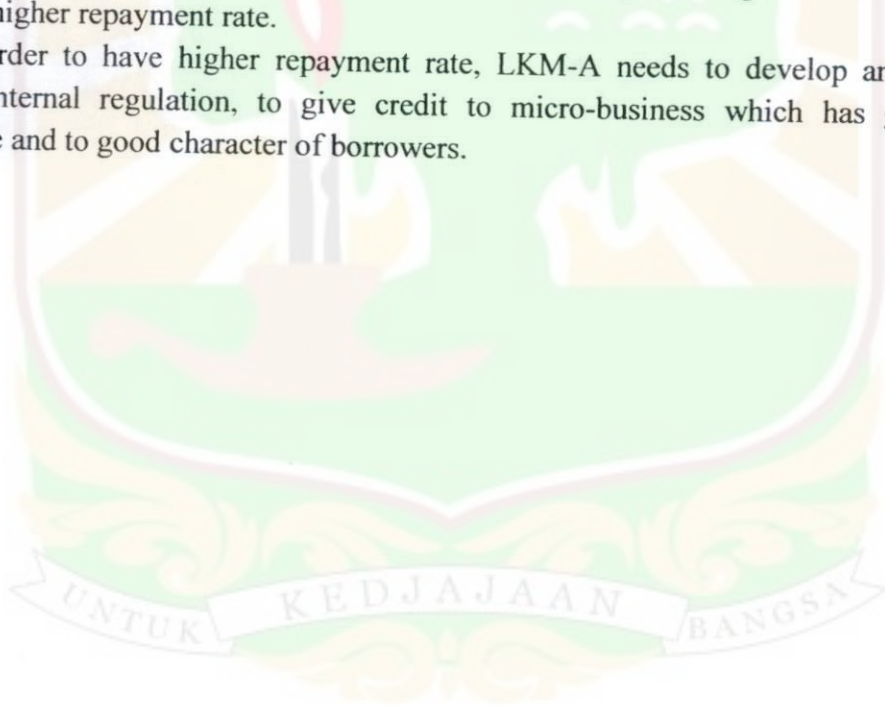
THE FACTORS FOR CREDIT REPAYMENT AT LKM-A MASRA OF KELURAHAN GURUN LAWAS, KECAMATAN NANGGALO, PADANG MUNICIPALITY

ABSTRACT

This case study aims to describe micro-credit management of LKM-A Masra in PUAP program and to identify the factors for credit repayment. Data collection was carried out through interviewing some key informants including facilitator, extension worker, chairman of Gapoktan Harapan Jaya. A survey also has been carried out to gather primary data from 52 farmers, whom are micro-credit borrowers as well as the members of Gapoktan Harapan Jaya .

Micro-credit management of LKM-A Masra began from credit disbursement in accordance with guideline of 2009 although some procedures were not in line with the guideline. Credit repayment rate is low due to weak regulation, and controlling. The factors for credit repayment are borrowers' behaviour. The borrowers who have better understanding on credit and program, higher ability and higher motivation result in to higher repayment rate.

In order to have higher repayment rate, LKM-A needs to develop and to strengthen internal regulation, to give credit to micro-business which has good performance and to good character of borrowers.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan di bidang pertanian menjadi sangat penting mengingat peranannya yang begitu besar terhadap perekonomian nasional. Pada hakekatnya, pembangunan pertanian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mencakup: 1) penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan agribisnis, terutama petani, 2) fasilitasi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, 3) penyediaan prasarana dan sarana fisik oleh pemerintah dengan fokus pemenuhan kebutuhan publik yang mendukung sektor pertanian serta lingkungan bisnis secara luas, dan 4) akselerasi pembangunan wilayah dan stimulasi tumbuhnya investasi masyarakat serta dunia usaha (Departemen Pertanian, 2002).

Salah satu upaya di bidang pembangunan pertanian adalah diluncurkannya Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang merupakan program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan dipedesaan. Dengan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani (Departemen Pertanian, 2008). Program ini berupaya untuk mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi petani yaitu kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah.

Program PUAP ini dirancang sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A ini sebagai wadah pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani dan khususnya masyarakat miskin, dimana salah satu indikator keberhasilan PUAP ini adalah meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Sumatera Barat adalah salah satu propinsi dari 33 Provinsi di Indonesia yang juga melaksanakan kegiatan PUAP dengan jumlah 12 Kabupaten/Kota

dengan kuota sebesar 208 (Lampiran 1), Sedangkan disisi jenis usaha yang dilaksanakan paling besar digerakan oleh program PUAP adalah usaha sektor pertanian tanaman pangan sebesar 39 %, usaha peternakan 17 %, usaha hortikultura 14 %, usaha pemasaran hasil pertanian 11 %, usaha perkebunan 9%, usaha industri olahan rumah tangga 8 % dan usaha lainnya sebesar 2 % (BPTP, 2008).

1.2. Rumusan masalah

Berbicara tentang program PUAP salah satu Komponen program ini adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) adalah bagian pelaksanaan program PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran (Departemen Pertanian, 2008)

Kota Padang merupakan salah satu daerah penerima dana PUAP dengan jumlah Gapoktan dan LKM-A Sejak tahun 2008 sebanyak 533 buah Gapoktan dan 533 buah lembaga Keuangan Mikro Agribisnis telah terbentuk. Masing-masing LKMA mendapat bantuan dana sebesar Rp 100 juta sebagai pemicu berkembangnya usaha agribisnis pada Gapoktan tersebut. Dengan jumlah PMT sebanyak 29 orang serta jumlah petani sebanyak 45.192 orang sampai tahun 2009 (Lampiran 2). LKM-A tersebut di bentuk untuk dipersiapkan dalam mengelola dana BLM PUAP, agar mampu berkembang dan sesuai tujuan pembentukan LKM-A itu sendiri yaitu *Building financially sustainable institution*. (Petunjuk teknis LKM-A Agribisnis, 2010)

Menyediakan dana bagi penduduk Indonesia yang miskin dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk hal itu, dengan mensubsidi skema-skema kredit untuk pengusaha kecil, namun berbagai skema tersebut tidak menunjukkan hasil yang berarti. Beberapa penyebabnya adalah desain program yang buruk, insentif yang tidak tepat, dan kurangnya dukungan bagi organisasi-organisasi yang berbasis komunitas untuk

mengelola dana tersebut. Walaupun kebanyakan skema dirancang agar dapat berkelanjutan dengan sendirinya, dimana pinjaman baru seharusnya didanai oleh pembayaran pinjaman, pada kenyataannya tidaklah begitu (World Bank, 2005)

Pengalaman juga menunjukkan bahwa dana bantuan program pemerintah selama ini sulit digulirkan dan bahkan cenderung tidak produktif, karena tidak adanya lembaga pengelola keuangan. Sasaran dana bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tani sulit berkembang dan bahkan tidak tercapai. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A diharapkan memfungsikan dirinya sebagai lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani di perdesaan.

Dana BLM PUAP yang diberikan pada LKM-A sifatnya adalah pinjaman bergulir yang harus dikembalikan dengan cara pembayaran pinjaman secara lunas maupun cicilan, terutama masalah macetnya sebagian pembayaran cicilan dana yang dilakukan oleh peminjamnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat LKM-A Masra di Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo Kota Padang (Lampiran 3) yang dari data rekapitulasi perkembangan dana LKM-A 2010 merupakan LKM-A dengan tingkat pengembalian dana paling rendah dibandingkan dengan LKM-A penerima dana tahap I lainnya dengan perkembangan dana LKM-A sebesar Rp 89.500.000 dari dana awal Rp.100.000.000 (Lampiran 4). Sehingga pengembalian dana dikatakan minus karena terjadi kemacetan dalam pengembalian dana dari anggota ke LKM-A, karena lebih setengah dari anggota LKM-A yang menunggak diakibatkan banyak anggota yang kurang lancar dan bahkan tidak membayar sama sekali sampai jatuh tempo sehingga mengganggu proses perguliran dana.

Masalah kemacetan dalam pengembalian dana oleh anggota haruslah diperhatikan karena dalam upaya keberlanjutan program kondisi idealnya adalah kelancaran dalam pengembalian dana. Untuk program PUAP ini sistem agunan tidak diberlakukan, namun kenyataannya sebagian besar anggota pada LKM-A ini tergolong pada kondisi yang menunggak bahkan macet. Maka perlu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya agar dana tersebut benar-benar dapat bergulir dan dirasakan oleh semua anggota.

Dari permasalahan diatas maka dirasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Faktor - Faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit BLM - PUAP oleh Anggota LKM-A Masra Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo Kota Padang”**.

Dengan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana kredit BLM - PUAP oleh LKM-A Masra Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo Kota Padang?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pengembalian kredit oleh anggota LKM-A Masra Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo Kota Padang ?

1.3. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan kredit BLM-PUAP oleh LKM-A Masra Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo Kota Padang
2. Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit BLM-PUAP oleh anggota LKM-A Masra Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan hasilnya dapat berguna dan bermanfaat untuk :

1. Bagi petani, yaitu sebagai masukan dan informasi sehingga dapat membantu dalam menghadapi masalah sehubungan dengan masalah yang membuat petani menunda pengembalian dana PUAP pada LKMA oleh anggota kelompok tani dalam mendukung program-program berbasis pemberdayaan petani.
2. Bagi pemerintah, yaitu sebagai masukan, gambaran dan pertimbangan mengenai penyebab program lalu gagal dan masalah yang dihadapi kelompok tani, sehingga membantu dalam perumusan kebijakan dan perencanaan Program PUAP tahap III pada 2012 yaitu tahap pemantapan dalam merancang pembangunan pertanian yang lebih berpihak pada petani termasuk dalam mengembangkan program-program yang melibatkan peran serta petani.

3. Bagi penulis sendiri yaitu dapat meningkatkan pemahaman mengenai penyebab resiko terhadap pemberian bantuan dana kredit pada program pemerintahan terhadap petani terutama dalam masalah kemacetan pembayaran kredit pertanian



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan Mikro dan Fungsinya

Menurut Wijono (2005), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin/petani untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta pertahun. Sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendefinisikan kredit mikro sebagai pelayanan kredit dibawah Rp. 50 juta.

Dari definisi-definisi diatas maka dapat dilihat bahwa pengertian kredit mikro atau keuangan mikro tergantung dari sudut pembicaraannya. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan lembaga keuangan mikro (LKM). Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment services*), serta money transfer yang ditujukan kepada masyarakat miskin dalam pengusaha kecil.

Dengan demikian LKM mempunyai fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai lembaga keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro, dan dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut, sehingga berdasarkan fungsinya maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan yang lain.

Dilihat dari definisi-definisi yang ada maka secara umum ada tiga elemen penting dalam LKM, yaitu :

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan, seperti dalam masyarakat tradisional disebut lumbung desa, lumbuang pitih nagari dan

sebagainnya yang melayani penyediaan keuangan yang beragam seperti, pinjaman, tabungan, pembayaran, deposito, maupun asuransi.

2. Melayani rakyat miskin, lembaga keuangan mikro pada awalnya untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem lembaga keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik kostituen yang khas.
3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, merupakan konsekuensi dari masyarakat yang dilayani sehingga mekanisme prosedur yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel (Krishnamurti, 2004).

Pola-pola keuangan mikro di Indonesia menurut Microcredit Summit *dalam* Ashari, (2006) :

- a. *Saving ledd microfinance*, yaitu pola keuangan mikro yang berbasis anggota (*membership based*). Dalam pola ini, pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro. Contohnya: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Credit Union*, dan Koperasi Simpan Pinjam.
- b. *Credit Ledd Microfinance*, yaitu pola keuangan mikro yang sumber keuangannya bukan dari usaha mikro tetapi dari sumber lain. Contohnya: Badan Kredit Desa, Lembaga Dana Kredit Pedesaan dan Grameen Bank, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.
- c. *Micro Banking*, bank yang difungsikan untuk melayani keuangan mikro. Contohnya: BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat dan Danamon Simpan Pinjam.
- d. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat.

Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (*personal relationship*), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (*negotiable repayment*). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di perdesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki asset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen). Karakter perdesaaan seperti itulah yang ditangkap dengan baik oleh pelaku lembaga keuangan mikro, sehingga

eksistensinya mudah diterima oleh masyarakat kecil. Tetapi kelemahan utama dari lembaga keuangan mikro, yakni tingkat bunga kredit yang sangat tinggi, harus diperbaiki sebab keberadaannya cenderung eksploitatif kepada masyarakat miskin. Pemerintah dapat mendesain regulasi dengan jalan membatasi tingkat suku bunga, atau memperluas akses masyarakat miskin kepada kredit formal sehingga dalam jangka panjang tingkat bunga lembaga keuangan mikro akan tertekan. Model inilah yang harus diadopsi agar kepentingan masyarakat kecil tidak dirugikan.

Menurut Kasmir (2004), unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

1. Kepercayaan
Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Kesepakatan
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu
Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko
Faktor kerugian yang dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja akibat terjadinya musibah.
5. Balas Jasa
Yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang disebut dengan bunga.

Usman *et al*, (2004), menyatakan bahwa keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan; termasuk di antaranya kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang- bagi orang atau keluarga miskin atau berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Definisi ini memberikan penekanan pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit

mikro saja, dan pada target pelayanan yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Pelayanan keuangan mikro dianggap sebagai salah satu strategi kunci dalam penanggulangan kemiskinan, dan manfaat pelayanan keuangan mikro dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin telah banyak diungkapkan oleh studi di berbagai negara. Namun, masyarakat miskin bukanlah komunitas yang homogen, dan strategi serta bentuk pelayanan keuangan mikro terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran dan pemahaman mengenai masyarakat miskin menurut Matin, Hulme dan Rotherford seperti yang dicantumkan oleh Usman *et al*, (2004).

2.2. Tinjauan Tentang Kredit

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali (Hendayana dan Bustamam, 2008).

Secara formal definisi kredit menurut UU Perbankan Tahun 1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan penyaluran dana atau perkreditan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan debitur dalam rangka kegiatan konsumsi atau produksi. Dalam pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian. Untuk itu bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal prospek usaha debitur dan agunan (Suyatno, 2007)

Kredit adalah pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga, baik berupa uang, barang, maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan dapat/mampu membayar dengan nilai/harga yang sama di waktu yang akan datang. Sedangkan fungsi kredit dijalankan untuk berbagai kegunaan, yaitu (1) Kredit dapat memajukan

arus tukar barang dan jasa (2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran (3) Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga (4) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru (5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada (Hadiwidjaya dan Wirasmita, *dalam* Suyatno, 2007).

Menurut surat edaran Bank Indonesia No.23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991, kredit berdasarkan kolektibilitasnya dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan di bawah ini :
 - Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau penarikan ;
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan (bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan). Atau belum melampaui 3 bulan (bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan), atau belum melampaui 6 bulan bila angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih ; dan
 - Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
2. Kredit kurang lancar
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan (tetapi belum melampaui 2 bulan) bagi kredit yang masa angsurannya 1 bulan, atau melampaui 3 bulan (tetapi belum melampaui 6 bulan) bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan atau melampaui 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih ;
 - Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi yang angsuran kreditnya 1 bulan ;
 - Atau melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi angsurannya yang melebihi 1 bulan.

3. Kredit yang diragukan

Yaitu tidak memenuhi kriteria lancar, atau kurang lancar seperti tersebut pada angka 1 dan 2, tetapi kredit tersebut akan dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang debitur, atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.

4. Kredit macet, yaitu:

- Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti angka 1, 2 dan 3 ;
- Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau belum ada usaha penyelamatan kredit ; dan
- Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Hukum Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit (Ashari, 2006).

Adapun langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank adalah tahap-tahap permohonan kredit, penyelidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Adakalanya beberapa jenis kredit memiliki kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya (Suyatno, 2007).

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit

Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melunasi kewajibannya dalam mengembalikan kredit menurut Sukmadi dan Sudrajat (1994) dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu pendapatan dimana bila pendapatan mereka bertambah maka peminjam akan cenderung melunasi kewajibannya. Selain pendapatan, kemampuan peminjam maupun kelompok dalam mengelola kelompok akan sangat mempengaruhi peminjam. Semakin baik pengelolaan suatu kelompok, semakin besarlah kesadaran anggotanya dalam melunasi kewajibannya.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peminjam untuk mengembalikan kredit yaitu adanya bencana alam yang mengakibatkan terjadinya kegagalan panen. Hal ini akan mengakibatkan petani tidak menerima hasil usahataniannya sehingga petani tidak mampu membayar kewajibannya. Selain itu kebijakan pemerintah juga menjadi penentu mau tidaknya petani membayar kredit. Sikap pemerintah yang seringkali melakukan pemutihan terhadap kredit pertanian menimbulkan persepsi dikalangan petani bahwa kredit dari pemerintah tidak perlu dibayar (Sukmadi dan Sudrajad, 1994).

Handayani, 2010 juga mengatakan bahwa semakin meningkat faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pengembalian pinjaman (kredit) dipengaruhi oleh karakteristik petani yang digolongkan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu petani yaitu kondisi sosial ekonomi petani dan faktor eksternal berupa situasi perubahan ekonomi (gagal panen), situasi penunjang non-ekonomi (sanksi sosial yang diterapkan di masyarakat), dan kondisi finansial petani. Faktor yang berperan positif bagi petani dalam membayar kredit diantaranya: pengetahuan terhadap kredit dan pengalaman berusaha, penagihan yang dilakukan oleh petugas, dan nisbah antara pendapatan dengan jumlah pinjaman kredit yang diterima. Sementara itu, yang berperan negatif atau yang menimbulkan kecenderungan peminjam tidak membayar kembali pinjamannya adalah: tingginya pengeluaran konsumsi keluarga, dan nisbah jumlah kredit dan penerimaan yang diterima oleh peminjam.

Sementara itu, Handayani (2010) menyatakan bahwa faktor pendorong pengembalian kredit adalah pengalaman menerima kredit, keterlibatan dalam penyusunan Rencana Definit Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah tabungan kelompok tani, dan frekuensi pembinaan oleh PPL.

Faktor-faktor penyebab adanya ketidaklancaran pengembalian kredit, sehingga berpotensi menjadi kredit macet yakni faktor internal maupun eksternal. Faktor internal sendiri misalnya analisa kredit yang tidak tepat, sistem informasi dan administrasi yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternalnya adalah situasi

perekonomian yang tidak mendukung baik dalam negeri maupun luar negeri (Suyono, 1996).

Trisna (2008) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman bergulir Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lancar atau tidak lancarnya pengembalian pinjaman bergulir PMUK ini dapat dibedakan atas tingkat petani dan kelompok. Faktor yang mempengaruhi pengembalian pinjaman di tingkat petani adalah pendapatan, ketepatan waktu turunnya dana, kemampuan manajemen kredit oleh petani. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengembalian pinjaman di tingkat kelompok adalah kontrol kelompok, tidak adanya sanksi yang ditetapkan, manajemen kelompok, jumlah tabungan kelompok dan koordinasi antar petugas.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mayrowani (1998) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi peminjam dalam mengembalikan kredit adalah *monitoring* yang dilakukan petugas, kemudian peminjam dalam mengakses kredit, ketepatan waktu penyaluran, bentuk dan cara penagihan, pemahaman peminjam tentang kredit, kemampuan peminjam dalam mengelola kredit, dan kemampuan manajerial kelompok.

Sejak tahun 1969 memang sudah dimulai dengan pemberian kredit kepada petani atas jaminan tanaman, tapi perkembangan kredit tidak memuaskan. Petani belum biasa dan tidak memandang kewajiban-kewajiban terhadap pemberi kredit secara serius akibatnya terlalu banyak tunggakan. Salah satu penyebab utama dari perkembangan demikian harus dicari bidang lain, dalam hal ini peminjam mempunyai pandangan yang statis, sedang pinjaman produksi merupakan suatu hal yang dinamis. Hanya apabila peminjam punya pandangan hidup yang dinamis pula, barulah ia akan menangkap makna dan nilai sebenarnya daripada perjanjian-perjanjian yang dibuatnya dengan bank, karena meminjamkan kepada petani dan orang-orang kecil mempunyai banyak resiko, biasanya bunga yang diminta selalu tinggi.

Dilihat dari faktor eksternal ada beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya ketidاكلancaran dalam pengembalian kredit dalam koperasi yaitu (1) persepsi tentang pentingnya koperasi masih belum sama, baik dikalangan pemegang

kebijakan maupun para pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya (2) peranan lembaga keuangan yang masih sangat rendah (3) iklim usaha yang kurang kondusif bagi kegiatan usaha koperasi (4) aturan-aturan yang ada untuk koperasi terasa kaku (Anoraga dan Widiyanti, 1992).

Dari hasil penelitian Handoyo (2009), didapat Faktor-faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pengembalian pembiayaan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman usaha. Tingkat pendidikan dan pengalaman usaha memiliki pengaruh positif dengan tingkat pengembalian pembiayaan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman usaha debitur maka peluang untuk mengembalikan pembiayaan secara lancar semakin tinggi dan sebaliknya.

2.4. Tinjauan Umum Kelembagaan

Secara empiris kelembagaan pertanian menurut Untung (2000) dapat dibedakan, antara lain:

- 1) Kelembagaan sosial nonbisnis yang merupakan lembaga pertanian yang mendukung penciptaan teknologi, penyampaian teknologi, penggunaan teknologi dan penerahan partisipasi masyarakat, seperti lembaga penelitian, penyuluhan, kelompok tani dan sebagainya.
- 2) Lembaga bisnis penunjang yang merupakan lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, seperti koperasi, usaha perorangan, usaha jasa keuangan dan sebagainya.

2.4.1. Pengertian Kelembagaan

Kelembagaan mempunyai banyak pandangan atau pendapat yang berbeda, Helmi (1997) dalam Widodo (2008), memberikan pengertian kelembagaan sebagai kesepakatan kolektif (norma) dan prinsip aturan yang dapat diterima, dimana ia lebih jauh membedakan antara konsep kelembagaan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip yang melandasi organisasi dan organisasi sendiri sebagai wadah operasionalisasi norma-norma dan prinsip-prinsip tersebut.

Sarjono (1986) dalam Widodo (2008), menyatakan bahwa lembaga merupakan kaedah-kaedah yang kompleks yang ditetapkan oleh masyarakat, untuk

secara teratur memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai perangkat kebiasaan, tata kelebagaan dan hukum yang berkaitan dengan berbagai fungsi, yang merupakan bagian dari struktur sosial. Gejala ini dibatasi oleh sifat khas dan fungsi-fungsi serta kebiasaan organisasi. Kelebagaan sebagai bentuk perbuatan dalam hubungan kelompok yang dilestarikan oleh kultur dan transfer kultur.

Helmi (1998) *dalam* Widodo (2008), menjelaskan bahwa tidak semua organisasi bisa dikatakan sebagai lembaga. Proses kelebagaan terjadi apabila : a). Terdapat nilai-nilai dan sistem norma yang didukung bersama, b). Aturan tersebut dipatuhi dan menjadi pola perilaku dan pengikutnya dalam jangka waktu relatif lama.

Kartonegoro (1994), mengertikan kelebagaan sebagai organisasi adalah satu kesatuan sosial dikoordinasikan secara sadar dengan batas yang relatif ditentukan dan berfungsi secara berkesenambungan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya mengatakan kelebagaan dapat berupa adat istiadat, tradisi, aturan-aturan atau hukum formal yang mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat terhadap sumberdaya, kelebagaan inilah yang mengatur siapa yang boleh berpartisipasi dalam mengambil keputusan, mengatur siapa yang memperoleh apa dan berapa banyak, kelebagaan menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Menurut Helmi (1998) *dalam* Widodo (2008), ada beberapa alasan utama yang dapat dikemukakan mengapa masalah kelebagaan menjadi penting dalam pembangunan, yaitu (1) Kelebagaan adalah alat untuk mamfasilitasi kegiatan bersama dalam mencapai kemajuan sosial ekonomi dalam pembangunan, (2) Kelebagaan membentuk pola interaksi diantara manusia dan hasil-hasil yang bisa dicapai individual dalam proses interaksi tersebut, (3) kelebagaan dapat meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari sejumlah input tertentu atau sebaliknya dapat menurunkan efisiensi sehingga seseorang harus bekerja lebih keras untuk mencapai hasil-hasil yang sama, (4) kelebagaan membentuk perilaku individu melalui dampak insentif yang ditimbulkan, insentif yang dimaksud meliputi insentif non material seperti kondisi kerja yang baik, hubungan sosial yang

menyenangkan dan perasaan keikutsertaan dalam kegiatan penting dan berskala besar.

Defenisi atau pengertian tentang kelembagaan ini sering orang mencampur adukkan pengertian kelembagaan sama dengan pengertian organisasi. Untuk itu kita mencoba melihat perbedaan dari kedua pengertian tersebut, Kartonegoro (1994), membedakan kelembagaan dengan organisasi, dimana kelembagaan lebih berorientasi pada tujuan sangat mengandalkan norma tertentu sebagai pegangan, muncul karena adanya pengakuan sosial dan pada kenyataannya mampu melakukan kontrol sosial. Sedangkan organisasi sangat berorientasi pada tujuan, pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada ikatan untuk mencapai tujuan bersama dan pengakuan sosial muncul karena didirikan resmi. Lembaga adalah nilai yang mendorong dan mengikat untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sementara organisasi lebih merupakan wadah atau sarana untuk menjalankan norma dan nilai tertentu.

2.4.2. Pembangunan Kelembagaan

Esman dalam Eaton (1986), pembangunan lembaga adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina, ia menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola kelakuan dalam hubungan perorangan dan hubungan kelompok, dalam persepsi baru mengenai tujuan maupun cara-cara, ia tidaklah bersangkutan dengan pengulangan pola-pola yang sudah ada, dengan penyimpangan-penyimpangan marjinal dari praktek-praktek lalu dengan perbaikan-perbaikan yang sedikit saja dalam efisiensi, temanya yang dominan adalah inovasi.

Selanjutnya Israel (1987) mengatakan pembangunan lembaga merupakan proses menciptakan pola baru, kegiatan dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu karena didukung norma dan standar nilai dalam. Sedangkan menurut Esman, pembangunan lembaga adalah perencanaan, penata dan bimbingan dari orang-orang baru atau yang disusun kembali untuk mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknik fisik dan sosial. Menetapkan, mengembangkan dan

melindungi hubungan-hubungan normatif, pola dan tindakan yang baru serta memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Helmi (1997) dalam Widodo (2008) berpendapat bahwa institusi-institusi sosial pada hakekatnya adalah kumpulan dari norma-norma (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk dapat melaksanakan suatu fungsi dari masyarakat.

Lembaga sosial kemudian dianggap sebagai peraturan apabila norma-norma tersebut secara nyata dapat membatasi dan mengatur perikelakuan anggota-anggota masyarakat di mana mereka bermukim dan bergaul. Lembaga sosial benar-benar telah berlaku, apabila norma-norma itu sepenuhnya telah dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara tertib dan memuaskan. Sebagai bukti bahwa lembaga sosial itu telah diakui, mengikat dan dipatuhi, dapat dilihat dari kebiasaan perilaku yang berulang-ulang dengan pola-pola yang sama, yaitu tetap mengacu pada norma-norma sosial yang ada.

Proses pelebagaan suatu norma sosial menjadi lembaga sosial pada umumnya melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Norma sosial diketahui oleh sebagian besar anggota masyarakat setempat, artinya orang-orang telah tahu bahwa norma sosial tersebut adalah merupakan pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku bagi manusia.
2. Norma sosial telah dipahami (dimengerti) oleh sebagian besar anggota masyarakat, artinya masyarakat telah paham bahwa setiap sikap dan tingkah-lakunya senantiasa diatur oleh norma sosial yang ada. Pada tahap ini manusia sadar sepenuhnya bahwa norma itu adalah peraturan yang mengatur perilakunya dalam hubungannya dengan masyarakat atau orang lain. Manusia semakin menyadari bahwa setiap perilaku senantiasa terikat pada norma-norma yang berlaku, dan apabila norma itu dilanggar, maka seseorang akan mendapatkan sanksinya yaitu sanksi- sanksi sosial. Kesadaran itu kemudian berkembang menjadi suatu kepatuhan.
3. Jika kepatuhan itu benar-benar datang dari kesadaran dan keyakinan masyarakat itu sendiri, bahwa norma sosial itu benar-benar dirasakan

telah bermanfaat bagi kehidupannya (masyarakat), maka proses pelebagaan sudah sampai pada tahap yang lebih tinggi.

4. Jika norma-norma sosial itu telah diketahui, dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya, maka mau tidak mau norma tersebut kemudian akan dihargai sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Penghargaan terhadap keberlakuan suatu norma sosial yang ada menunjukkan bahwa norma sosial itu betul-betul telah menjadi lembaga sosial.

2.4.3. Manajemen Kelembagaan

Secara khusus ilmu manajemen didefinisikan sebagai yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan, fungsi apa saja yang harus dilakukan dengan menggunakan alat, tenaga orang, ide, dan system secara efektif dan efisien.

Manajemen, sebagai komponen dari administrasi dapat di tinjau dari tiga segi :

- *Kepemimpinan*, tidak dimaksudkan melakukan sendiri kegiatan-kegiatan operasional akan tetapi menjamin orang lain mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kebijaksanaan, keputusan, dan pedoman yang telah diberikan. kepemimpinan mempunyai dua atribut yaitu personal dan institusional, Atribut – atribut personal kepemimpinan mencakup intelegensi, keberanian, integritas kekuatan, kesiapan fisik, determinasi, ketekunan, kerja keras, kecerdikan dan bahkan terkadang kebingisan, Sedangkan atribut institusional kepemimpinan mencakup status, kekayaan, posisi, dan kolega atau teman yang mampu, kesempatan atau peluang yang khusus, suatu hubungan tertentu antara harapan atau aspirasi rakyat dengan penampilan kepemimpinan dan lain – lain. Atribut–atribut kepemimpinan, baik personal atau institusional akan sangat menentukan efektif tidaknya kepemimpinan. Dengan demikian seorang pemimpin memang di tuntutan mempunyai berbagai kelebihan dari yang dipimpin, seperti keunggulan emosional, keunggulan kecerdasan, keunggulan ketrampilan, keunggulan fisik, kekayaan dan lain sebagainya.

1. *Pengambilan keputusan*, kesuksesan seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari banyaknya jabatan atau pangkat saja. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana ia memanager organisasi, bersikap dan mengambil keputusan secara cermat, cerdas, dan cepat.
2. *Human Relation*, hasil dari kebulatan keputusan tadi pada proses tindak lanjutnya sebaiknya berpijak pada unsur kemanusiaan dan jika digerakkan dengan tepat maka akan menjadi efisien dan jika tidak demikian maka terkadang manusia justru akan menjadi unsur perusak rencana (*Destroyer of Planning*).

Dari kaca mata manajemen ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan:

1. Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aset penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sehingga sisi manajerial merupakan konsekuensi lebih jauh dalam mencapai efektifitas organisasi.
2. Aspek legal formal, kebijakan dan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan institusional.
3. Kultur; tata nilai yang melatar belakangi perilaku manajerial sesuatu institusi dalam mencapai tujuannya yang dilingkungan perusahaan dikenal dengan istilah Corporate Culture.
4. Integrasi; Yang memungkinkan timbulnya kebersamaan dalam lingkungan sumberdaya manusia dalam suatu organisasi, sehingga sangat potensial dalam mencapai tujuan organisasi.

Di dalam manajemen dibutuhkan beberapa persyaratan :

1. Harus ada tujuan/platform
2. Harus ada masyarakat/anggota
3. Harus ada manager/leader
4. Harus ada kerjasama/corporate
5. Harus ada sistem/mekanisme kerja yang kongkrit.

2.4.4. Faktor Perilaku

Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan dan baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi yang termasuk kedalam resiko dalam pengembalian kredit (Notoatmodjo 2003).

Kemudian dalam perkembangannya, domain perilaku yang diklasifikasikan oleh Bloom dalam Notoatmodjo (2003), dibagi menjadi tiga tingkat:

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil *tahu* seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya.

2) Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat, keinginan (*kemauan*) dan emosi yang bersangkutan.

3) Tindakan atau praktik (*practice*)

Tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan, yang merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki berupa *kemampuan* dalam melakukan hasil dari pengetahuan.

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*covert*). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran (keinginan/kemauan), dan sikap yang terjadi belumbisa diamati secara jelas oleh orang lain.
2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek/kemampuan melakukan (*practice*).

Penelitian Rogers (1974), dalam Notoatmojo 2003 mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), didalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni.

1. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu
2. Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus
3. Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi
4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru
5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kemauan dan sikapnya atau kemampuannya dalam mengambil tindakan terhadap stimulus. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran/kemauan, dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng (long lasting). (Notoatmodjo, 2003 hal 122).

Pada pengembalian kredit perilaku merupakan salah satu faktor yang penting untuk di amati karena perilaku adalah suatu bentuk perwujudan dari 3 ranah yang tingkatan yang mempengaruhi tindakan seseorang dalam pengambilan keputusan yang meliputi *kognitif* berupa pengetahuan seseorang, *afektif* adalah berupa sikap seseorang dari perasaan serta *psikomotorik* yang dikenal dengan keterampilan berupa kemampuan dalam berbuat. Proses pengambilan keputusan berdampak pada tingkat pengembalian yang terdiri dari 3 kategori tersebut yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sehingga pada penelitian ini peneliti memperoleh Faktor perilaku ini dapat dijabarkan dengan keadaan Tahu, Mau dan Mampu.

2.5. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

Definisi lembaga keuangan menurut UU No. 14/1976 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat (Suyatno *et al*, 2007).

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997) dalam Ashari (2006), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Asian Development Bank (ADB) dalam Ashari (2006) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.

Menurut Ashari (2006), walaupun terdapat banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut. *Pertama*, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi. *Kedua*, melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada, sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. *Ketiga*, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi perdesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan oleh LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Hal ini dikarenakan:

- (1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan perdesaan, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa.
- (2) Petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur.
- (3) Karakteristik usahatani umumnya membutuhkan *platfond* kredit yang tidak terlalu besar, sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM.
- (4) Dekatnya lokasi LKM dan memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani, sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah;
- (5) Adanya keterkaitan *socio-cultural* serta hubungan yang bersifat personal emosional diharapkan dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian kredit (Ashari, 2006).

2.6. Program Bantuan Langsung Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP)

Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) adalah bagian pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran (Departemen Pertanian, 2008).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bertujuan untuk: a) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; b) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani; c) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis, dan d) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Departemen Pertanian, 2009).

Dana program BLM-PUAP ini berasal dari APBN yang diberikan dalam bentuk hibah kepada Gapoktan. Sedangkan anggotanya yang akan menggunakan, harus meminjam, dan mengangsur pengembaliannya, dengan ketentuan yang dibuat

oleh Gapoktan tersebut (Anwari, 2009). Namun dalam pelaksanaannya, dana tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Gapoktan sebagai dana bergulir bagi anggota kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan penerima dana tersebut.

Sasaran pemberdayaan pertanian pengembangan usaha agribisnis perdesaan ini menurut Departemen Pertanian (2009), yaitu:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin atau tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa
- b. Berkembangnya 10.000 gapoktan atau Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani
- c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman

Indikator keberhasilan output pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan menurut Departemen Pertanian(2009) adalah:

- a. Tersalurkannya dana BLM - PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

Indikator keberhasilan *outcome* pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan menurut Departemen Pertanian(2009) antara lain:

- a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, Buruh tani maupun rumah tangga petani;
- b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;

- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
- d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah.

Sedangkan indikator *benefit* dan *impact* PUAP menurut Departemen Pertanian(2009) antara lain:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP;
 - b. Berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
 - c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan
- Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1) keberadaan Gapoktan; 2) Keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani ; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan,dll; dan 4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan menurut Departemen Pertanian(2009) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.
2. Optimasi potensi Agribisnis di desa miskin dan tertinggal
3. Penguatan modal petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan
4. Pendampingan bagi Gapoktan

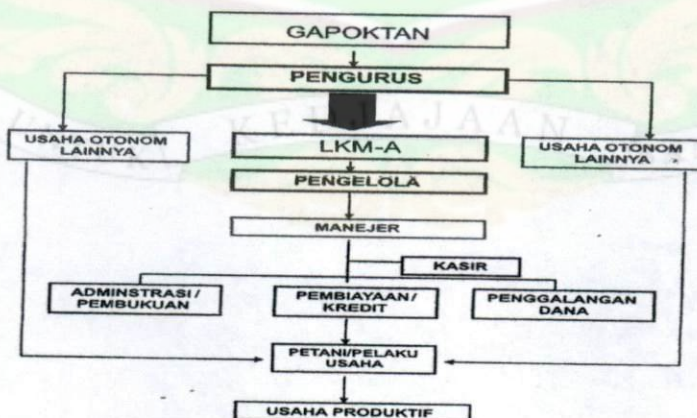
Strategi operasional dari Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) menurut Departemen Pertanian(2009) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui :
 - a. Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP;
 - b. Rekrutmen dan pelatihan bagi Penyelia Mitra Tani;
 - c. Pelatihan bagi pengurus Gapoktan;
 - d. Pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping.

2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal, melalui:
 - a. Identifikasi potensi desa;
 - b. Penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan;
 - c. Penyusunan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan, melalui:
 - a. Penyaluran BLM – PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan;
 - b. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4. Pendampingan gapoktan dillaksanakan melalui:
 - a. Penempatan dan pengurusan Penyuluh Pendamping di setiap Gapoktan;
 - b. Penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten atau kota

2.6.1. Kedudukan dan Fungsi LKM-A dalam Lembaga Gapoktan

LKM-A adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. LKM-A bergerak dalam bidang pembiayaan bagi para petani dalam wilayah Gapoktan. Sebagai unit usaha Gapoktan, kedudukan LKM-A sejajar dengan unit usaha lainnya yang ada pada Gapoktan tersebut. Pengurus unit usaha LKM-A adalah pengurus Gapoktan sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam AD/ART Gapoktan. Pengurus LKM-A mengeluarkan surat penunjukkan atau pengangkatan tenaga pengelola LKM-A sesuai struktur organisasi LKM-A tersebut (BPTP Sumatera Barat, 2009).



Gambar 1: Kedudukan LKM-A dan usaha otonom lainnya dalam Gapoktan

Terkait dengan kelancaran program BLM-PUAP, bagi Gapoktan yang baru tumbuh, LKM-A merupakan usaha otonom penting yang perlu dibentuk lebih awal. Tujuannya adalah agar dana program BLM-PUAP dapat dikelola dengan baik dengan memperhatikan penggunaan dana awal adalah untuk bantuan modal bagi para petani yang sudah direncanakan menurut RUA, RUK dan RUB, pengembangan usaha agribisnis di wilayah Gapoktan yang bersangkutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengurus dan pengelola LKM-A terkait dengan kedudukannya dalam Gapoktan adalah:

1. Berdasarkan perencanaan usaha dan kebutuhan bantuan dana program BLM-PUAP yang dituangkan dalam RUB, sistem penyaluran dananya dari pusat (Deptan) adalah melalui rekening Gapoktan
2. Untuk lebih memfokuskan pengelolaan dana dalam lembaga Gapoktan, maka Gapoktan membentuk sebuah LKM-A yang mendukung pembiayaan usaha agribisnis petani kecil di wilayah kerja Gapoktan. Secara bertahap LKM-A berkembang menuju lembaga keuangan mikro yang profesional dan berbadan hukum koperasi (Badan Hukum KSP) yang berada di nagari.
3. Kepengurusan Gapoktan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) bisa menjadi pengurus LKM-A, apabila mereka menjadi anggota pendiri LKM-A (memiliki simpanan khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib) dan disepakati oleh anggota pendiri dalam forum musyawarah (Rapat Umum Anggota Pendiri).
4. Pengelola LKM-A terdiri dari: (i)manajer,(ii) bagian administrasi/pembukuan, (iii) kasir, (iv) bidang pembiayaan, (v) penggalangan dana;
5. Sistem rekrutmen tenaga pengelola ditentukan dan diangkat oleh pengurus Gapoktan dengan memperhatikan kriteria: (i) mempunyai motivasi kerja yang tinggi, (ii) tenaga pengangguran di nagari, (iii) pendidikan yang memadai;
6. LKM-A dapat lebih berfungsi dalam menggulirkan dana program BLM-PUAP, karena itu perlu dilakukan penguatan LKM-A menuju lembaga keuangan yang profesional (memenuhi persyaratan pendirian LKM);

7. Dana penguatan modal BLM-PUAP Rp. 100 juta per nagari/kelurahan dapat dijadikan sebagai modal dasar disamping sumber dana lainnya untuk menumbuhkembangkan sebuah lembaga keuangan mikro di nagari;
8. LKM-A diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga keuangan mikro nagari dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi nagari (BPTP Sumatera Barat, 2009).

2.6.2. Profil Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Kota Padang

Kota Padang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Barat yang terletak dipantai bagian barat pulau Sumatera yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan dan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kota Padang adalah 694,96 Km². Jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2009 mencapai 875,75 ribu jiwa. Dari luas Kota Padang sebagian besar berupa hutan lindung (51,01%) dan sisanya untuk lahan budidaya dan bangunan/perkarangan. Ditengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Padang, produksi tanaman pertanian cenderung terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa produktivitas tanaman pertanian mengalami peningkatan. Produksi tanaman padi meningkat dari 56,413 ribu ton pada tahun 2008 menjadi 58,290 ribu ton pada tahun 2009 (BPS Kota Padang, 2010).

Sektor perdagangan justru paling banyak menyerap tenaga kerja yang ada yakni sebanyak 32,46% sedangkan sektor pertanian hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,28%. Hal ini menunjukkan bahwa petani yang ada masih hidup miskin dan terpinggirkan. Kini saatnya kembali ke pertanian dan diupayakan menyejahterakan para petani, buruh tani, pekerja kebun, termasuk peternak dan nelayan. (BPS Kota Padang, 2010).

PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta subsektor. Pemerintah Kota Padang sebagai pimpinan salah satu kota penerima

dana PUAP telah merespon kegiatan ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Padang 23 November 2009 tentang pembentukan Tim Teknis kegiatan PUAP Nomor 1007 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Gapoktan Penerima Dana PUAP dan Penyuluh Pendamping PUAP Kota Padang Nomor 1007 Tahun 2009.

Tujuan dan sasaran PUAP di Kota Padang memiliki tujuan dan sasaran yang sama seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (2010) yaitu :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Penyuluh, Penyelia Mitra Tani;
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Adapun sasaran dari program PUAP adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil dan buruh tani;
2. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Tujuan dan sasaran PUAP di Kota Padang memiliki tujuan dan sasaran yang sama seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kemtan, 2010) yaitu :

- 1) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
- 2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Penyuluh, Penyelia Mitra Tani;
- 3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;

- 4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Adapun sasaran dari program PUAP adalah :

- 1) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik/penggarap) skala kecil dan buruh tani;
- 2) Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Dalam pelaksanaannya PUAP Kota Padang memiliki susunan Tim Teknis PUAP Kota Padang berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2011 Tanggal 18 April 2011 yaitu :

I. Tim Pengarah

- Pembina : Walikota Padang
 Wakil Pembina : Wakil Walikota Padang
 Pengarah : Sekda. Kota Padang
 Anggota :
1. Asisten II
 2. Ka. Bappeda
 3. Ka. Inspektorat
 4. Ka. DPKA
 5. Kadis LKM-A & UMKM
 6. Ka. Kantor Ket. Pangan

II. Tim Pelaksana

- Ketua : Ka. Diperbakhut Kota Padang
 Wakil Ketua : Sekretaris Diperbakhut
 Sekretaris : Ka. Bidang Penyuluhan
 Anggota :
1. Ka. Bidang Tan. Pangan dan Holtikultura
 2. Ka. Bidang Perkebunan
 3. Ka. Bidang Peternakan
 4. Koordinator Fungsional

5. Kasi. Pengembangan Teknologi
6. Kasi. Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan
7. Kasi. PSDM
8. TOT PUAP Kota Padang
9. Ka. BPP Marapalam
10. Ka. BPP Nanggalo
11. Ka. BPP Koto Tengah
12. Penyuluh Pendamping PUAP
13. Penyelia Mitra Tani

Sekretariat : Staf. Bid. Penyuluhan

Pada tanggal 20 November 2009, pemerintah Kota Padang telah menyalurkan bantuan PUAP kepada 12 Gapoktan yang berasal dari Kelurahan. Setiap Gapoktan mendapatkan bantuan sebesar Rp.100 juta yang digunakan untuk kepentingan masing-masing Gapoktan sesuai dengan RUB yang telah diajukan.

PUAP di Kota Padang tahun 2009 mendapatkan respon bagus dari petani. Namun, berdasarkan laporan dari PMT Kota Padang pelaksanaan PUAP di gapoktan-gapoktan yang menerima bantuan dana tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Pengurus Gapoktan kurang terlibat langsung dalam pemberian pinjaman
2. Partisipasi peminjam yang masih rendah dalam pengembalian pinjaman
3. Pembukuan belum terkelola dengan baik atau tidak sesuai dengan akad pinjaman
4. Pengurus LKM-A kurang memahami tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan tugasnya
5. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola keuangan masih rendah
6. Pengurus Gapoktan menunjuk orang yang masih sekolah/kuliah untuk menjadi pengurus/pengelola, sehingga mereka sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat dalam melakukan simpan pinjam

7. Rendahnya kesadaran petani/peminjam dalam hal membangun kelembagaan tani

Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan PUAP dilapangan diharapkan ditahun-tahun berikutnya PUAP yang merupakan bantuan bergulir ini dapat berkembang di Kota Padang dengan pesat. Karena dengan PUAP, akses petani ke sumber permodalan dapat dengan mudah tercapai. Selain itu untuk LKM-A yang berkembang di setiap gapoktan dapat berkembang lebih maju dalam mengatur keuangan gapoktan, sehingga LKM-A tersebut dapat menjadi profesional dan bisa menjadi pengganti bank bagi petani.

2.7. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pendapat (Yasri, 1991) dalam tesis nya yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit usaha tani pada KUD Sarasah dan KUD Trinari Kecamatan Salimpaung dan Rambatan Kabupaten Tanah Datar", mengungkapkan membagi faktor-faktor tersebut kedalam faktor internal dan eksternal, faktor internal yang meliputi faktor sosial ekonomi petani serta eksternal dari pengaruh perubahan cuaca dan iklim yang berdampak pada produksi padi mereka yang berkurang sehingga menyebabkan mereka tidak sanggup membayar tepat waktu serta pengaruh dari perubahan harga yang di tetapkan pemerintah berpengaruh terhadap keadaan ekonomi keluarga mereka sehingga berkorelasi terhadap kemampuan mereka untuk mengembalikan kredit sehingga tidak tepat waktu.

Tantawi *et al*, (2009), selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas Medan Area dalam jurnalnya yang berjudul "Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pengembalian dana Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) pada petani kelapa sawit di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil menjelaskan faktor sosial yang berpengaruh terhadap pengembalian dana adalah jumlah tanggungan, sedangkan faktor ekonomi yang berpengaruh adalah modal, pendapatan dan luas lahan. Setelah dilakukan uji F secara serentak faktor sosial ekonomi yang paling berpengaruh dalam pengembalian dana adalah jumlah tanggungan. besarnya

jumlah tanggungan merupakan alasan yang paling utama penyebab kemacetan dalam pengembalian dana (BPLM).

Handoyo (2009), dalam skripsinya berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan syariah untuk UMKM Agribisnis pada KBMT Wihdatul Ummah Kota Bogor” menjelaskan bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh dalam kelancaran pengembalian kredit pada KBMT tersebut adalah faktor karakteristik personal, karakteristik profil usaha dan karakteristik mekanisme pembiayaan.

Faktor-faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pengembalian pembiayaan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman usaha. Tingkat pendidikan dan pengalaman usaha memiliki pengaruh positif dengan tingkat pengembalian pembiayaan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman usaha debitur maka peluang untuk mengembalikan pembiayaan secara lancar semakin tinggi dan sebaliknya.

Delfi (2010), dengan skripsinya yang berjudul “Studi komparatif kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Di Kelompok SPP Beringin Sakti dan Aster Biru Kabupaten Tanah Datar” menjelaskan bahwa Dari hasil penelitian mengenai Studi Komparatif Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) antara Kelompok SPP Beringin Sakti yang lancar dan Aster Biru yang macet terlihat dari pelaksanaan pencairan dan penerimaan kredit meliputi proses sosialisasi, seleksi dan pencairan dana terdapat perbedaan pengelolaan sedangkan faktor-faktor yang berkoeksistensi dengan kelancaran kelompok dalam mengembalikan dana pinjaman adalah karakteristik dari pengurus kelompok yaitu tingkat pendidikan dari pengurus kelompok. Kemudian manajemen dari kelompok tersebut, yaitu kemampuan kelompok dalam melaksanakan setiap keputusan yang disepakati dalam kelompok tersebut.

Sedangkan Handayani (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit PKPS-BBM pada Koptan Saiyo dan Koptan Sejahtera Abadi mengungkapkan:

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembalian kredit adalah :

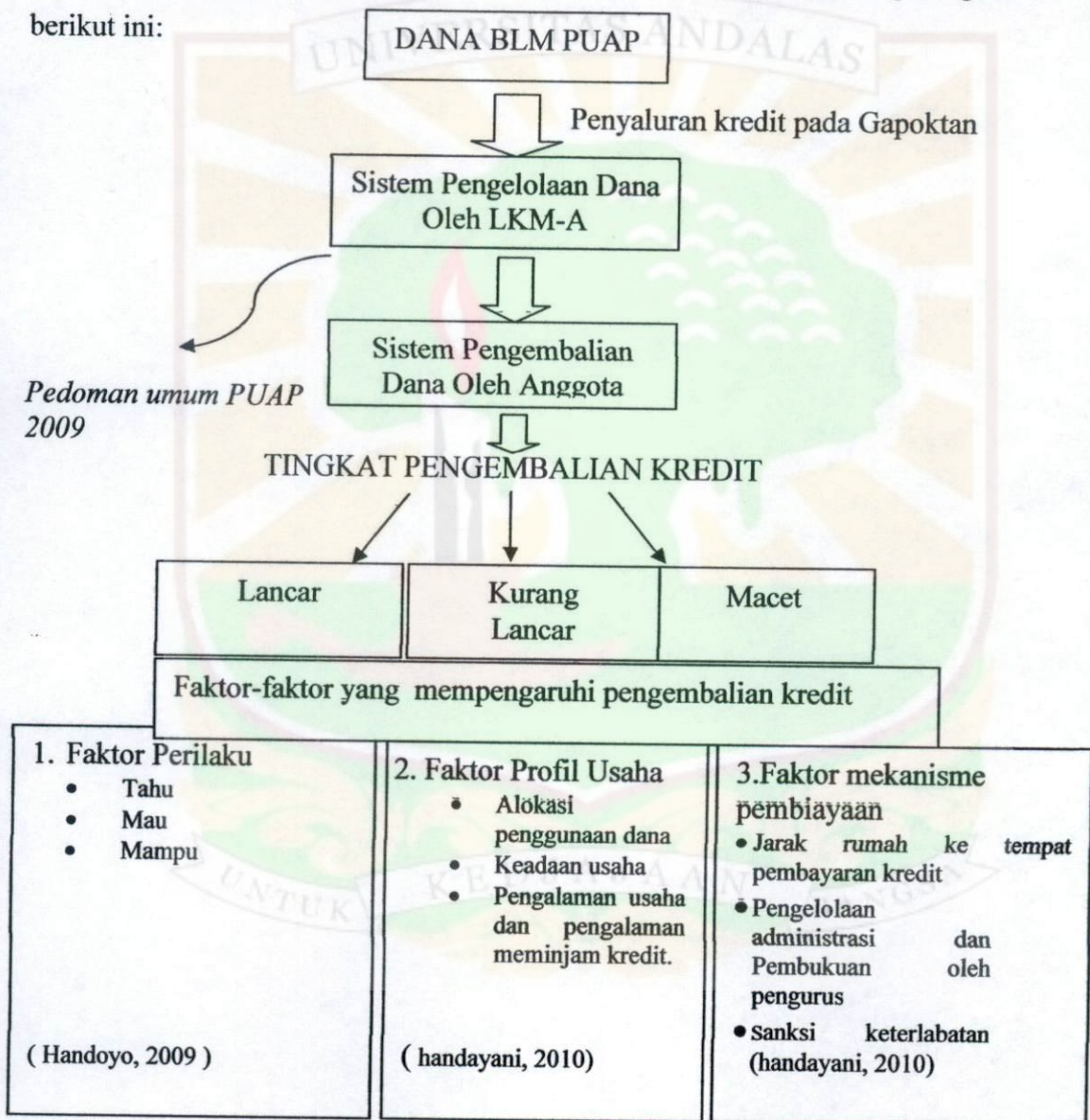
- a. Pada tingkat koperasi adanya kelangkaan sumberdaya profesional, tidak adanya analisa kredit didalam koperasi.
- b. Pada tingkat anggota rendahnya kesadaran berkoperasi dikalangan para anggota
- c. Pada faktor internal koperasi adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengembalian kredit, sanksi bagi anggota yang menunggak serta pemeriksaan terhadap pelayanan administrasi.
- d. Pada faktor internal anggota dilihat dari alokasi penggunaan kredit, perencanaan dari usaha yang dilaksanakan, pendapatan yang diterima serta adanya administrasi usaha yang dibuat oleh anggota.

2.8. KERANGKA PEMIKIRAN

Program PUAP dalam bentuk BLM yang merupakan program bantuan kredit di bidang permodalan dari pemerintah diberikan kepada gapoktan – gapoktan yang ada di seluruh Indonesia ini diharapkan menjadi bantuan produktif dan dapat bergulir di kalangan kelompok yang tergabung dalam LKM-A. Oleh sebab itu manfaat dari dana tersebut hendaknya dirasakan oleh semua anggota dan berkesinambungan, maka dana BLM – PUAP tersebut yang telah disalurkan kepada gapoktan kemudian dikelola dengan ketentuan dan pedoman yang ada dalam Pedoman Umum PUAP 2009 yang berguna untuk petunjuk bagi gapoktan dan LKM-A pemula sebagai pengatur jalannya kredit tersebut selalu terarah dan tepat sasaran.

Setelah dana kredit tersebut diberikan kepada anggota maka dana tersebut dimanfaatkan sesuai ketentuan yang dibuat oleh pengurus dan anggota LKM-A sebelumnya yang menjelaskan besar bunga, besar kredit yang diberikan, jangka waktu pengembalian, tempat pengembalian serta sanksi yang diberikan dalam keterlambatan yang kemudian diwujudkan dalam sistem pengembalian kredit oleh anggota yang menggambarkan keadaan pengembalian kredit oleh anggota kepada LKM-A dari kesepakatan sebelumnya. Sehingga memperlihatkan tingkat pengembalian kredit oleh anggota menjadi 3 kategori yaitu lancar, kurang lancar, dan macet.

Seperti yang dijelaskan diatas tujuan pemerintah memberikan program ini adalah agar dana tersebut benar- benar bergulir dengan kondisi idealnya yaitu lancar dalam pengembalian kredit namun yang terjadi penunggakan tidak terhindarkan sehingga perlu rasanya dilakukan penelitian terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian tersebut yang mana diduga faktor perilaku, faktor profil usaha dan mekanisme pembiayaan kredit tersebut sebagai faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari pemikiran peneliti tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Bagan kerangka pemikiran penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LKM-A Masra yang merupakan salah satu unit usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Jaya yang berdiri tahun 2008 tahap I penerima dana PUAP di Kota Padang. Gapoktan Harapan Jaya dengan LKM-A nya Masra terletak di Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Pemilihan tempat ini dilakukan karena LKM-A Masra ini adalah LKM-A yang paling kecil dalam perkembangan aset LKM-A nya dan pengembalian dana ke LKM-A yang paling sedikit dengan anggota yang paling banyak menunggak (Lampiran 5). Pemilihan tempat ini dilakukan secara sengaja (*Purposive*), berdasarkan data perkembangan dana Gapoktan dan LKM-A penerima dana PUAP Kota Padang 2010.

Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung setelah dikeluarkannya surat rekomendasi penelitian dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas yakni pada bulan Agustus-September 2011.

3.2. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari seluruh personalitas. Studi kasus ditujukan untuk mendapatkan keterangan yang terperinci dan mendapatkan informasi mengenai variabel yang diamati (Nazir, 2003).

3.3. Teknik Pengambilan Responden

Berdasarkan tujuan pertama yaitu mendiskripsikan pengelolaan dana pada LKM-A Masra maka dibutuhkan informasi melalui pengurus dan pengelola LKM-A serta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Pengurus dan pengelola yang akan dijadikan informan kunci adalah Ketua gapoktan, dan Manajer Umum LKM-A Masra yang diambil secara sengaja (*purposive*), karena Ketua dinilai dapat memberikan semua informasi untuk mengetahui profil gapoktan dan LKM-A. Pengelola yang

dijadikan informan kunci adalah Manajer Umum dan Bendahara karena mengetahui seluruh informasi tentang pengelolaan dana pada LKM-A Masra secara umum. Sedangkan untuk tujuan kedua mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana maka pengambilan respondennya dilakukan secara *sensus* (keseluruhan).

Dari responden anggota dikelompokkan menjadi 3 strata yaitu: kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit macet. Anggota yang termasuk dengan kriteria tersebut menurut RAT LKMA Masra (2011) yaitu:

1. Tingkat pengembalian dikatakan kredit lancar apabila pembayaran dilakukan 8 - 10 kali dalam 10 bulan
2. Tingkat pengembalian dikatakan kurang lancar apabila pembayaran dilakukan 4 - 7 kali dalam 10 bulan
3. Tingkat pengembalian dikatakan kredit macet apabila pembayaran dilakukan 0 - 3 kali dalam 10 bulan

Responden yang diambil secara *sensus* yakni semua anggota atau populasi LKM-A Masra yang berjumlah 52 orang sebagai anggota yang meminjam (kredit) untuk keperluan usahatani dan off farmnya. Serta untuk melihat pelaksanaan pengelolaan dana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana oleh anggota LKM-A tersebut maka pengambilan responden sebaiknya di klasifikasikan menjadi yang lancar, kurang lancar dan macet agar lebih memudahkan dalam mentabulasikan hasil dan menarik kesimpulan untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Anggota LKM-A Masra Menurut Tingkat Pengembalian Kredit

Jenis Strata	Anggota LKM-A Masra (populasi)
Lancar	24
Kurang lancar	14
Macet	14
Jumlah	52

Perhitungan responden ini di lihat dari anggota yang meminjam dana BLM-PUAP pada LKM-A Masra yang termasuk kategori di atas yaitu untuk strata lancar berjumlah 24 orang, kategori kurang lancar sebanyak 14 orang dan kategori macet berjumlah 14 orang.

Untuk informan kunci pada LKM-A Masra yang akan dijadikan responden terdiri dari ketua gapoktan, pengurus LKM-A yaitu Manajer dan Bendahara/Sekretaris (1 orang yang sama) serta penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan Penyelia Mitra Tani (PMT) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rincian Key Informant

Key informan	Jumlah
a. Ketuagapoktan	1
b. Pengurus LKM-A, (Manajer, Sekretaris)	2
c. Penyuluhpendamping	1
d. PMT Kota Padang	1
Total	5

3.4. Variabel yang Diamati

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka variabel-variabel yang diamati penulis rinci sebagai berikut :

3.4.1 Pada tujuan pertama yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan dana BLM-PUAP oleh LKM-A Masra Kota Padang.

Variabel yang di amati adalah :

1. Profil Gapoktan Harapan Jaya dan LKM-A Masra, mencakup data tentang:
 - a. Gambaran umum
 - b. Sejarah dan Tujuan berdiri
 - c. Organisasi
 - d. Permodalan
 - e. Keanggotaan
 - f. Usaha, produk dan perkembangannya.

2. Pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A
 - a. Realisasi pencairan dana BLM-PUAP kepada anggota
 - a) Proses seleksi anggota calon penerimaan kredit
 - b) Proses sosialisasi kepada anggota calon penerimaan kredit
 - c) Proses Pencairan Dan Penyaluran Dana
 - d) Besarnya kredit yang diberikan pada anggota penerima
 - e) Besar bunga yang dibebankan pada anggota penerima kredit
 - b. Sistem pengembalian kredit
 - a) Jangka waktu pengembalian kredit
 - b) Cara penagihan kredit
 - c) Tempat pengembalian kredit
 - d) Waktu pengembalian kredit
 - e) Penggunaan dana oleh anggota
 - c. Pengawasan dan kontrol

3.4.2 Pada tujuan kedua yaitu mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pengembalian dana PUAP oleh anggota LKM-A Masra, maka variabel yang diamati adalah sebagai berikut:

A. Faktor Perilaku

Pada faktor perilaku variabel yang diamati dalam perilaku penerima terhadap pengembalian kredit adalah kondisi: Tahu (*Knowledge*), Mau (*Attitude*), dan kemampuan (*Practice*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. TAHU

Kedaaan tahu dilihat dari tingkat pengetahuan terhadap program, aturan serta hak dan kewajiban dalam LKM-A oleh tiap responden serta kemampuan mengingat kembali materi sosialisasi yang diukur dengan dilakukan *scoring*, dimana untuk mengetahui pengetahuan responden tergolong pada tingkat mana (Tahu, Kurang Tahu, dan Tidak Tahu) dilakukan dengan pengumpulan kuisisioner dan wawancara mendalam.

1.1. Pengetahuan

Menurut Arikunto, (1998) dalam Notoatmodjo, (2003) bahwa pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden. Kedalam pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut diatas sedangkan kualitas pengetahuan pada masing-masing tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan scoring yaitu dimana setiap jawaban benar dari masing-masing pertanyaan diberi nilai 1 dan jika salah diberi nilai 0 yang didukung dengan jawaban pendukung.

Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan jumlah skor jawaban dengan skor yang diharapkan (tertinggi) kemudian dikalikan 100% dan hasilnya berupa prosentase dengan rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$N = \frac{Sp}{Sm} \times 100\%$$

Keterangan :

- N = Nilai pengetahuan
 Sp = Skor yang didapat
 Sm = Skor tertinggi maksimum

Selanjutnya prosentase jawaban diinterpretasikan dalam kalimat kualitatif dengan acuan sebagai berikut :

- a) Nilai = 75-100% → Tahu
 b) Nilai = 50-70% → KurangTahu
 c) Nilai < 50% → TidakTahu

1.2. Sosialisasi

Pengukuran sosialisasi sama dengan variabel pengetahuan yaitu dengan menggunakan *scoring* seputar materi yang diberikan pada saat sosialisasi dengan pemberian kuisioner dan wawancara mendalam.

2. MAMPU

Mampu diukur dari kemampuan responden dari pendapatannya yang diperoleh dari hasil usaha produktif dari kredit yang diberikan tersebut. Semua pendapatan responden dihitung perbulan disesuaikan dengan jenis usahanya, Untuk mengetahui pendapatan responden diketahui dengan cara langsung bertanya pada responden.

Lalu untuk mengkategorikan kemampuan responden tergolong kepada pendapatan apa (tinggi, sedang dan rendah) maka digunakan rumus statistika dengan mencari *Standard Error* nya terlebih dahulu, jika sudah didapatkan hasilnya untuk mendapatkan kategori pendapatan tinggi maka ditambah dengan rata-rata pendapatan semua anggota yang telah dibagi jumlah anggota apabila hasilnya tinggi dari pendapatan tiap anggota maka dapat ditarik kesimpulan pendapatan anggota tersebut *tinggi* dan sebaliknya apabila hasil *standard error* nya dikurang dengan rata-rata pendapatan yang telah dibagi dengan jumlah anggota tersebut, apabila pendapatannya lebih kecil maka pendapatannya *rendah* serta apabila berkisar antara kedua hasil tersebut maka hasilnya *sedang*, dengan rumus Walpole, (1992) sebagai berikut :

$$Se^2 = \frac{\sum X^2 - 1}{n} (\sum X)^2$$

$$n-1$$

$$Se = \sqrt{Se^2}$$

Rata- rata + Se = Tinggi → Pendapatan tiap anggota diatas hasil tambah tersebut.

Rata- rata – Se = Rendah → Pendapatan kurang dari hasil pengurangan tersebut

pendapatan Sedang → Hasil berada antara kedua kategori tersebut.

Keterangan:

X = Rata- rata pendapatan anggota

N = Jumlah populasi

Se = Standar error

3. Sanksi keterlambatan

Merupakan sanksi atau aturan yang telah disepakati sejak awal oleh seluruh anggota LKM-A dalam pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci (*Key Informan*) yaitu: Ketua Gapoktan, Pengurus LKM-A Masra (Sekretaris dan Bendahara dan merupakan satu orang yang sama), Pengelola LKM-A yakni Manajer, Penyelia MitraTani (PMT) Kota Padang, Petugas Penyuluh Pendamping Nanggalo serta anggota Gapoktan. Disamping itu, data primer ini juga dikumpulkan melalui pengisian kuisioner dan atau daftar pernyataan oleh responden.

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang dikumpulkan berupa laporan-laporan kegiatan, laporan-laporan mengenai keuangan maupun dokumen-dokumen lain. Data-data sekunder ini diperoleh dari Sekretariat Tim PUAP Sumatera Barat, Gapoktan, LKM-A Masra dan PMT, Penyuluh Pendamping, BPS, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian. Data-data primer dan sekunder yang dikumpulkan tersebut adalah data dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.

Tabel 3. Jenis Data, Teknik dan Sumber Data.

No.	Kriteria	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
1.	Data Primer	Wawancara langsung	Pengurus Gapoktan, Pengelola LKM-A, PMT, Penyuluh Pendamping, petani anggota Gapoktan, dan petani Responden
2	Data Sekunder	Studi Kepustakaan terhadap: laporan-laporan kegiatan dan keuangan serta dokumen-dokumen lain.	Sekretariat PUAP, Gapoktan /LKM-A Masra, PMT, Penyuluh Pendamping, Internet dan Badan Pusat Statistik (BPS)

3.6. Analisa Data

Analisa dilakukan berdasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu:

Setelah terkumpul data primer dan skunder yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dilakukan analisa data. Untuk menjawab dari rumusan yang ada data-data yang terkait dengan semua tujuan penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menurut Meleong (2003), analisis deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian menghasilkan data deskripsi secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada di daerah penelitian.

3.6.1. Pada tujuan pertama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana pada LKM-A Masra dilakukan dengan analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan seluruh data yang ada untuk selanjutnya dilakukan pembahasan yang diarahkan pada tujuan penelitian.

3.6.2. Untuk tujuan penelitian kedua yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana PUAP oleh anggota LKM-A Yaitu dengan deskriptif kualitatif kuantitatif, data yang bersifat kualitatif diukur dengan cara memaparkan seluruh data yang ada dan dilakukan analisa dari kuisisioner dan wawancara dengan menggunakan prinsip 5W+1H (*What, Why, Who, Where, When, dan How*) yang berarti (Apa, Mengapa, Siapa, Dimana, Kapan, dan Bagaimana), kemudian data yang bersifat kuantitatif ini digunakan untuk menskor pengetahuan tiap anggota dan sosialisasi

kemudian mengkategorikan pendapatan masing- masing strata tergolong kepada tinggi, sedang dan rendah dengan metode statistika kemudian dimasukkan dalam tabulasi dan dilakukan penarikan kesimpulan.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1. Letak Geografis

Kecamatan Nanggalo berada pada 3-8 meter dpl yang merupakan salah satu kecamatan dari Kota Padang provinsi Sumatera barat yang terletak pada $0^{\circ} 58''$ LS dan 100° BT dengan luas daerah sebesar $8,07 \text{ Km}^2$ dengan temperatur 22°C - $31,7^{\circ}\text{C}$ dan curah hujan $384,88 \text{ mm/bulan}$.

Dengan batas daerah sebagai berikut:

- Batas Utara dengan kecamatan koto tengah
- Batas Selatan dengan padang utara
- Batas Barat dengan padang utara
- Batas Timur dengan kecamatan kurunji

Kecamatan Nanggalo memiliki kelurahan sebanyak 6 (enam) kelurahan yang terdiri dari Tabing Banda Gadang, Kampung Olo, Kampung Lapai, Surau Gadang, Kurao Pagang serta Gurun Lawas yang menjadi daerah penelitian dengan luas wilayah sebesar 0.85 Km^2 .

4.1.2. Penduduk

Penduduk di daerah Gurun Lawas berjumlah 2,368 jiwa dengan 507 KK. Jumlah penduduk di gurun lawas dilihat dari segi umur dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Gurun Lawas.

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
Laki-Laki	0 – 14 tahun	374	15,79
	15 – 54 tahun	663	27,99
	>54 tahun	132	5,57
Perempuan	0 – 14 tahun	363	15,32
	15 – 54 tahun	614	25,92
	>54 tahun	222	9,37

Sumber : BPS Kota Padang (Nanggalo Dalam Angka), 2009.

Dari Tabel 4 diatas dapat dilihat jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak,

produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 31,11% : 53,91% : 14,94%. Dari Jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang.

Adapun jumlah rumah tangga miskin di kelurahan Gurun Laweh kecamatan Nanggalo Kota Padang pada tahun 2008 berdasarkan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dibayarkan berjumlah 104 KK. Untuk lebih jelasnya lihat (Lampiran 7).

4.1.3. Pertanian

Untuk sektor pertanian Kecamatan Nanggalo merupakan daerah yang luas lahannya cukup besar dengan luas lahan sebesar 808 Ha. Masyarakat daerah Nanggalo memanfaatkan SDA yang dimiliki dengan melakukan usaha tani dengan bertanam berbagai macam jenis produksi, sebagian besar masyarakat Nanggalo terutama Kelurahan Gurun Laweh mengusahakan padi sawah, hortikultura dan peternakan. sebagai jenis produksi yang di tanam dan di manfaatkan untuk konsumsi dan dipasarkan.

Luas lahan yang cukup besar juga di gunakan untuk usaha non pertanian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Penggunaan Tanah di Kecamatan Nanggalo Tahun 2009

No	Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Ladang/huma	73	9,03
2	Tambak	-	
3	Padang penggembalaan rumput	-	
4	Sawah	251	31,06
5	Tegalan/Kebun	145	17,94
6	Hutan rakyat	8	0,99
7	Semak/rawa	-	
8	Perkebunan	-	
9	pekarangan	268	33,16
10	Hutan negara	-	
11	Lain-lain	63	7,79
	Jumlah	808	

Sumber : BPS kota padang, 2009.

Usaha diatas merupakan usaha yang menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di Kecamatan Nanggalo khususnya Kelurahan Gurun Lawas Kota Padang disamping menjadi tukang ojek becak dan sopir angkot, dll.

Dalam mengusahakan produksi tani mereka mengalami kendala terhadap permodalan yang mana modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting untuk tumbuh kembang usaha selain pupuk dll.

Oleh sebab itu petani yang tergabung dalam kelompok tani membuat suatu gabungan kelompok tani agar diharapkan nantinya kelompok tani tersebut dapat berperan besar dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam berusaha tani namun itu saja tidak cukup membantu mereka. Mereka masih membutuhkan lembaga- lembaga yang ditumbuhkembangkan dalam hal permodalan agar upaya persoalan keuangan tadi dapat teratasi.

4.1.4. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Gurun Lawas dapat dikatakan memadai, seperti adanya jalan raya. Untuk menunjang kelancaran hubungan tersebut didukung oleh sarana transportasi darat seperti mobil angkutan dan ojek. Disamping itu, di Kelurahan gurun lawas ini terdapat 1 buah Bank Umum (BRI) dan 1 buah Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan ini ditujukan untuk membantu masyarakat Kelurahan gurun lawas dalam hal pembiayaan dan menyimpan dana mereka. Namun sejauh ini, lembaga-lembaga keuangan yang ada tersebut belum mendapat sambutan baik dari masyarakat di daerah tersebut, hal ini disebabkan oleh prosedur peminjaman dan menabung yang dianggap masyarakat masih berat. Sebagai contoh, adanya persyaratan agunan pada BRI atau untuk meminjam modal dikoperasi membutuhkan waktu yang lama.

Potensi LKM-A yang dimiliki oleh Gapoktan Harapan Jaya cukup baik dengan peluang bantuan modal yang lebih terpenuhi, membuat 72 orang petani yang ada di Kelurahan gurun lawas mau bergabung dalam Gapoktan Harapan Jaya. Petani-petani anggota inilah nantinya yang berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan modal dari LKM-A Masra.

Usaha ekonomi yang diusahakan oleh anggota LKM-A (Masra) Gapoktan Harapana Jayaa dalam sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan tujuan digulirkannya dana PUAP, yaitu untuk membantu petani diperdesaan yang kurang mampu terhadap akses modal untuk usahatani. Usaha-usaha itu

mencakup usaha tani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, industri rumah tangga pertanian dan pemasaran hasil pertanian.

4.2. Karakteristik Responden Anggota LKM-A Masra

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai karakteristik Responden anggota LKM-A Masra pada Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6. Karakteristik Responden Anggota LKM-A Masra

No	Keterangan	Kategori Responden						Total Orang/ %	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet		Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Umur(tahun)								
	23-36	9	37,5	3	21,4	3	21,4	15	28,8
	37-46	7	29,2	5	35,7	3	21,4	15	28,8
	47-71	8	33,3	6	42,9	8	33,2	22	42,4
	total	24	100	14	100	14	100	52	100
2	Jenis Kelamin								
	Laki-laki	13	54,2	7	50	10	71,4	30	57,7
	Perempuan	11	45,8	7	50	4	28,6	22	42,3
	total	24	100	14	100	14	100	52	100
3	Tingkat Pendidikan								
	SD	7	29,2	4	28,6	7	50,0	18	34,6
	SLTP	2	8,3	2	14,3	4	28,4	8	15,4
	SLTA	11	45,8	8	57,1	2	14,4	21	40,4
	PT	4	16,7	-	-	1	7,2	5	9,6
	total	24	100	14	100	14	100	52	100
4	Pekerjaan								
	Petani	12	50,0	11	78,6	10	71,4	33	63,5
	Beternak	7	29,2	1	7,1	1	7,2	9	17,3
	Wiraswasta	5	20,8	2	14,3	3	21,4	10	19,2
	total	24	100	14	100	14	100	52	100
5	Jumlah Tanggungan (oang)								
	1-3	13	54,2	7	50,0	5	35,7	25	48,1
	4-6	10	41,6	6	42,8	6	42,8	22	42,3
	>6	1	4,2	1	7,1	3	21,5	5	9,6
	total	24	100	14	100	14	100	52	100
	Usaha Utama								
	1. Budidaya(on-farm)								
	1.1 tanaman pangan	9	37,5	1	71,5	10	71,4	29	55,7
1.2 hortikultura	2	8,3	0	7,1	-	-	3	5,8	
1.3 peternakan	7	29,2	1	7,1	1	7,1	9	17,3	
2. Non budidaya(of-farm)			1						
2.3 usaha lain berbasis pertanian	6	25,0		14,3	3	21,5	11	21,2	
	total	24	100	14	100	14	100	52	100

Sumber: LKM-A Masra , 2010

Tabel 6 diatas merupakan jumlah anggota responden yang ada pada strata lancar, kurang lancar dan macet pada LKM-A Masra, berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa antara strata lancar, strata kurang lancar serta macet tidak terdapat perbedaan yang mencolok pada keadaan anggotanya. Sebagian besar anggota LKM-A yang menerima kredit pada setiap strata tersebut adalah laki-laki, hal ini merupakan kondisi dan keadaan sosial masyarakat pada lokasi penelitian dimana laki-laki masih memegang perananan penting dalam perekonomian rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas tingkat pendidikan responden strata lancar adalah bervariasi mulai dari SMU, SD dan Perguruan tinggi yang terakhir adalah SMP, sedangkan pada strata kurang lancar dan macet mayoritas tingkat pendidikan responden adalah sekolah dasar (SD) dan yang juga sekaligus SMP. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ternyata pendidikan mempengaruhi pola seseorang, hal ini sesuai dengan penelitian Mustika (2000) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan membawa pengaruh yang nyata terhadap kelancaran pengembalian kredit, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat kelancaran pengembalian kredit juga tinggi, tingkat pendidikan pada umumnya tercermin dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang biasanya lebih berdisiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Kaitannya dengan pengembalian pembiayaan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan semakin berdisiplin dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan dan wawasannya semakin bertambah sehingga akan mendukung kemampuan mengelola usaha dengan baik.

Jumlah responden pada masing-masing strata mayoritas berumur 47-71 tahun dan mayoritas pekerjaan responden pada setiap strata adalah sebagai petani. Dalam hal jumlah tanggungan mayoritas Responden pada masing-masing strata memiliki tanggungan 2-6 orang. Menurut Sugiharjo (2002) jumlah tanggungan keluarga mempunyai sedikit pengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan untuk jenis usaha yang dilaksanakan oleh anggota, sebagian anggota mempunyai usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan namun sebagian besar juga berjualan di rumah mereka seperti berjualan lontong, goreng dll.

4.3. Gambaran Umum dan Profil Gapoktan Harapan Jaya

Gapoktan Harapan Jaya merupakan salah satu Gabungan Kelompok Tani yang berada di daerah Kota Padang bertempat di jalan gurun lawas no.12Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo yang terbentuk untuk memperkuat posisi tawar petani terutama dalam hal perekonomiannya. Gapoktan Harapan Jaya terbentuk pada tanggal 24 Januari 2008 bertempat di Kantor Lurah Kelurahan Gurun Lawas Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

4.3.1. Sejarah Terbentuknya Gapoktan Harapan Jaya dengan LKM-A nya Masra

Terbentuknya Gapoktan dilatarbelakangi pada saat terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi pada tahun 2007. Kios resmi penyalur pupuk subsidi hanya mampu memberi jatah pupuk pada setiap kelurahan sebanyak 4 ton tiap bulannya. Pada saat itu di Kelurahan gurun lawas terdapat 3 kelompok tani antara lain : 1) Kelompok Tani Tabek Dorom, 2) Kelompok Tani Sumber Harapan, dan 3) Kelompok Nan Sepakat, Setiap kelompok tani ini membutuhkan pupuk tiap musim tanam padi sawah rata-rata sebanyak 150 Kg untuk 1 Ha sawah.

Melihat masalah kelangkaan pupuk diatas maka Kelompok Tani Tabek Dorom, Sumber Harapan dan Nan Sepakat membuat kesepakatan agar membagi secara rata pupuk bersubsidi tadi dengan kesepakatan masing-masing anggota dengan kelompok tani mereka. Namun hal tersebut tidak mampu mengatasi masalah tersebut, sementara bantuan dari pemerintah yang diharapkan tidak akan dapat tersalurkan dan dinikmati apabila petani-petani yang tersebar dalam kelompok tani tidak membentuk suatu gabungan kelompok tani.

Maka dengan melihat dan menimbang masalah tersebut maka dibentuklah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang diberi nama Harapan Jaya yang berarti harapan dari petani- petani yang tergabung agar gapoktan tersebut mampu tumbuh kembang dan jaya bagi anggotanya sesuai tujuan yang diharapkan agar mampu memberi solusi pada setiap permasalahan petani terhadap usaha taninya serta mampu meningkatkan posisi tawar petani dalam mendapatkan bantuan hukum dan pemerintah.

Keberadaan Gapoktan Harapan Jaya juga sangat dibutuhkan peranannya untuk menjadi organisasi yang kuat dan mandiri serta diharapkan dapat mewujudkan petani sebagai pengusaha tani karena gapoktan merupakan kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi, unit penyediaan sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan hasil dan pemasaran serta permodalan.

Keberadaan suatu lembaga dalam mengelola dana bantuan pemerintah sangat dibutuhkan oleh gapoktan karena gapoktan dirasa tidak mampu dan tidak efektif apabila mengelola dana karena banyaknya unit pelaksana yang bekerja serta kewenangan fungsi kepengurusan tidak mampu mengelola dana maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah lama memikirkan masalah ini oleh sebab itu setiap gapoktan yang ada di provinsi sumatera barat haruslah membentuk suatu lembaga keuangan yang tidak boleh dipisahkan dari gapoktan yang merupakan payung dari setiap unit usaha anggota, maka dibentuklah Lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) yang diberi nama LKM-A Masra.

Dalam AD/ART Gapoktan Harapan Jaya (2008), Gapoktan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya serta dapat mengembangkan agribisnis dan menjadikan organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Dengan tugas Gapoktan sebagai berikut:

- a) Mengelola potensi pertanian yang ada di wilayah kerjanya sehingga dapat dimanfaatkan oleh anggota secara tepat guna dan berhasil guna memenuhi kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya dengan memperhatikan unsur pemerataan sesama petani.
- b) Membimbing petani dalam usaha pembangunan pertanian dan peningkatan produksi pertanian di wilayah kerja.
- c) Menentukan dan mengatur uraian dari para anggota, berupa uang hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan pertanian serta usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.
- d) Membimbing dan mengawasi para anggota agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pertanian yang dikeluarkan pemerintah pusat, daerah dan perkumpulan sendiri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka gapoktan Harapan Jaya melakukan :

1. Mendayagunakan seluruh potensi pertanian yang ada dalam Kelurahan Gurun Laweh.
2. Memecahkan masalah- masalah yang dihadapi petani secara langsung atau tidak langsung seperti.
 - 2.1 Pola tanam dan tata tanam.
 - 2.2 Sarana produksi seperti : pupuk, pestisida dan lain- lain.
3. Meningkatkan keterampilan petani di bidang pengelolaan usaha pertanian, berorganisasi dan usaha ekonomi.

Pendapatan-pendapatan Gapoktan Harapan Jaya terdiri dari :

1. Simpanan Wajib
2. Simpanan Pokok
3. Simpanan Sukarela
4. Usaha Gapoktan
5. Bantuan dari pemerintah
6. Pendapatan lain yang syah dan halal, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Gapoktan Harapan Jaya.

4.3.2. Organisasi

Struktur organisasi dari Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Harapan Jaya adalah terdiri dari kepengurusan dan anggota Gapoktan Harapan Jaya yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengurus Gapoktan Harapan Jaya

Gapoktan Harapan Jaya dipimpin dan diurus oleh Badan Pengurus yang ditetapkan pada Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam gapoktan. Badan pengurus terdiri dari 3 (tiga) orang anggota atau lebih diantaranya :seorang Ketua atau lebih, seorang sekretaris atau lebih, dan seorang bendahara atau lebih.

Untuk menjadi pengurus syarat-syarat yang harus dipenuhiantara lain :

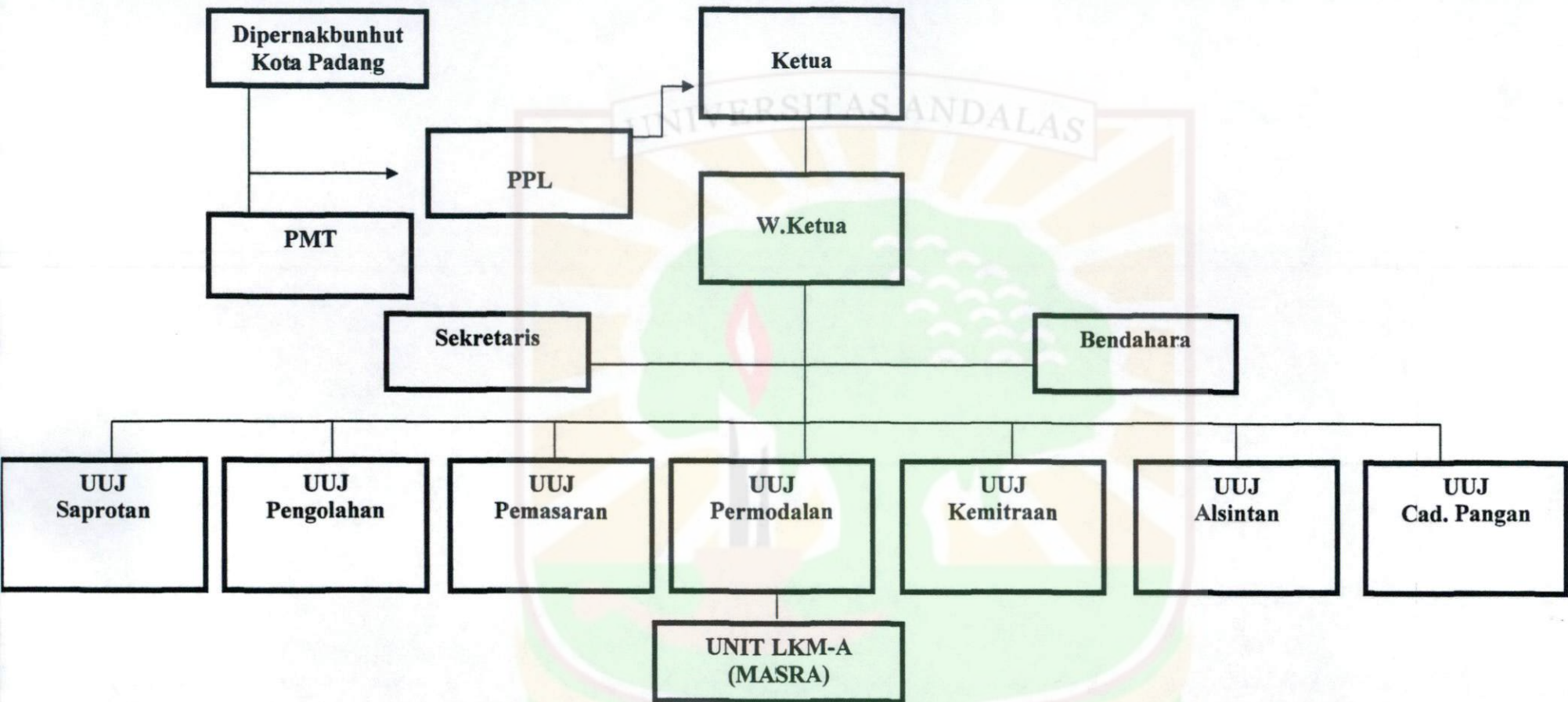
- a. Dipilih oleh anggota dalam rapat anggota/yang disyahkan oleh pencetus dan pendiri Gapoktan

- b. Telah menjadi anggota Kelompok Tani sekurang-kurangnya 5 tahun
- c. Minimal berusia 20 tahun(kawin)
- d. Aktif tulis baca, bisa memimpin rapat anggota
- e. Berpenghasilan dalam usaha pribadinya.

Anggota Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh Rapat Anggota. Ketua dan Sekretaris merupakan pengurus harian dan wajib melaksanakan segala keputusan dan kebijaksanaan badan pengurus serta menjalankan tugas dan kewajiban badan pengurus sehari-hari. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya
- c. Diberhentikan jabatannya menurut keputusan rapat anggota karena masa jabatannya habis atau karena perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan AD/ART Gapoktan.





Gambar 3. Susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "Harapan Jaya" Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo

Dari Gambar 3 di atas, dapat dilihat bahwa Penyuluh Pendamping yang dibawahi oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang melakukan penyuluhan kepada Gapoktan dan membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan pelaksanaan PUAP dan menerima data perkembangan Gapoktan dari Ketua Gapoktan. Penyelia Mitra Tani (PMT) menerima laporan dari penyuluh pendamping tentang penyaluran dana BLM-PUAP, perkembangan kegiatan usaha agribisnis dan permasalahan Gapoktan serta melakukan supervisi dan advokasi kepada penyuluh pendamping dan gapoktan tentang pembentukan unit usaha otonom. Selanjutnya ketua bersama Pengurus menginformasikan kepada anggota lainnya perkembangan dana PUAP dan jadwal penarikan dana PUAP.

Tugas dan wewenang dari masing-masing pengurus tersebut dalam juknis PUAP adalah sebagai berikut :

1. Penyuluh pendamping, ditunjuk untuk mendampingi petani atau kelompok tani dalam rangka pemberdayaan petani atau kelompok tani dalam melaksanakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) memiliki tugas :
 - a) Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha
 - b) Membantu memecahkan permasalahan usaha petani atau kelompok tani, serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan
 - c) Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa.
 - d) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar.
 - e) Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP
 - f) Membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP
2. PMT (Penyelia Mitra Tani), memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian melakukan :

- a) Supervisi dan advokasi kepada penyuluh pendamping dan Gapoktan;
- b) Melaksanakan pertemuan reguler dengan penyuluh pendamping dan Gapoktan;
- c) Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya;
- d) Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP

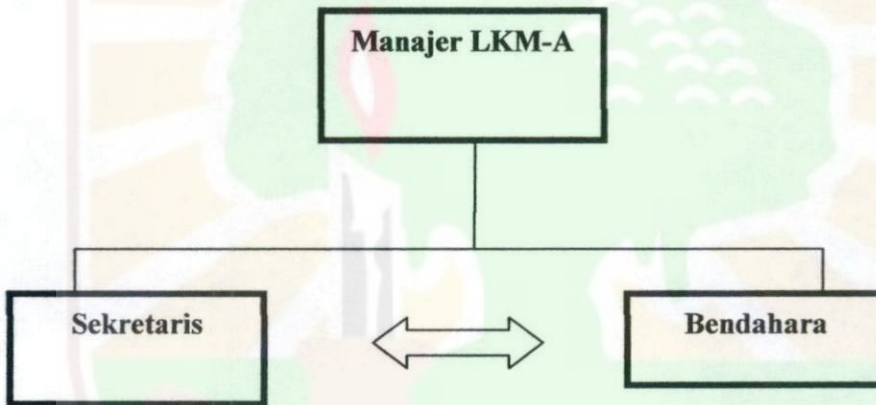
3. Pengurus, masing-masing:

- a) Ketua yang memiliki wewenang untuk memimpin organisasi, membimbing dan mengawasi anggota Gapoktan dalam pelaksanaan AD/ART dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan jalannya kelancaran kegiatan Gapoktan Harapan Jaya.
- b) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam bidang kesekretariatan dan administrasi Gapoktan;
- c) Bendahara bertugas untuk menerima, menyampaikan dan mengeluarkan uang Gapoktan sesuai dengan aturan dan ada rekomendasi dari Ketua;
- d) Ketua Unit masing-masing bertugas untuk membantu Ketua Gapoktan dalam mengelola tugas-tugas yang dilimpahkan kepadanya sesuai unit usaha yang ditugaskan kepadanya.
- e) Anggota berkewajiban untuk mematuhi aturan dalam kelompok, seperti menghadiri pertemuan kelompok, membayar iuran wajib, pokok, dan iuran lainnya yang telah ditetapkan pada rapat anggota. Anggota juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama sesuai ketentuan yang disepakati di Gapoktan Harapan Jaya

Dari ketentuan yang telah dijelaskan oleh Juknis Puap 2009 di atas maka yang terjadi di lapangan menurut Ketua Gapoktan banyak dari fungsi-fungsi tersebut yang belum di jalankan ataupun masih belum optimalnya kinerja dari tiap pengurus gapoktan dalam hal ini adalah Ketua kelompok tani yang berfungsi sebagai orang yang berperan dalam persetujuan pinjaman dan juga sebagai pengawas dan kontrol apabila terjadi penunggakan.

4.3.2.1. Profil LKM-A Masra

- 1) Nama LKM-A : MASRA
- 2) Tanggal berdiri : 10 juni 2009
- 3) Jumlah anggota : 52 orang
- 4) Jumlah pengurus : 2 orang
 - 1 Manajer
 - 1 Sekretaris (sekaligus bendahara)
- 5) Jenis usaha : Padi Sawah, Holtikultura, Peternakan Dan Usaha Lain Berbasis Pertanian.
- 6) Bidang : Permodalan
- 7) Struktur Organisasi



Gambar 4. Susunan pengurus LKM-A Masra

Ket: \longleftrightarrow penggantian peran

Pada gambar 4, dapat dilihat terjadi penggantian peran dari sekretaris dan bendahara yaitu satu orang yang sama dalam pengurusan LKM-A, menurut PMT Kota Padang dualisme peran sebaiknya tidak boleh terjadi karena akan membawa efek dan pengaruh dalam pencatatan pembukuan dan laporan keuangan serta peluang terjadinya korupsi akan semakin besar, namun karena alasan terbatasnya SDM yang handal dalam hal pembukuan dan pembuatan laporan maka dipilihlah Mayarni yang juga sekaligus berprofesi sebagai kepala *julo-julo* (arisan) dan juga berpengalaman membuat pembukuan karena aktif di kader-kader pemerintahan setempat, pada LKM-A Masra ini setiap peminjaman atau pencairan dana dari

rekening untuk keperluan anggota yang meminjam harus mendapat persetujuan berupa tanda tangan dari pengurus harus diketahui kedua belah pihak serta PPL dan Ketua Gapoktan sehingga peluang manipulasi sangat tipis terjadi.

Namun Seharusnya menurut Pedum PUAP 2009, sistem kepengurusan LKM-A terdiri dari 1 manajer dan selebihnya adalah anggota yang terdiri dari berbagai divisi yaitu: divisi/kasi yaitu kasi pembiayaan, ADM dan keuangan, penggalangan dana, dan pembinaan anggota. Namun pada LKM-A Masra pengurus LKM-A hanya ditunjuk untuk 2 orang pengurus saja yang dapat dilihat pada (Lampiran 8).

4.3.3. Permodalan

Sumber modal yang di dapat oleh Gapoktan Harapan Jaya berasal dari modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela atau bulanan. Serta dari bantuan pemerintah yang terealisasi pada berbagai program yaitu program LDPM LUEP (Lumbung usaha ekonomi pedesaan) serta Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) itu sendiri pada waktu yang bersamaan.

Sampai saat ini belum ada donatur ataupun pihak swasta yang memberikan bantuan ataupun sumbangan dalam bentuk uang ataupun barang . Hal ini seharusnya di perhatikan karena untuk mengelola lembaga keuangan yang baik bukan dilihat dari sisitematika kepengurusannya saja tapi juga dari ketersediaan modal itu sendiri hal ini mampu mendorong terbukanya peluang bagi peminjam dalam mengembangkan usaha taninya, apabila persediaan modal mencukupi maka tidaklah sulit bagi anggota dalam memanfaatkan pinjaman apabila pinjaman yang sebelumnya telah dilunasi, namun dalam waktu yang sama mereka juga butuh modal yang cukup namun mereka harus menunggu terlebih dahulu karena peminjam yang lainnya belum mengembalikan dana pinjaman ke LKM-A, hal ini menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi peminjam karena proses perguliran dana tersebut terkendala oleh peminjam yang macet ataupun menunggak dalam hal pembayaran.

4.3.4. Keanggotaan

Gapoktan Harapan Jaya terdiri dari 3 kelompok tani yang terletak di Kelurahan Gurun Lawas dengan jumlah anggota sebanyak 72 orang. Untuk

menjadi anggota gapoktan sesuai dengan yang tertuang dalam AD/ART Gapoktan Harapan Jaya (2008), maka syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni : 1) Sesama usaha/kegiatan jasa, 2) Petani penyewa tanah umum/ tanah perorangan, 3) Badan pengurus dari suatu usaha pertanian atau wakil dari instansi yang memanfaatkan potensi pertanian Kelurahan Gurun Laweh.

Usaha utama dari anggota Gapoktan ini adalah usahatani padi sawah. Nama kelompok tani yang tergabung dalam keanggotaan Gapoktan Harapan Jaya beserta lokasi, jumlah anggota, dan jenis usaha sebagaimana terlihat dalam tabel 7 dan tabel 8 berikut ini:

Tabel 7. Rincian Anggota Gapoktan Harapan Jaya.

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota (orang)	Luas Areal Usaha Tani Padi (Ha)
1	Tabek dorom	Mukhlis	21	7,5
2	Sumber harapan	Ramli RB	26	6,0
3	Nan sepakat	Andan	25	9,5
	Jumlah		72	23,0

Sumber: Profil Gapoktan Harapan Jaya, 2008

4.3.5. Usaha, Produk Dan Perkembangannya

Untuk melihat keadaan usaha, produk dan perkembangannya dapat dilihat pada Rincian Usaha Anggota(RUA),Rincian Usaha Bersama(RUB) dan Rincian Usaha Kelompok (RUK) yang merupakan dasar penentuan kelayakan gapoktan sebagai penerima dana BLM-PUAP.

Pada profil Gapoktan 2009 menjelaskan bahwasannya anggota haruslah membuat suatu rincian usaha anggota yang berdasarkan pada kebutuhan dan luas lahan anggota yang dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Rincian Usaha Anggota Gapoktan Harapan Jaya

Usaha	Orang
Tanaman Pangan	16
Hortikultura	8
Peternakan	15
Industri Rumah Tangga	1
Pemasaran Hasil Pertanian	1
Usaha Lain Berbasis Pertanian	1
Jumlah	42

Sumber: Rencana usaha kelompok LKM-A Masra, 2009

Dari Tabel 8, rencana usaha anggota yang tergambar dari jumlah penerima yang terdaftar dalam RUK berjumlah 42 orang berbeda dengan nama anggota peminjam yang terdaftar pada LKM-A yang dapat dilihat pada (Lampiran 5) berjumlah 52 orang, menurut pengurus petani masing- masing diberikan formulir RUA yang diisi berdasarkan jenis usaha dan volume usahanya tidak ditentukan berapa volume usahanya karena ini hanya sebagai syarat ketentuan agar dana dapat cair pada rekening gapoktan, maka setiap kelompok tani masing-masing dianjurkan oleh PPL untuk membuat RUK pada kelompok tani tabek dorom sumber harapan dan nan sepakat masing-masingnya dibagi 3 dari 100 juta.

Maka pengambilan jumlah anggota yang dibatasi hingga cukup menjadi Rp. 100 juta berjumlah 42 orang. Setelah dana cair ke rekening gapoktan maka syarat dan ketentuan pinjaman tidak memakai RUA sehingga anggota yang ikut dan mau meminjam pada LKM-A pada saat itu berjumlah 52 orang. Setelah memenuhi persyaratan sebagai anggota yang telah ditetapkan oleh pengurus awal Gapoktan, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seluruh anggota juga dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan seperti pelayanan jasa dalam penyimpanan dan peminjaman dana.

1. Kegiatan dan Usaha Anggota Gapoktan

Gapoktan Harapan Jaya memiliki Rencana Kerja Jangka Pendek sebagai berikut :

1. Pertemuan pengurus dan unit- unit usaha 1x sebulan pada hari minggu dalam minggu ke III.
2. Pengadaan sarana produksi bagi anggota (bibit, pupuk, pestisida dll).
3. Pemasaran hasil usaha tani dan sayuran.

Sedangkan Rencana Kerja Jangka Panjang Gapoktan Harapan Jaya adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup anggota kelompok
2. Membuat posko gapoktan
3. Menjallin kemitraan dengan pengusaha luar dan bapak angkat.

Dalam pengembangan Gapoktan dan membantu anggotanya, Gapoktan Harapan Jaya melakukan berbagai usaha yang terdiri dari :

1. LKM-A Masra untuk memperkuat permodalan untuk anggota dimana Semua anggota gapoktan menjadi anggota dari LKM-A yang

mempunyai hak dan kewajiban yang sama. namun tidak semua anggota gapoktan ikut meminjam dana pada LKM-A, sekarang hanya 52 orang anggota yang aktif meminjam dana pada LKM-A, LKM-A belum dilengkapi dengan profil dan AD/ART tertulis, karena menurut pengelola keterbatasan waktu dan kemampuan dari tiap pengurus menjadi kendala dibuatnya profil serta RAT yang baru saja dilakukan pada tanggal 16 agustus 2011 oleh LKM-A setelah jalan 2 tahun terbentuknya LKM-A yang menjadi bukti transparansi keuangan LKM-A, dengan dana awal wajib Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) menjadi syarat Adm yang harus di penuhi untuk menjadi anggota LKM-A.

2. Kelembagaan sarana produksi pertanian (saprotran) yang menyediakan pupuk, pestisida dan bibit tanaman untuk anggota kelompok tani.

Kegiatan rutin Unit Usaha Gapoktan yang dikelola Gapoktan Harapan Jaya menurut Profil gapoktan, 2008 kegiatan Gapoktan yang baru belum tampak yang menonjol selain dari kegiatan usaha tani yang ada dalam kelompok yang di gabung.

4.4. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Program BLM-PUAP di LKM-A Masra

4.4.1. Realisasi pencairan dana kepada anggota

Pendanaan PUAP di Gapoktan Harapan Jaya ini dilatarbelakangi oleh kepentingan membantu petani mengatasi alasan masalah permodalan bagi usahatani mereka. Terutama bagi masyarakat petani kategori miskin berkesempatan ikut dalam pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. Untuk kelancaran program PUAP bagi gapoktan yang baru tumbuh, LKM-A merupakan usaha otonom penting yang perlu dibentuk lebih awal.

Maka pada tanggal 10 Juni 2009 Gapoktan Harapan Jaya mendirikan LKM-A guna mengurus dan mengelola keuangan Gapoktan dan diberi nama dengan nama LKM-A Masra. Dimana LKM-A ini dibentuk berdasarkan musyawarah antara anggota gapoktan, tokoh masyarakat, Penyuluh Pendamping dan Tim Teknis PUAP Kota Padang. Dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan keputusan bahwa LKM-A Masra dikelola sendiri oleh pengurus gapoktan dengan mengangkat beberapa orang sebagai pengelolanya.

Tujuan dibentuk LKM-A Masra adalah agar dana modal PUAP dapat dikelola dengan baik dengan memperhatikan penggunaan dana awal untuk bantuan modal bagi para petani yang sudah direncanakan dalam Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan Rencana Usaha Bersama (RUB) sesuai Juknis PUAP 2008.

Pada proses penyaluran dana PUAP dalam Gapoktan Harapan Jaya melalui LKM-A nya Masra, disini peneliti melihat periode penyaluran dana pada tahap I yaitu tahun 2009-2010 dan tahap II tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut :

4.4.1.1. Proses Sosialisasi

Sosialisasi mengenai BLM-PUAP di Gapoktan Harapan Jaya dilakukan pada bulan Agustus 2009 setelah Pengurus Gapoktan Harapan Jaya mengikuti pelatihan mengenai BLM-PUAP yang diadakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang pada bulan Maret 2009. Dalam proses sosialisasi Ketua dan Pengurus Gapoktan Harapan Jaya mengadakan beberapa kali pertemuan dengan seluruh anggota Gapoktan yakni selama bulan Agustus-Januari yang bertujuan untuk memberitahukan tentang adanya bantuan dana PUAP dari pemerintah. Narasumber dari pertemuan tersebut adalah tim dari Sekretariat PUAP Sumbar tingkat Provinsi, yang juga dihadiri oleh PPL dan KCD. Dalam pertemuan itu, Tim PUAP memberikan pengarahan tentang apa itu bantuan PUAP, bagaimana peran PUAP itu bagi anggota kelompok dan bagaimana proses penyaluran dana itu di Gapoktan.

Seiring berjalannya waktu dengan dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam dan memberikan pemahaman serta pengertian yang lebih baik kepada anggota gapoktan, akhirnya mereka setuju untuk mengelola dana PUAP tersebut. Untuk mendapatkan dana PUAP tersebut maka anggota gapoktan bersepakat untuk mengaktakanotarisasikan LKM-A Masra terlebih dahulu agar gapoktan tersebut menjadi lembaga yang resmi dan berbadan hukum.

Setelah sosialisasi awal diberikan untuk sosialisasi selanjutnya yang berisi pelatihan kepada pengurus LKM-A tentang pengelolaan dana dalam LKM-A di Baso Kabupaten Agam pada daftar kehadiran seluruh Gapoktan Kota Padang (Lampiran 9), LKM-A Masra tidak mengirim utusan untuk menghadiri pelatihan, sehingga hal ini juga menjadi salah satu penyebab kelemahan pengurus LKM-A

dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih berkembang tidak hanya berpatokan untuk fungsi simpan pinjam saja tetapi juga memiliki fungsi sosial dan bisnis.

Pada sosialisasi awal tersebut berisi cara gapoktan untuk mendapatkan dana PUAP tersebut. Gapoktan terlebih dahulu harus mengajukan Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB) sebagai syarat agar dana PUAP tersebut dapat cair ke rekening gapoktan untuk mendapatkan dana Rp. 100 juta seperti dalam (Lampiran 10). Untuk itu pelaksanaan pembuatannya perlu dievaluasi terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penyaluran dana PUAP tersebut di Gapoktan Harapan Jaya melalui LKM-A yang dimilikinya. Berikut adalah hasil yang didapatkan selama penelitian :

a. Pembuatan Rencana Usaha Anggota (RUA)

Berdasarkan Juknis PUAP RUA dibuat oleh setiap petani yang akan mengajukan pinjaman PUAP. Isi dari RUA yaitu berupa rincian pinjaman yang diajukan oleh setiap petani yang akan melakukan pinjaman untuk keperluan biaya dalam melaksanakan usahatani. Isi dari RUA itu sendiri yaitu berupa data diri dan alamat petani serta rencana usaha yang akan dilaksanakan oleh petani berupa : jenis usaha, kode usaha, volume usaha, kebutuhan biaya, jadwal pemanfaatan (Lampiran 11).

Dalam pembuatan RUA ini setiap petani dibantu oleh Penyuluh Pendamping agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatannya. Dalam penentuan dasar biaya yang akan diajukan, petani menyesuaikan antara modal yang telah mereka miliki dengan modal yang diperlukan untuk kelanjutan usahatani, sehingga petani mempunyai gambaran berapa biaya yang akan diajukan. Mengenai penggunaan biaya dalam hal ini merupakan keputusan dari kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota agar dana PUAP dapat terbagi rata untuk petani yang akan mengajukan pinjaman.

Setelah RUA selesai dibuat, Penyuluh Pendamping memeriksa kembali RUA yang dibuat petani sebelum dijadikan bahan untuk pembuatan RUK. Apabila masih ada kesalahan atau kekeliruan, RUA tersebut dikembalikan kepada petani bersangkutan untuk di perbaiki. Hasil yang didapatkan dilapangan adalah Berdasarkan keterangan dari PPL, untuk pemilihan peminjaman tidak disesuaikan

dengan RUA yang diajukan oleh anggota tadi karena banyak dari petani mengajukan RUA sampai dengan 30 juta. Maka pengurus LKM-A dan pengurus Gapoktan didampingi PMT Kota Padang dan PPL Nanggalo melakukan rapat dalam lingkup manajemen LKM-A untuk menentukan besar pinjaman yang akan disetujui dalam LKM-A. maka menimbang agar dana dapat dirasakan oleh semua anggota maka semua peserta rapat sepakat untuk menentukan besar pinjaman berkisar antara Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-. Namun rata-ratanya adalah Rp. 1.500.000,- dimana pemberian jumlah kredit ini sebagai salah satu langkah awal dalam melihat karakter anggota dalam pengembalian kredit. Untuk itu RUA dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Perbandingan Pelaksanaan Pembuatan RUA Dengan Pedoman Umum PUAP 2010

No	Indikator	Pedoman Umum/Kebijakan Pengurus	Pelaksanaan	Penilaian
1	Pelaksana	Pembuat RUA adalah petani yang akan mengajukan pinjaman untuk keperluan kelanjutan usahataniannya. Dalam pembuatannya petani didampingi dan dibantu oleh Penyuluh Pendamping	Pada awal pencairan dana ke rekening LKM-A memang ada pembuatan RUA Namun periode tahap I yaitu tahun 2009-2010 Petani peminjam tidak membuat RUA lagi Berdasarkan kebijakan LKM-A dan PPL.	Tidak Sesuai
2	Dasar penentuan Pinjaman yang dibuat petani	Petani menyesuaikan modal yang mereka punya dan lahan yang mereka miliki dengan kebutuhan biaya akan pembelian saprodi	Awalnya memang berdasarkan pedum namun setelah adanya kesepakatan bersama Petani tidak diberikan pinjaman sesuai RUA kebijakan LKM-A adalah memukul rata pemberian pinjaman kepada anggota tanpa memperhitungkan modal sendiri dan lahan karena alasan karakter peminjam yang bermacam-macam.	Tidak Sesuai
3	Penggunaan PUAP	Diputuskan bersama oleh anggota dan pengurus	Setiap aturan dan keputusan diambil atas kesepakatan bersama	Sesuai

Pada tahap I penyaluran dana yaitu tahun 2009-2010 RUA memang dibuat namun hanya untuk mendapatkan dana PUAP saja setelah mendapatkan dana dan masuk kedalam rekening gapoktan, persyaratan tiap anggota yang meminjam agar

membuat RUA ditiadakan lagi dengan alasan banyak petani yang membuat RUA berlebihan, namun setelah diadakan evaluasi di tingkat pusat kepada LKM-A dan sosialisasi maka sistem pengajuan dana tersebut sekarang sudah mulai di lakukan lagi mulai yaitu tahap II awal tahun 2011.

b. Pembuatan Rencana Usaha Kelompok (RUK)

RUK disusun berdasarkan RUA yang telah dibuat oleh petani anggota gapoktan yang mengajukan pinjaman. RUK merupakan gambaran biaya yang diperlukan oleh keseluruhan anggota masing-masing kelompok yang selanjutnya direkap untuk dijadikan Rencana Usaha Kelompok (RUK).

Rincian RUK diajukan oleh kelompok tani kepada pengurus gapoktan meliputi rincian nama petani, usaha produktif, volume usaha dan biaya, nilai biaya (Lampiran 12). Penyusunan RUK dibuat oleh ketua kelompok lalu di periksa oleh penyuluh pendamping dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Penyuluh Pendamping. Dari hasil keseluruhan RUK, gapoktan bisa membuat RUB yang merupakan syarat gapoktan untuk mendapatkan BLM-PUAP.

Di Gapoktan Harapan Jaya, pembuatan RUK sama dengan RUA hanya untuk mendapatkan dana saja, RUK dikerjakan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, dimana Ketua Kelompok mengumpulkan RUA yang telah dibuat oleh petani yang mengajukan pinjaman, setelah RUA terkumpul Ketua merekap RUA dari setiap petani kedalam formulir RUK, dimana isi formulir antara lain : nama petani anggota, jenis usaha kelompok yang dilaksanakan dan biaya yang diperlukan yang sudah diajukan. Selanjutnya ketua kelompok menyerahkan kepada gapoktan yang sebelumnya diperiksa oleh Penyuluh Pendamping dan baru ditanda tangani oleh Ketua Kelompok dan Penyuluh Pendamping.

Secara umum dapat dilihat bahwa, proses pembuatan RUK sudah sesuai dengan Pedum PUAP yang ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Pelaksanaan Pembuatan RUK Dengan Pedum PUAP

No	Indikator	Pedoman Umum	Pelaksanaan	Penilaian
1	Pelaksanaan	Pembuatan RUK dilakukan oleh Ketua masing-masing kelompok tani dan dibantu Penyuluh Pendamping	Awal mendapatkan dana RUK dibuat oleh Ketua Kelompok tani dibantu oleh Penyuluh Pendamping	Sesuai
2	Waktu	RUK dibuat sebelum membuat RUB Gapoktan	RUK dibuat sebelum RUB dibuat	Sesuai
3	Tujuan	RUK dibuat untuk mengumpulkan semua rincian biaya yang diperlukan oleh masing-masing anggota	RUK dibuat untuk rincian pembuatan RUB Gapoktan berdasarkan keperluan setiap anggota	Sesuai
4	Isi	Isi dari RUA dan RUK yaitu biodata petani (RUA) dan biodata Kelompok Tani (RUK), jenis usaha yang dilaksanakan, kode usaha, volume usaha yang dilaksanakan, biaya yang diperlukan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan petani yang membuat RUA	Dalam bentuk formulir RUK yang berisikan Nama kelompok tani dan rincian nama anggota, gambaran usaha yang dilaksanakan dan biaya yang diperlukan untuk kelangsungan usaha tani anggota dari kelompok tani	Sesuai
5	Proses pembuatan RUK	RUK dibuat setelah petani membuat RUA, setelah RUA selesai Ketua kelompok merekap hasil dari RUA untuk membuat RUK, setelah RUK dibuat dilaporkan kepada Penyuluh Pendamping untuk di evaluasi apabila sudah sesuai dengan RUA yang ada, RUK ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Penyuluh Pendamping untuk diajukan ke Gapoktan	Ketua Kelompok membuat RUK berdasarkan RUA yang dibuat petani anggota, setelah direkap dan disalin ke formulir RUK di periksa oleh penyuluh pendamping untuk di evaluasi agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan, setelah di setujui oleh penyuluh pendamping, RUK ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Penyuluh untuk diajukan ke Gapoktan untuk pembuatan RUB	Sesuai
6	Peran Penyuluh Pendamping	Sebagai evaluator dalam pembuatan RUK	Dalam pembuatan RUK, Penyuluh berperan sebagai pengoreksi kerja dari Ketua Kelompok dalam pembuatan RUK, apabila Penyuluh menyatakan kalau RUK tersebut sudah benar, maka RUK bisa diajukan ke gapoktan untuk pembuatan RUB	Sesuai
7	Dasar penentuan pinjaman	Pinjaman yang diajukan kelompok merupakan rekapan dari berapa besar pinjaman yang diajukan oleh anggota	Awal penentuan pinjaman memang berdasarkan seperti pedum PUAP namun setelah mendapatkan dana Penentuan pinjaman tidak berdasarkan pada rekap pinjaman lagi yang diajukan anggota tapi sesuai kesepakatan pengurus yang menetapkan jumlah pinjaman sama	Tidak Sesuai

c. Pembuatan Rencana Usaha Bersama (RUB)

RUB adalah rencana usaha bersama untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. RUB merupakan salah syarat yang harus dipenuhi gapoktan untuk mendapatkan BLM-PUAP.

Didalam Pedum PUAP dinyatakan, RUB dibuat langsung oleh Pengurus Gapoktan. Dimana RUB dibuat setelah Pengurus Gapoktan menerima RUK dari setiap Ketua Kelompok. RUB dibuat berdasarkan kelayakan usaha produktif yang dimiliki oleh gapoktan baik itu usaha budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perternakan) ataupun usaha non budidaya pertanian (industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian ataupun usaha lain berbasis pertanian). Pengurus merekap hasil RUK yang diajukan oleh setiap Ketua Kelompok Tani. Setelah RUB dibuat RUB kembali diperiksa oleh Penyuluh Pendamping untuk dievaluasi agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan gapoktan. Setelah diperiksa oleh Penyuluh, RUB ditandatangani oleh Ketua Gapoktan yang selanjutnya akan dibawa ke Tim Teknis Kota untuk dijadikan pertimbangan bahwa gapoktan dapat menerima BLM-PUAP dari pemerintah.

Di Gapoktan Harapan Jaya, pembuatan RUB langsung dikerjakan oleh Pengurus Gapoktan, dalam hal ini adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dibantu oleh setiap Ketua Kelompok dan anggota agar penggunaan dana yang diajukan jelas penggunaannya dan tidak terjadi kekeliruan. Hasil dari RUK direkap untuk rincian RUB yang akan diajukan. Hasil dari rekapan ditulis kedalam formulir RUB yang antara lain berisi mengenai data gapoktan, nomor rekening tabungan gapoktan, rincian usaha produktif (Volume dan Nilai) lalu tanda tangan oleh Ketua Gapoktan dan Tim Teknis Kota Padang

Peran Penyuluh Pendamping disini adalah kembali sebagai evaluator pembuatan rencana usaha, dan Penyuluh Pendamping juga berperan sebagai jembatan antara Gapoktan dan Tim Teknis Kota. Setelah diperiksa oleh Penyuluh RUB di kembalikan ke gapoktan untuk ditandatangani dan Penyuluh bersama Ketua Gapoktan mengajukan RUB ke Tim Teknis Kota.

Dasar penentuan pinjaman adalah berdasarkan usaha produktif (volume dan nilai) yang diajukan oleh Kelompok Tani. Setelah didapatkan hasilnya,

ternyata RUB yang dibuat oleh anggota sama dengan total RUK yang diajukan oleh tiap kelompok. Dimana didalam RUB dibuat biaya yang diperlukan adalah Rp.100 juta dan biaya yang diperlukandidalam RUK yaitu Rp.100 juta(Lampiran13 (a), (b), (c)).

Untuk pertimbangan kelayakan usaha produktif, gapoktan ini terpilih karena gapoktan ini memiliki luas lahan padi sawah (tanaman pangan) yang cukup luas di Kota Padang, untuk itu gapoktan ini dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan PUAP dari pemerintah. Hasil ini didapatkan dari hasil survey Tim teknis Kota sebelum penentuan Gapoktan yang akan memperoleh bantuan PUAP.

Dari hasil yang didapatkan diatas, terlihat bahwa sebagian besar pelaksanaan pembuatan RUB sudah sesuai dengan pedoman umum yang ada. Dengan demikian dapat dilihat alur kerja antara RUA, RUK dan RUB di gapoktan. RUA sangat berpengaruh untuk pembuatan RUK, karena RUA merupakan rincian pinjaman yang dibuat oleh setiap petani anggota. Sedangkan RUK sangat berpengaruh terhadap RUB karena RUK merupakan rekapan dari RUA yang telah disatukan hingga menjadi RUK. Dan terbentuklah RUB yang rinciannya merupakan dari RUA dan RUK yang telah dibuat oleh petani, rincian RUB merupakan rincian biaya yang diperlukan oleh gapoktan. Namun pembuatan RUA hanya dibuat untuk mendapatkan dana saja, setelah di evaluasi maka pembuatan RUA sebagai syarat pengajuan pinjaman kembali di aktifkan lagi.

Dari segi waktu sudah sesuai urutan masing-masing jadwal pembuatan, dimana RUA dibuat untuk pembuatan RUK, dan RUB dibuat setelah RUK dan RUA dibuat. Dari tujuan masing-masing rencana mempunyai tujuan untuk merincikan biaya yang diperlukan anggota, kelompok tani dan gapoktan untuk kelangsungan usahatani.

Setelah Gapoktan Harapan Jaya mengajukan RUB dan disetujui Tim Teknis Kota maka pada tanggal 20 November 2009 dana PUAP masuk kedalam rekening Gapoktan Harapan Jaya. Namun dana tersebut belum dapat dicairkan kepada anggota gapoktan karena dana tersebut akan dicairkan kepada LKM-A terlebih dahulu karena LKM-A lah yang akan mengelola dan menyalurkan dana PUAP tersebut kepada anggota dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Akhirnya pada bulan Januari 2010 dana PUAP dapat dicairkan

kepada LKM-A Masra dimana sebelumnya LKM-A tersebut telah mengajukan RUB terlebih dahulu kepada gapoktan (Lampiran 14).

Dari proses pembuatan RUA, RUK dan RUB yang dijalankan oleh anggota LKM-A Masra telah dilaksanakan keseluruhan prosesnya berdasarkan Petunjuk Teknis dan Pedoman Umum PUAP yang ada pada tiap Gapoktan namun belum keseluruhannya dijalankan, Jumlah pinjaman yang dipukul rata dijadikan strategi sendiri bagi pengurus dalam menentukan watak dan karakter anggota untuk pinjaman berikutnya dapat diantisipasi, Sehingga jumlah pinjaman tidak mempengaruhi dalam kelancaran pengembalian kredit. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Handayani, (2010) bahwa jumlah pinjaman tidak menjadi patokan bahwa kredit akan dikembalikan tepat waktu.

Menurut Horizon (2006), perlu ada pembinaan yang intensif bagi pengaksesan kredit serta sosialisasi. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak dan dinas terkait untuk menyosialisasikan mekanisme penyaluran kredit dan melakukan bimbingan terhadap nasabah. Hal ini bertujuan agar kredit yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan untuk konsumtif.

4.4.1.2. Proses Seleksi

Petani anggota gapoktan yang akan meminjam di LKM-A harus menjadi anggota LKM-A Masra terlebih dahulu. Dari hasil musyawarah ditetapkan keputusan mengenai persyaratan untuk dapat menjadi anggota LKM-A Masra. Dimana syarat yang harus dipenuhi pada tahap I penyaluran dana tahun 2009 - 2010 adalah :

1. Membayar Simpanan Pokok Rp.100.000,-
2. Simpanan Wajib sebesar Rp. 5000,- per bulan

Setelah memenuhi persyaratan tersebut maka anggota gapoktan telah resmi menjadi anggota LKM-A dan untuk dapat melakukan pinjaman anggota tersebut juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam memperoleh pinjaman di LKM-A Masra, prosedur dan persyaratan yang ditetapkan sangat mudah dan ringan, sehingga tidak terlalu membebani masyarakat petani. Persyaratan umum yang diajukan LKM-A Masradan harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai anggota LKM-A Masra
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan pasfoto 3x4 sebanyak 1 lembar
3. Mengisi Surat Persetujuan
4. Mengisi Surat Permohonan Pembiayaan

Persyaratan tahap II perguliran dana mulai pada awal tahun 2011 sama pada tahap I hanya pada syarat yang harus dipenuhi pada tahap II ditambahkan lagi simpanan pokok Rp 100.000 untuk uang administrasi dan inventaris. Selebihnya persyaratan yang diajukan sama dengan yang tahap I dan ditambahkan mengisi surat rekomendasi dan surat keterangan bahwasannya peminjam sebelumnya tidak macet dalam lembaga permodalan manapun dan surat tersebut diketahui oleh ketua gapoktan dan lurah setempat.

RUA seharusnya dibuat oleh setiap petani yang akan mengajukan pinjaman PUAP. Isi dari RUA yaitu berupa rincian pinjaman yang diajukan oleh setiap petani tentang keperluan biaya usahatani, berupa data diri dan alamat petani serta rencana usaha yang akan dilaksanakan: jenis usaha, kode usaha, volume usaha, kebutuhan biaya, jadwal pemanfaatan. Dalam penentuan dasar biaya yang akan diajukan, petani menyesuaikan antara modal yang telah mereka miliki dengan modal yang diperlukan untuk kelanjutan usahatani, sehingga petani mempunyai gambaran berapa biaya yang akan diajukan.

Seperti yang di jelaskan diatas RUA tidak dijadikan sebagai ketentuan pinjaman bagi anggota pada LKM-A Masra pada periode I, pada tahap I dan II syarat pinjaman diberlakukan Surat Rekomendasi tertera tanda tangan pinjaman, Ketua Gapoktan, dan Ketua Kelompok Tani bersangkutan yang merekomendasikan peminjam untuk melakukan pinjaman (Lampiran 15), sedangkan didalam Surat Persetujuan tertera tanda tangan pihak keluarga misalnya suami/istri/anak/saudara peminjam sebagai bukti persetujuan untuk mengajukan pinjaman di LKM-A, juga ditanda tangani oleh peminjam dan Ketua LKM-A (Lampiran 16) dan untuk surat pengakuan hutang terdapat tanda tangan peminjam dan penanggung jawab pinjaman. Didalam surat ini terdapat biodata pribadi, data usaha, bantuan, kesanggupan mengangsur dan sumber pelunasan pinjaman oleh peminjam (Lampiran 17).

Semua anggota LKM-A mempunyai hak yang sama untuk melakukan pinjaman pada LKM-A, namun dalam pendistribusian pinjaman tersebut lebih didahulukan kepada anggota yang sangat memerlukannya. Untuk besarnya jumlah uang yang dipinjamkan tergantung hasil keputusan LKM-A Masrayang menyamaratakan jumlah pinjaman sebanyak Rp.1.500.000 untuk meratakan pinjaman agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota LKM-A dan terutama sekali adalah untuk melihat dan menganalisa watak dan karakter peminjam untuk penyaluran tahap II. Lemahnya analisa yang terjadi pada aspek penggunaan kredit oleh anggota dimana pihak LKM-A kurang menganalisa lebih jauh usaha yang sedang dilaksanakan oleh anggota. Penyimpangan penggunaan kredit tersebut mengakibatkan modal yang dipinjam tidak berkembang sehingga terjadi kemacetan dalam pembayaran cicilan kredit oleh anggota. Menurut Kasmir (2002) kelemahan dari pihak pemberi kredit sering terjadi, karena dalam melakukan analisis kredit pihak yang menganalisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak terprediksi sebelumnya.

4.4.1.3. Proses Pencairan dan Penyaluran Dana

Setelah semua persyaratan yang diajukan LKM-A Masra dipenuhi maka peminjaman dapat dilakukan pada LKM-A. Proses pengajuan pinjaman sampai kredit disetujui dan dicairkan membutuhkan waktu yang bervariasi untuk setiap petani anggota LKM-A, yaitu berkisar antara 7-30 hari, pemberian waktu ini dipergunakan oleh pihak LKM-A Masra untuk mensurvei usaha, pendapatan, dan pengeluaran yang telah dituliskan dalam blanko permohonan. Selain itu pemberian waktu ini juga tergantung pada ketersediaan dana di LKM-A. Bila dana tersedia cukup dan persyaratan anggota peminjam cukup dan tidak bermasalah maka dana pinjaman bisa cair dalam waktu 7 hari saja. Namun, jika dana tidak tersedia meskipun syarat-syarat anggota peminjam cukup dana pinjaman belum bisa dicairkan dan harus menunggu sampai dana tersebut tersedia, biasanya membutuhkan waktu sekitar 15-30 hari.

Untuk jangka waktu pengembalian pinjaman berkisar 6-10 bulan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pengelola LKM-A Masra, dimana jangka waktu pengembalian ini juga tergantung jenis usaha dan

besarnya pinjaman. Sedangkan untuk bunga pinjaman ditetapkan oleh LKM-A sebesar 1% dari besarnya pinjaman yang diajukan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dana pinjaman cair yakni :

1. Menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman
2. Menandatangani Kwitansi Pinjaman

Pada periode I didalam surat perjanjian pinjamanakan tertera dengan jelas berapa besarnya pinjaman, besarnya angsuran, jangka waktu pengembalian, besarnya tingkat suku bunga dan besarnya denda yang dikenakan jika terjadi keterlambatan pengembalian angsuran pinjaman setelah jatuh tempo, Sedangkan untuk kwitansi pinjamanakan diberikan pengurus kepada peminjam sebagai bukti bahwa peminjam telah menerima uang pinjaman dari LKM-A.

Pencairan dana PUAP tahap I di Gapoktan Harapan Jaya dilakukan pada Februari 2010 dengan jumlah penerima sebanyak orang 52 orang. Pada awal realisasi pendanaan PUAP di gapoktan ini terdiri dari usaha Tanaman Pangan, Peternakan, Industri Rumah Tangga dan holtikultura dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 54.500.000,-. Usaha yang paling banyak mengajukan pinjaman adalah untuk usaha tanaman pangan yakni usahatani padi sawah. Untuk lebih jelas lihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Awal Penyaluran Dana PUAP Untuk Bulan Februari 2010

No	Usaha Produktif Anggota	Penyaluran	
		Jumlah penerima (orang)	Nilai (Rp.)
1	Tanaman Pangan	29	23.500.000
2	Tanaman Holtikultura	3	4.500.000
3	Peternakan	9	10.500.000
4	Usaha Lain Berbasis Pertanian	11	16.000.000
	Total	52	54.500.000

Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Masra , 2010 (data diolah)

Untuk perkembangan sampai bulan desember serta usaha pembiayaan dengan modal awalnya adalah dana PUAP awalnya digulirkan sebesar Rp. 54.500.000. pada bulan Februari 2010 kepada para anggota malah semakin lama semakin minus (berkurang) dari dana awal Rp 100 juta yang di cairkan sampai akhir bulan desember 2010 sebesar Rp. 89.500.000,- Hal ini terjadi

karenapeminjaman di beberapa bulan nya kosong yaitu pada bulan April – Juni serta oktober dan jumlah penyaluran dana tidak bertambah sehingga menyebabkan tidak ada berputarnya perguliran dana yang hanya terjadi pada bulan november dan desember saja. Ini dikarenakan tanggal waktu jatuh tempo masih ada yang belum melunasi pinjaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Perkembangan Usaha Pembiayaan (Dana PUAP) LKM-A Masra sampai dengan Desember 2010

No.	Bulan/tahun 2010	Dana Yang Dikeluarkan Untuk Pembiayaan (Rp.)	Jumlah Penyaluran Dana (Rp.)
1.	Februari	54.500.000	54.500.000
2.	Maret	19.500.000	74.000.000
3.	April	-	74.000.000
4.	Mei	-	74.000.000
5.	Juni	-	74.000.000
6.	Juli	1.500.000	75.500.000
7.	Agustus	2.000.000	77.500.000
8.	September	2.500.000	80.000.000
9.	Oktober	-	80.000.000
10.	November	2.000.000	82.000.000
11.	Desember	7.500.000	89.500.000

Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Masra 2010 (data diolah)

Masalah kemacetan dalam pengembalian dana ini menjadi hal yang sangat penting untuk diselesaikan karena kondisi ideal dari sebuah lembaga perkreditan adalah kelancaran dalam pengembalian dana. Namun yang terjadi penunggakan pembayaran membuat pengurus memutar otak untuk mengatasi masalah tersebut yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah penagihan yang intensif oleh pengurus dengan penjemputan angsuran tiap hari pada tahap II ini sehingga membuahkan hasil yang cukup baik. Ini terlihat dari rekapitulasi peminjaman dan perkembangan LKM-A Masra periode 2011 (Lampiran 18). Sehingga memperlihatkan bahwa terjadi kemajuan dalam pengembalian dana tahun 2010 sampai 2011 atau tahap I dan tahap II dari anggota terlihat strata kurang lancar 4 orang telah mulai melunasi pinjaman dari 14 anggota, dan strata macet yang awalnya berjumlah 14 orang telah berangsur membayar 2 orang dengan strata lancar bertambah 5 sehingga anggota yang lancar berjumlah 29 orang.

Pada tahap II yaitu bulan Januari 2011 LKM-A Masra dalam penyaluran pinjaman kepada anggota menerapkan sanksi bagi anggota yang macet dalam

pembayaran pengembalian pinjamannya. Hal ini diterapkan karena untuk kelancaran arus kas pada LKM-A sehingga dana yang dihimpun tersebut mampu mencukupi kebutuhan anggota secara merata. Selain itu dikuatirkan apabila kredit macet dalam jumlah banyak menyebabkan LKM-A kekosongan kas, sehingga mengakibatkan keluhan bagi anggota yang akan meminjam selanjutnya. Sehingga LKM-A sangat berhati-hati dalam melakukan pembiayaan pinjaman.

4.4.1.4. Besarnya Kredit yang Diberikan Kepada Anggota

Pada LKM-A Masra besarnya kredit yang diberikan pada peminjam rata-rata berkisar antara Rp. 1.000.000–Rp. 1.500.000 pada tahap penyaluran pertama. Namun rata-rata diberikan adalah Rp. 1.500.000. Setelah pinjaman tersebut lunas atau setidaknya tujuh kali angsuran peminjam bisa mengajukan permohonan pinjaman lagi pada periode penyaluran dana tahap 2 berikutnya, pada penyaluran dana tahap I beberapa orang telah lunas dan mengajukan permintaan lagi dengan pinjaman berkisar antara Rp. 2.000.000,- – Rp. 2.500.000,-. Besar pinjaman yang diperoleh oleh anggota dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Besar Pinjaman Anggota LKM-A Masra dalam Pengembalian Kredit

No	Besar Pinjaman	Kategori Responden						Total	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet			
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml ah	%
1	1.000.000	1	4,2	-	-	14	100	15	28,9
2	1.500.000	23	95,7	14	100	-	-	3	71,1
	Total	24	100	14	100	14	100	52	100

Dapat dilihat besar pinjaman pada periode tahap I tahun 2010 disamaratakan Rp.1.500.000,- tiap orang setelah dilihat apabila peminjam tersebut sudah melunasi pinjaman sebelum waktu jatuh tempo maka peminjam dapat meminjam kembali apabila masih ada persediaan kas LKM-A. Adapun 1 orang yang meminjam dana sebesar Rp. 1.000.000,- dikarenakan oleh keinginan peminjam sendiri yang takut meminjam dana lebih banyak dari pada yang di butuhkan karena ketakutan sulit membayar.

Pada periode II Tahun 2011 peminjam yang telah masuk kategori lancar dapat meminjam dana antara Rp.1.000.000,- - Rp.4.000.000,-, bahkan temuan

dilapangan saat ini ada yang meminjam dana bahkan sampai 10 juta yang merupakan pemilik heller, di awal pinjaman peminjam termasuk kategori lancar dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pengurus LKM-A, sehingga pengurus percaya kepada peminjam karena peminjam menawarkan untuk menyita BPKB mobil peminjam tersebut kepada LKM-A. Hal ini menjadi sorotan penting karena salah satu tujuan dalam pemberian dana pinjaman kredit ini salah satunya adalah sebagai pemberian bantuan modal usaha kepada petani miskin namun yang terjadi dilapangan bantuan pinjaman yang cukup besar diberikan kepada anggota yang dapat dikatakan mampu dalam keadaan keuangannya, sehingga pemberian kredit BLM-PUAP pada LKM-A Masra ini tidak tepat sasaran karena terjadi nepotisme dalam pemberian pinjaman.

Besar pinjaman pada tahap II perguliran dana tahun 2011 jumlah pinjaman mulai bervariasi di sesuaikan oleh usaha anggota. Perhatikan Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah pinjaman anggota LKM-A Masra tahap II

No	Besar Pinjaman (Rp.)	Peminjam (Orang)
1	1.000.000	1
2	1.500.000	42
3	2.000.000	1
4	2.500.000	-
5	3.000.000	7
6	3.500.000	13
7	4.000.000	1
8	10.000.000	1
	Total	66

Sumber: LKM-A Masra, 2011

Dari data diatas terlihat terjadi peningkatan jumlah pinjaman dari tiap-tiap anggota yang meminjam pada umumnya adalah anggota periode tahap I yang dalam pengembaliannya lancar dapat kembali meminjam dana, menurut manajer LKM-A Fitra hadi, sekarang telah terjadi penambahan anggota LKM-A sebanyak 15 orang yang telah meminjam pada awal tahun 2011, setelah peminjam sebelumnya melunasi pinjaman serta ketersediaan khas dari LKM-A memenuhi untuk di lakukan penyaluran dana tahap II anggota yang ingin meminjam dapat diberikan pinjaman. Pertambahan anggota LKM-A yang dimulai dari tahap I sampai pada tahap II dapat dilihat pada (Lampiran19). Hal ini merupakan suatu

bentuk perguliran dana yang terjadi dalam LKM-A karena dana yang tersedia dapat bergulir dan anggota yang meminjam dana pun bertambah.

4.4.1.5. Besar Bunga Kredit

Untuk jangka waktu pengembalian pinjaman berkisar 6-10 bulan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pengelola LKM-A Masra, dimana jangka waktu pengembalian ini juga tergantung jenis usaha dan besarnya pinjaman. Sedangkan untuk bunga pinjaman ditetapkan oleh LKM-A sebesar 1% dari besarnya pinjaman yang diajukan. Menurut petani responden tingkat suku bunga yang ditetapkan LKM-A Masra tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu memberatkan bahkan tidak adanya persyaratan agunan/jaminan. Hal ini senada dengan pendapat Ashari (2006) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya LKM memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tidak ada persyaratan agunan/jaminan seperti diberlakukan pada perbankan formal. Bahkan dalam beberapa jenis LKM, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM.

Pada periode I didalam Surat Perjanjian Pinjaman akan tertera dengan jelas berapa besarnya pinjaman, besarnya angsuran, jangka waktu pengembalian, besarnya tingkat suku bunga dan besarnya denda yang dikenakan jika terjadi keterlambatan pengembalian angsuran pinjaman setelah jatuh tempo , Sedangkan untuk Kwitansi Pinjaman akan diberikan pengurus kepada peminjam sebagai bukti bahwa si peminjam telah menerima uang pinjaman dari LKM-A.

Pada tahap II tepatnya setelah RAT jangka waktu pengembalian pinjaman diaktifkan kembali dengan pengembalian pinjaman dibayar tiap bulan dan bunga yang tetap sebesar 1%, perbedaannya adalah pada tahap II ini mulai dikenakan denda apabila terlambat denda yang diberikan sebesar 0,25% dari pinjaman tiap bulan. Contoh apabila peminjam meminjam Rp. 2.000.000 maka tiap bulan membayar Rp. 200.000,00 ditambah bunga 1% ditambah dengan simpanan wajib Rp. 5000,00 tiap bulan, maka yang harus dibayar adalah Rp. 225.000 apabila bulan pertama lancar tapi bulan kedua menunggak pada bulan ketiga dibayar maka denda 1 bulan sebesar 0,25% maka peminjam harus membayar pinjaman

ditambah denda yang baru ditetapkan setelah RAT, dengan peminjam membayar Rp. 230.000,00.

4.5. Sistem Pengembalian Kredit

4.5.1. Jangka Waktu Pengembalian Kredit

Untuk jangka waktu pengembalian kredit pada periode I tahun 2009-2010 kebijakan dari masing-masing Pengurus atas keputusan dari anggota LKM-A pengurus menetapkan bahwasannya pengembalian kredit harus dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan terhitung setelah dana cair pada anggota pembayaran tiap bulan yang dilakukan oleh LKM-A ternyata tidak efektif karena peminjam beralasan tidak ada duit pada saat penjemputan bulan berikutnya juga demikian apalagi pengurus tidak memberlakukan sistem denda dan bunga pun sedikit sehingga pengembalian dana tidak berkembang bahkan minus, karena banyak dari anggota bahkan hampir sebagian yang menunggak dan macet dalam pengembalian dana hal tersebut yang dibenahi LKM-A sehingga pada tahap II diputuskan bahwasannya jangka waktu pengembalian dana memiliki jangka waktu yaitu selama satu tahun dengan sepuluh kali angsuran paling lambat 12 bulan. Adapun jangka waktu pengembalian kredit yang ditentukan oleh pengurus adalah jangka pengembalian kredit yang paling cepat 6 bulan dan pengembalian yang paling lama adalah 12 bulan yang artinya diluar jangka waktu jatuh tempo

Berdasarkan hasil wawancara dan data perkembangan dana LKM-A Masra 2011 diperoleh hasil sebagaimana yang terdapat pada Tabel 15 berikut :

Tabel 15. Tingkat Pengembalian Kredit berdasarkan jangka waktu

No	Jangka Waktu	Kategori Responden						Total	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet		Jml	%
		Jml	%	Jml	%	Jml	%		
1	6 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10 bulan	24	100	3	21,4	-	-	27	52
3	11-12 bulan	-	-	-	-	2	14,3	2	3,9
4	Belum melunasi	-	-	11	78,6	12	85,7	23	44,1
Total		24	100	14	100	14	100	52	100

Berdasarkan Tabel 15 merupakan jumlah anggota tiap strata yang telah melunasi pinjaman sesuai jangka waktu yang terlihat pada strata lancar

semua anggota responden memilih jangka waktu pengembalian kredit 10 bulan yaitu strata lancar sebanyak 24 orang atau sebesar 100% dan untuk strata kurang lancar sebagian besar anggota responden memilih jangka waktu pengembalian kredit 10 bulan yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 21,5% sedangkan lebihnya 11 atau sebesar 78,5% belum mengembalikan pinjaman sampai bulan ke-12 yang menurut responden tersebut mereka tidak bisa memastikan kapan bisa mengembalikan pinjaman apabila ada uang maka akan dibayar. Untuk strata macet beberapa anggota responden telah melunasi pinjaman dengan jangka waktu pengembalian kredit 11-12 bulan yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 14,2% dan 12 orang lagi atau sebesar 85,8% lebihnya belum mengembalikan pinjaman dari jangka waktu yang disepakati.

4.5.2. Cara penagihan kredit

Cara pengembalian kredit yang disepakati oleh anggota dengan pengurus pada saat peminjaman adalah anggota langsung mengantarkan angsuran bulanan ke rumah bendahara, tetapi setelah terjadinya kemacetan dalam pembayaran maka cara yang dilakukan adalah pengurus langsung mendatangi rumah anggota yang meminjam.

Penjemputan tiap hari oleh pengurus yang juga berprofesi sebagai kepala *julo-julo* dilakukan sebagai langkah utama mengatasi kemacetan dan penunggakan oleh anggota agar kemacetan dapat berkurang, penagihan langsung kerumah anggota hal ini disebabkan LKM-A tidak mempunyai kantor yang tetap maka pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara menjemput juga mengantarkan langsung kerumah bendahara.

Dari hasil yang didapat pada strata lancar hampir seluruh anggota responden mengantarkan kredit ke rumah Bendahara/Pengurus yaitu sebanyak 19 orang atau sebesar 79,2% selebihnya atau sebanyak 5 orang atau 20,8% lebih memilih untuk diantar langsung, pada strata kurang lancar hampir seluruh anggota responden angsuran kreditnya pengurus yang menjemput kerumah anggota yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 85,7% selebihnya atau sebanyak 2 orang menghantar ke rumah pengurus karena alasan sekalian jalan pergi ke pasar yang melewati rumah pengurus sedangkan pada strata macet hampir seluruh anggota responden angsuran kreditnya pengurus yang menjemput kerumah anggota yaitu

sebanyak 14 orang atau sebesar 100%. Jadi, rata-rata nya semua strata angsuran kredit anggotanya dijemput langsung oleh pengurus LKM-A. Untuk lebih jelas lihat tabel 16.

Tabel 16. Cara Pengembalian Kredit di LKM-A Masra.

No	Cara Pengembalian Kredit	Kategori Responden						Total	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet		Jml	%
		Jml	%	Jml	%	Jml	%		
1	Diantar oleh anggota	5	20,8	2	14,3	=	=	7	13,5
2	Dijemput oleh Pengurus kerumah	19	79,2	12	85,7	14	100	45	86,5
Total		24	100	14	100	14	100	52	100

4.5.3. Tempat Pengembalian Kredit

Penetapan tempat pembayaran kredit pada kesepakatan sosialisasi awal pencairan dana kepada anggota tahun 2009 telah disepakati untuk mengembalikan kredit dengan 2 tempat yaitu kantor dan rumah bendahara, namun karena banyak dari anggota yang mulai tidak lancar dalam mengembalikan pinjaman maka tempat pembayaran pinjaman dirumah masing-masing anggota yang meminjam artinya pembayaran angsuran pinjaman dilakukan dengan cara penjemputan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang tempat pengembalian kredit dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Tempat Pengembalian Kredit

No	Tempat Pengembalian	Kategori Responden						Total	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet		Jml	%
		Jml	%	Jml	%	Jml	%		
1	Diluar kantor/ rumah anggota	22	91,7	13	92,8	11	78,6	46	88,5
2	Kantorgapoktan/rumah pengurus LKM-A	2	8,3	1	7,2	3	21,4	6	11,5
Total		24	100	14	100	14	100	52	100

Dari Tabel 17 terlihat keinginan tempat untuk membayar pada strata lancar sebagian besar anggota responden yang lancar sebanyak 2 orang atau sebesar 91,7% proses pengembalian dana pinjaman di tempat pengembalian kredit yaitu di luar kantor gapoktan sedangkan 2 orang sebanyak 8,3% mengembalikan kredit kerumah pengurus/di dalam kantor atau rumah pengurus dan untuk strata kurang

lancar sebagian besar anggota responden tempat pengembalian kreditnya di luar kantor yaitu di rumah anggota sebanyak 13 orang atau 92,8% sedangkan untuk strata macet sebagian besar anggota responden tempat pengembalian kreditnya di luar kantor yaitu di rumah anggota yang berarti di jemput sebanyak 11 orang atau sebesar 78,6% dijemput kerumah dan 3 orang lainnya atau sebesar 21,4% mengantar ke kantor namun kenyataannya pada strata kurang lancar dan macet ini hampir semuanya tempat pengembaliannya adalah diluar kantor gapoktan atau di jemput oleh pengurus.

4.5.4. Waktu Pengembalian Kredit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKM-A pada tahap I awal pencairan dana kepada anggota tidak diberikan batas waktu tiap bulan yang baru ditentukan, namun diberikan ketentuan dalam waktu 10 bulan sudah harus melunasi pinjaman yang diberikan. Dari hasil wawancara dengan responden keinginan mereka untuk membayarkan untuk waktu pengembalian berbeda-beda karena alasan penyesuaian waktu pendapatan dan pengeluaran. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Waktu Pengembalian Kredit LKM-A Masra

No	Waktu Pengembalian	Kategori Responden						Total	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet		Jml	%
		Jml	%	Jml	%	Jml	%		
1	Awal Bulan	20	83,3	4	28,6	5	35,7	29	55,8
2	Pertengahan Bulan	1	4,2	-	-	-	-	1	1,9%
3	Akhir Bulan	3	12,5	10	71,4	9	64,3	22	42,3
Total		24	100	14	100	14	100	52	100

Dapat dilihat dari wawancara kepada seluruh responden bahwasannya anggota yang lancar lebih memilih mengembalikan kredit pada awal bulan yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 83,3% selebihnya 1 orang pada pertengahan bulan karena alasan menerima uang jajan dari suami pada pertengahan bulan serta 3 orang atau sebesar 12,5% memilih akhir bulan karena memperhitungkan pengeluaran utama yaitu uang sekolah anak dll, sedangkan strata yang kurang lancar memilih waktu pengembalian kredit pada akhir bulan dan strata macet yang memilih awal bulan sebanyak 5 orang atau sebesar 35,7% dan akhir bulan

sebanyak 9 orang atau sebesar 64,3%, namun pada kenyataannya hanya keinginan saja yang dapat terucapkan yang terjadi tidaklah demikian.

Keadaan ini memperlihatkan keinginan membayar awal, pertengahan dan akhir bulan hanya keinginan saja namun pada kenyataannya bagi yang menunggak dan macet tidak menjalankan pembayaran tiap bulan yang di sepakati tersebut karena disini terlihat gambaran bahwasannya tidak terjadi proses perguliran dana pada tahap I. Karena pemberian waktu jatuh tempo 10 bulan yang dilakukan dibuat tanpa denda keterlambatan tiap bulan sehingga menjadikan tidak terjadi perkembangan dana pada LKM-A, ini adalah salah satu penyebab utama perkembangan dana PUAP Tahap I pada LKM-A Masra paling rendah diantara penerima tahap I lainnya bahkan pengembalian dana dikatakan minus karena kurang dari 100 juta karena tidak terjadiperguliran dana.

Maka dapat dilihat bahwasannya tidak ada indikasi yang memperlihatkan waktu pengembalian kredit berpengaruh terhadap pengembalian kredit.

4.5.6. Penggunaan Dana

Pada bulan Februari 2010 petani yang meminjam di LKM-A Masra telah dapat menggunakan dana PUAP sesuai kesepakatan bersama. Pemberian dana pinjaman oleh LKM-A pada dasarnya adalah pemberian kredit yang ditujukan untuk peningkatan modal usaha produktif anggotanya. Untuk memperkecil resiko penyalahgunaan dana maka Gapoktan mensiasatinya dengan memukul rata pemberian pinjaman yang berkisar dari Rp.1.000.000,-Rp.1.500.000,-ini berdasarkan pertimbangan karakter masyarakat yang beraneka ragam maka tidak ditetapkan RUA.

Namun setelah evaluasi tahap I pada awal tahun 2011 yaitu tahap II ditetapkan pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan Rencana Usaha Anggota (RUA), berdasarkan jenis usaha tanaman pangan, ketersediaan dana dari LKM-A yang dimanfaatkan oleh anggota untuk membiayai usahatani padi sawah mereka. Sedangkan untuk jenis usaha peternakan, anggota LKM-A Masra memanfaatkan dana tersebut untuk modal ayam potong.

Untuk industri rumah tangga pertanian dana dimanfaatkan anggota untuk menjual keripik, goreng dan produk olahan pertanian lainnya. Namun untuk usaha ini belum ada pada tahap I pada tahap II untuk jenis usaha pemasaran, dana

tersebut dipergunakan oleh anggota sebagai modal untuk menjual hasil-hasil pertanian di pasar-pasar tradisional sekitar, kemudian juga untuk modal warung-warung yang menjual sayur-sayuran, serta usaha-usaha pemasaran lain yang berbasis produk pertanian secara luas, seperti jualan ayam potong atau telur ayam karena pada intinya pemberian modal kepada petani ini merupakan langkah nyata upaya memberdayakan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk program-program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan dapat berhasil.

Sumodiningrat (1999), menyatakan indikator keberhasilan yang di pakai untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, berkembangnya kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta meningkatnya kapasitas masyarakat.
2. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya serta meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok makin kuatnya permodalan kelompok dan makin rapihnya sistem administrasi kelompok.

4.5.7. Sistem Kontrol dan pengawasan

Sistem kontrol dan pengawasan dilakukan oleh PPL, PMT, pihak UPK dalam hal ini adalah tim dari Sekretariat PUAP Kota Padang, Camat setempat serta Kelurahan juga yang paling penting adalah Ketua gapoktan dan Ketuakelompok tani serta Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan Ketua RT setempat. Untuk periode tahap I sistem kontrol cukup rutin dilakukan oleh PPL ini dapat dilihat dari rutinitas kehadiran PPL di LKM-A (Lampiran 20), dapat dilihat kehadiran PPL dalam memonitoring LKM-A dapat dikatakan sangat baik karena tiap bulannya PPL melakukan pemantauan kelapangan melihat perkembangan LKM-A Masra dan untuk kehadiran PMT menurut pengurus LKM-A PMT selalu memonitoring LKM-A tiap 2 kali dalam sebulan.

Namun kenyataannya keadaan penunggakkan dan kemacetan masih tetap terjadi dan belum teratasi. Bahkan temuan dilapangan memperlihatkan KetuaLPM

dan Ketua RT yang semestinya menjadi pengawas dan monitoring bagi anggota yang macet malah mereka yang termasuk anggota dengan pengembalian Macet. Menurut PMT keadaan tersebut bukan kesalahan PPL dan PMT sepenuhnya namun juga kontrol dan pengawasan dari masing-masing Ketua kelompok tani dan pemangku kepentingan di daerah tersebut karena beliau tersebut dianggap paling didengarkan oleh semua anggota. Tetapi pada kenyataannya pemangku kepentingan tersebutlah yang mengalami penunggakkan bahkan macet sampai sekarang sehingga dapat dikatakan status sosial tidak mempengaruhi dalam kelancaran pengembalian kredit. apalagi pertemuan kelompok yang jarang mengakibatkan kesulitan tersendiri dalam menyelesaikan masalah – masalah yang ada pada LKM-A.

Menurut Ketua gapoktan dan PPL peran dari Ketua kelompok tani sangat sedikit dalam pengawasan karena Ketua kelompok hanya menjadi penyetuju pengajuan pinjaman oleh anggota, setelah terjadi penunggakkan Ketua kelompok tani lepas tangan (tidak mau tahu) karena menurut mereka itu bukan menjadi tanggung jawab mereka. Disinilah kelemahan manajemen LKM-A karena anggota banyak yang tidak mengetahui peran dan fungsi masing-masing sedangkan pertemuan yang merupakan jalan untuk meluruskan anggapan tersebut susah untuk diwujudkan dengan berbagai alasan oleh anggota.

Oleh sebab itu peran dari PPL dan PMT yang lebih aktif dan intens ini dalam memberikan pengarahan dan sosialisasi mampu membawa semangat baru dalam tumbuh kembang Gapoktan terutama LKM-A, karena untuk membawa perubahan sikap dilakukan salah satunya dengan ilmu penyuluhan, dimana penyuluhan adalah sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok-sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan (*beneficiaries*), sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh atau juru penerangnya serta sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah, untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 1987).

Hak monitoring dan evaluasi utama terletak pada RAT dan operasionalnya dilakukan oleh Badan Pengawas. Hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi berwujud dalam pembentukan nilai-nilai bersama, kepercayaan anggota dan pengurus, penetapan kontribusi finansial yang sangat berperan baik dalam pendirian lembaga, pengelolaan lembaga, pembentukan modal, dan proses peminjaman kredit. Karena periode II yang membuat banyak perubahan bagi LKM-A maka sistem kontrol yang di serukan oleh UPK akhirnya dapat terwujud oleh LKM-A Masra karena LKM-A ini merupakan salah satu dari beberapa LKM-A di Kota Padang yang telah melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang bertempat di Kantor Lurah Gurun Lawas Kota Padang pada tanggal 23 agustus 2011 dapat dilihat dari daftar hadir anggota pada (Lampiran 21).

Hal tersebut merupakan apresiasi yang membanggakan bagi LKM-A Masra dalam perkembangannya sendiri di kota padang telah menggelar RAT dibandingkan LKM-A penerima dana PUAP lainnya di kota padang. Dimana melalui RAT maka pencerminan LKM-A sebagai pengelola keuangan petani yang transparan (terbuka) dapat diwujudkan oleh LKM-A Masra.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh selama tahun 2010 tersebut, Ketua Gapoktan Harapan Jaya menyatakan bahwa dengan adanya kerjasama Gapoktan dan LKM-A, serta dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Penyuluh Pendamping dan PMT (Penyelia Mitra Tani), tahun 2011 diharapkan LKM-A Masra akan berbentuk Bank Tani yang lebih besar dan dapat melayani masyarakat tani yang berada di Kelurahan Gurun Lawas khususnya, dan dapat juga melayani daerah-daerah lain.

4.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembalian kredit

Setelah dilakukan penelitian terhadap LKM-A Masra diduga beberapa faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit pada anggota LKM-A dalam pengembalian dana PUAP diantaranya yaitu faktor perilaku individu, profil usaha dan mekanisme pembiayaan.

4.6 1. Faktor perilaku individu

Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan dan baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor

yang saling berinteraksi yang juga termasuk kedalam resiko dalam pengembalian kredit (Notoatmodjo, 2003).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perilaku seorang peminjam dalam pengembalian kredit dilandaskan pada pengetahuan seseorang tersebut terhadap kredit yang sedang mereka pinjam kemudian setelah mereka tahu maka mereka mulai sadar dan mengambil tindakan mau atau tidaknya dalam mengambil kredit tersebut dan mau juga untuk mengembalikannya lalu mereka mulai mendapat respon terhadap keadaan setelah mau mencoba apakah mampu untuk mengembalikan atau tidak.

Hal tersebut telah menjadi pertimbangan saat turunnya program PUAP ini karena salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit adalah karakteristik pelaku peminjam kredit oleh sebab itu pada saat turunnya dana PUAP ini anggota dan pengurus Gapoktan bersepakat untuk memberikan pinjaman dengan sistem bagi rata yang mengacu pada pertimbangan karakter individu tersebut sehingga berpengaruh pada periode pinjaman berikutnya.

Ternyata hasil yang didapat dari laporan perkembangan dana Gapoktan Harapan Jaya LKM-A Masra desember 2010 pengembalian akhir LKM-A adalah minus dari 100 juta. Karena dari 52 anggota hampir setengah nya adalah kurang lancar sampai macet karena mengganggu proses perguliran dana berikutnya, hal ini membuat dugaan bahwasannya faktor perilaku ikut berpengaruh terhadap pengembalian dana oleh anggota ke LKM-A.

Oleh sebab itu dari faktor perilaku tersebut peneliti menemukan beberapa variabel tersebut ikut mempengaruhi proses pengembalian dana yang dijelaskan sebagai berikut:

4.6.1.1. Tahu

Tahu (*Know*), adalah kemampuan untuk mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya termasuk diantaranya mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima (Notoatmodjo, 2003). Pengetahuan diukur dari tingkat pengetahuan responden terhadap program dan ketentuan yang ada dalam pinjaman kredit serta kemampuan mengingat kembali materi pada sosialisasi yang pernah diberikan.

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya, yang berlandaskan pada pengetahuan seputar program dan kredit yang sedang mereka jalankan serta tahu akan hak dan kewajibannya sebagai anggota serta pengetahuan akan aturan apabila terjadi penyimpangan, jika mereka benar-benar tahu dan menyadari maka kemungkinan penyimpangan tersebut akan makin tipis terjadi.

Dari 52 jumlah anggota seperti yang dijelaskan 24 anggota adalah lancar, 14 kurang lancar dan 14 adalah macet yang ke semuanya adalah responden dari peneliti yang meminjam dana pada LKM-A Masra. Variabel pengetahuan ini dianggap dapat mengukur keadaan tingkat pengetahuan masing-masing anggota peminjam seputar dana dan program serta pengetahuan materi sosialisasi yang sebelumnya telah mereka hadiri, pertanyaan seputar pengetahuan (kuisisioner) dapat dilihat pada (Lampiran 22).

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan variabel yang perlu dilihat dalam sebuah evaluasi keberhasilan ataupun kegagalan program karena sosialisasi mampu memberikan gambaran keadaan pengetahuan responden terhadap kemauan mengikuti yang berarti kertertarikannya terhadap program yang sedang dijalani tersebut juga penguasaan terhadap materi agar informasi dalam materi benar-benar sampai langsung pada sasaran. Sosialisasi pada LKM-A Masra telah dilakukan selama 2 – 4 kali dengan materi yang berbeda – beda tiap pertemuan sehingga penguasaan materi dimasukkan pada panduan wawancara dan pengisian kuisisioner.

Kemudian hasil dari pengisian kuisisioner dan wawancara tersebut kemudian dilakukan perhitungan, setelah dilakukan perhitungan jawaban dari tiap-tiap responden maka dilakukan penentuan skor responden masuk kategori pengetahuan mana (Tahu, Kurang Tahu, Tidak Tahu). Maka didapatkan hasil yang digambarkan dalam tabulasi berdasarkan strata dan jumlah anggota yang di persentasikan lagi. Hasil perhitungan responden pada tingkat pengetahuan yang dijelaskan pada tabel 19.

Tabel 19. Tabel hasil perhitungan responden pada tingkat pengetahuan.

	Pertanyaan	Kategori pengetahuan	Kategori						Total	
			Lancar		K.lancar		Macet		Jml	%
			Jml	%	Jml	%	Jml	%		
Faktor perilaku	1.Pengetahuan tentang program, ketentuan kredit hak dan kewajiban 2. Materi sosialisasi	Tahu	22	92	3	21,4	2	14,3	27	52
		Kurang	2	8	9	64,3	2	14,3	13	25
		Tidak tahu	-	-	2	14,3	10	71,4	12	23
Total	Wawancara dan Kuisisioner	20 pertanyaan	24	100	14	100	14	100	52	100

Dari wawancara dan pemberian kuisisioner dapat dilihat hasilnya adalah bagi anggota yang strata lancar 92% tingkat pengetahuan mereka adalah tahu terhadap kredit yang dipinjam yang merupakan kredit yang seharusnya di kembalikan serta program PUAP yang merupakan program dengan sasaran adalah untuk pengembangan usahatani mereka, dengan penjelasan pada saat sosialisasi awal pemberian dan pemanfaatan penggunaan dana membuat mereka mengerti dan paham tentang kredit PUAP ini sedangkan selebihnya atau 8% dari anggota strata lancar adalah kurang tahu terhadap program dan pembayaran kredit tersebut berlandaskan ikut-ikutan saja karena biasanya bagi mereka hutang adalah harus dibayarkan.

Pada strata kurang lancar 3 orang atau 21,4 % adalah tahu bahwasannya pemberian kredit ini merupakan kredit yang harus dibayarkan kembali, namun kendala dalam berusaha tani menjadi kendala tersendatnya pembayaran dana kepada LKM-A dimana gagal panen dan akibat gempa mengakibatkan merosotnya usaha mereka, sehingga masih ada sisa hutang yang belum di bayarkan.

Menurut pengurus strata kurang lancar dan macet tersebut telah mengangsur pinjaman mereka namun belum sepenuhnya melunasi pinjaman mereka pada LKM-A sisanya telah berangsur-angsur membayarkan kepada pengurus karena keinginan meminjam kembali kepada LKM-A membuat mereka berusaha membayarkan pinjaman, anggota sebanyak 9 orang atau sebesar 64,3 % lagi adalah kurang tahu bahwasannya dana ini merupakan pinjaman yang harus

dibayarkan serta proram ini merupakan suatu program yang penggunaannya adalah untuk usaha produktif bukan konsumtif karena sedikitnya dari mereka beranggapan bahwasannya dana ini merupakan bantuan pemerintah berupa dana seperti dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang merupakan dana bantu yang tidak perlu dibayarkan kembali selebihnya ada 2 orang atau sebesar 14,3% berada pada kategori anggota yang tidak tahu.

Pada strata macet 2 orang atau sebesar 14,3% berada pada tingkat pengetahuan yang *tahu* namun tidak mau mengembalikan kredit. Orang-orang inilah yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dengan status sosial yang tinggi pula di masyarakat yaitu mempunyai status pemangku kepentingan sebagai ketua LPM, dan Ketua RT mereka menganggap dana ini merupakan dana sama dengan pinjaman pada program sebelumnya yang tidak masalah jika tidak dikembalikan, sedangkan 2 orang anggota atau sebanyak 14,3% dari anggota dengan strata macet ini kurang tahu bahwa sebenarnya dana ini merupakan dana yang seharusnya dikembalikan.

Sehingga dari wawancara peneliti terhadap responden strata macet menemukan bahwa responden selebihnya yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 71,4% nya adalah tidak tahu bahwa dana tersebut adalah dana kredit yang harus dibayarkan sehingga mereka pun tidak merasa rugi bila bantuan yang diberikan tidak bisa menghasilkan sesuatu begitu juga mereka tidak merasa mempunyai beban bila hutang tersebut harus dibayarkan kembali (Daniel, 2007).

Dari hasil diatas maka diperoleh hasil tingkat pengetahuan mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. Karena pola pikir seseorang terhadap dana dan program mendorong sikap mereka dalam membuat suatu keputusan baik itu positif maupun negatif hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh Handoyo (2009), semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang memberikan peluang kelancaran dalam pengembalian pembiayaan.

4.6.1.2. Mampu

Variabel ini diukur dari kemampuan responden yang dilihat dari pendapatan usaha masing-masing anggota dari pinjaman kredit untuk usaha

tersebut yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan usaha lain berbasis pertanian (berdagang) serta keadaan perkembangan ekonomi mereka.

Besarnya pendapatan/omzet usaha akan menentukan besar repayment capacity yang dimiliki nasabah. Faktor ini dijadikan pertimbangan apakah seorang nasabah dapat diberikan pembiayaan atau tidak, dan berapa besar pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah agar nasabah dapat meningkatkan usaha dan mengembalikan pembiayaan dengan lancar (Handoyo, 2009).

Kesalahan dalam perhitungan omzet usaha beresiko menimbulkan tunggakan pembiayaan. Pada faktor ini kemampuan responden dilihat dari segi pendapatan yang diperoleh responden dari usaha yang mereka jalankan. Pendapatan dijadikan salah satu indikator dari faktor perilaku individu karena pendapatan dapat menentukan kemampuan keuangan responden dalam pengembalian dan ke LKM-A. Pendapatan responden tersebut dihitung berdasarkan 1 kali periode peminjaman kredit di LKM-A yakni pada tahun 2010 yang merupakan periode tahap 1 pada proses penyaluran dana di LKM-A Masra dengan jangka waktu pengembalian semua responden yakni 10 bulan.

Dari hasil yang di dapat pada strata lancar yang mempunyai penghasilan berkisar antara Rp 2.300.000,- – Rp 3.200.000,- dengan rata-ratanya berpenghasilan \pm Rp 3.000.000,-. Sedangkan pada strata kurang lancar responden pada umumnya mempunyai penghasilan berkisar antara Rp 2.100.000 – Rp 2.600.000,- dengan rata-rata penghasilan Rp. 2.357.142,-. Untuk lebih jelasnya lihat (Lampiran 23).

Pada strata macet responden mempunyai penghasilan berkisar antara Rp 1.500.000,- – Rp 2.500.000,- dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp 1.707.142, Responden dengan strata macet ini rata-rata berprofesi sebagai petani sekaligus berwirausaha mereka beralasan sebelumnya ikut julo-julo/arisan kepada pengurus LKM-A selalu lancar, dimana dana PUAP ini sebagai salah satu dana yang di harapkan membangun kembali usaha mereka ternyata masih jauh seperti yang di harapkan karena kerugian yang masih belum bisa tertutupi.

Kategori pendapatan usaha anggota LKM-A dapat dilihat berdasarkan metode statistik yang dihitung melalui metode statistika dengan menghitung

terlebih dahulu *standard error* dari semua pendapatan anggota, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Lampiran 24).

Setelah itu ditabulasikan hasil dari perhitungan kedalam bentuk Tabel, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 20. Berikut ini:

Tabel 20. Pendapatan Usaha Anggota

No	Pendapatan Anggota	Strata						Total	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet		Jml	%
		Jml	%	Jml	%	Jml	%		
1	Rendah	-	-	-	-	8	57,1	8	15,4
2	Sedang	12	50	14	85,7	6	42,9	32	61,5
3	Tinggi	12	50	-	-	-	-	12	23,1
Total		24	100	14	100	14	100	52	100

Dari Tabel 20 terlihat rata-rata pendapatan semua anggota LKM-A adalah berada pada kategori sedang, pada setiap strata lancar hampir semua anggotanya mempunyai pendapatan yang tinggi dan sedang . Dengan pendapatan yang tinggi dan sedang dengan jumlah anggota sebanyak 12 orang atau sebesar 50 % pada kategori sedang dan tinggi dengan pendapatan tersebut anggota akan lebih mudah dalam membayar angsuran kredit

Jika dilihat dari pendapatan anggota pada strata kurang lancar yang semua anggotanya mempunyai pendapatan yang sedang yang berjumlah 14 orang atau sebesar 100% sedangkan untuk strata macet anggota sebagiannya mempunyai pendapatan dengan kategori rendah yang berjumlah 8 orang atau sebanyak 57,1 % yang sebagian besar anggotanya beralasan mengalami kegagalan usaha diantaranya yaitu tanaman yang mereka usahakan rusak disebabkan oleh gangguan binatang buas dan penyakit tanaman dan anggota yang mengusahakan ternak ayam boiler mengalami kemacetan karena disebabkan oleh karena tingginya harga pakan ayam sedangkan harga beli ternak ayam sangat murah.

Sedangkan sebahagiannya lagi adalah anggota dengan kategori pendapatan sedang dengan anggota berjumlah 6 orang atau sebesar 42,9% namun tetap mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit karena menurut mereka lebih banyak pengeluaran untuk keperluan mendesak dibandingkan pendapatan yang diperoleh sehingga hanya menutupi keperluan sehari-hari saja.

Sehingga didapatkan hasil orang yang mempunyai pendapatan tinggi adalah orang yang dengan pengembalian kreditnya lancar sebaliknya orang yang memiliki pendapatan rendah adalah orang yang pengembalian kredit nya macet hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Sukmadi dan Sudrajat (1994) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit adalah pendapatan. Dimana, bila pendapatan mereka bertambah maka peminjam akan cenderung melunasi kewajibannya.

4.6.1.3. Mau

Variabel ini merupakan tingkat kemauan responden dalam mengembalikan kredit yang awalnya dilihat dari tingkat pengembalian responden ke LKM-A berdasarkan jangka waktu jatuh tempo pembayaran kreditnya yaitu 10 bulan, dimana hasilnya adalah penunggakan dan kemacetannya setengah dari seluruh jumlah anggota LKM-A sehingga dapat dilihat belum terlihat kemauan mereka dalam melunasi kredit sesuai jangka waktu jatuh tempo sampai telah masuk waktu peminjaman periode tahap II ini, maka peneliti mengukur tingkat kemauan mereka dalam melunasi kredit dari kemauan peminjam dalam melunasi pinjaman sampai pada agustus 2011. Dikarenakan telah lebih setahun dari jatuh tempo yang dijanjikan dahulu maka sepatutnya dilihat itikad peminjam dalam melunasi kreditnya, agar dapat diambil tindakan selanjutnya yang lebih tegas lagi daripada sebelumnya.

Untuk itu pada periode penyaluran dana tahap II ini semua aturan yang bersifat membantu dalam pelunasan kredit oleh anggota yang macet mulai dilakukan, mulai dari pengaktifan denda dan pemanggilan sampai ancaman untuk tidak lagi mendapatkan bantuan dari program manapun membuat anggota yang nakal/ membandel mulai mengangsur melunasi pinjaman. ini terlihat dari keadaan penerima sampai bulan agustus 2011 (Lampiran 25).

Agar lebih jelasnya kemauan pembayaran kredit oleh anggota dapat dilihat pada Tabel 21 berikut :

Tabel 21. Tingkat Kemauan Responden Dalam Pembayaran Kredit

	Kategori						Total	
	Lancar		Kurang lancar		Macet			
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Mau	24	100	4	28,6	2	14,2	30	57,7
Belum mau	-		8	57,2	6	42,9	14	27,0
Tidak mau	-		2	14,2	6	42,9	8	15,3
Total	24	100	14	100	14	100	52	100

Dari Tabel 20 dan 21 di atas terlihat bahwasannya kemampuan masing-masing anggota dengan keadaan kemauanyang dilihat dari perkembangan pembayaran sisa hutang pada LKM-A dalam membayarkan kredit dapat dihubungkan seperti yang dilihat pada tabel di atas pada strata lancar yang kemampuannya digolongkan pada pendapatan tinggi dan sedang, mereka mau untuk mengembalikan kredit, sedangkan pada strata kurang lancar yang pendapatannya semuanya sedang yang mau mengembalikan kredit berjumlah 4 orang atau sebesar 28,6% dan masih belum mau mengembalikan pinjaman dengan anggota berjumlah 8 orang atau sebesar 57,2% namun telah mengangsur-angsur pembayaran sedangkan untuk anggota yang berjumlah 2 orang atau sebesar 14,2% belum mau membayarkan kreditnya yang terlihat dari belum adanya itikad mengangsur hutang pada LKM-A.

Sedangkan untuk strata macet 2 orang anggota nya atau sebesar 14,2% telah mau mengembalikan kredit dan sebanyak 6 orang atau sebesar 42,9% masih belum melunasi yang diartikan belum mau dalam mengembalikan kredit, dan untuk anggota yang tidak mau mengembalikan kredit dilihat dari 6 orang atau sebesar 42,9% karena sampai sekarang masih macet dan tidak pernah membayar sekalipun sedangkan untuk pendapatannya lebih dari setengahnya dikategorikan rendah.

Dari hasil tersebut maka didapati bahwa orang yang tidak memiliki kemauan dalam membayarkan sisa hutang atau kreditnya ke LKM-A adalah orang-orang dengan pengembalian kreditnya macet dan menunggak karena tidak ada itikad baik dalam melunasi pinjaman sebaliknya semakin mau mereka dalam

melunasi kredit maka semakin lancar pengembalian kreditnya sehingga kemauan dalam melunasi kredit mempengaruhi dalam kelancaran pengembalian kredit.

Maka dari hasil diatas didapatkan ketiga variabel tersebut meliputi pengetahuan, kemampuan dan kemauan responden yang termasuk pada faktor perilaku ketiganya berpengaruh dalam menentukan tingkat pengembalian kredit pada LKM-A Masra Gapoktan Harapan Jaya.

4.6.1. Faktor profil (karakteristik) usaha

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi pengembalian kredit adalah profil/karakteristik usaha dari tiap responden, faktor ini memberikan gambaran tentang alokasi penggunaan dana, pengalaman dan keadaan usaha dari masing- masing responden dari tiap strata.

Adapun hasil yang di dapatkan di lapangan adalah sebagai berikut:

4.6.1.1. Alokasi penggunaan dana

Alokasi penggunaan dana kredit merupakan pemanfaatan dana kredit yang dipergunakan sesuai penggunaan yang semestinya. Dimana penggunaan dana dapat digolongkan untuk keperluan produktif (usaha), konsumtif (kebutuhan rumah tangga dll) atau bahkan keduanya sekaligus. Untuk lebih jelasnya alokasi penggunaan dana kredit PUAP oleh anggota LKM-A Masra dapat dilihat pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22. Alokasi penggunaan kredit oleh anggota LKM-A Masra

No	Keterangan	Kategori Responden				Total	
		Kurang Lancar		Macet			
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Usaha	10	71,4	-		34	65,4
2	Usaha dan Kebutuhan RT	3	21,4	7	50	10	19,2
3	Kebutuhan RT	1	7,2	7	50	8	15,4
	Total	14	100	13	100	52	100

Dari Tabel 22 terlihat bahwa pada strata kurang lancar 10 orang atau sebesar 71,4 % menyatakan bahwa kredit yang mereka dapatkan digunakan untuk menambah modal usaha. Sedangkan untuk strata macet sebagian besar anggotanya menyatakan bahwa kredit yang mereka dapatkan digunakan untuk modal usaha keperluan rumah tangga yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 50 %.

Pada strata kurang lancar dan strata macet sebagian Respondennya menggunakan kredit untuk usaha dan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Adapun kebutuhan rumah tangga yang dipenuhi adalah untuk membeli keperluan harian dalam rumah tangga, membayar uang sekolah anak, dan untuk keperluan mendadak lainnya.

Dengan demikian hasil tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang pengembaliannya macet tidak menggunakan kredit sepenuhnya untuk kepentingan modal usahanya tetapi alokasi penggunaan dana kredit banyak menyimpang dari tujuan pemberian kredit, kredit yang pada awal peminjaman bertujuan untuk modal usaha tetapi pada saat penggunaannya tidak digunakan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut Handayani (2010), penyimpangan penggunaan kredit dari produksi ke konsumsi akan menimbulkan bencana "mati langkah" bagi usaha nasabah yang berakhir pada kemacetan usaha. Penyimpangan penggunaan kredit ini disebabkan karena lemahnya analisa dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak pengurus. Lemahnya analisa ini sering terjadi terhadap analisa karakter nasabah/anggota, pada saat pengajuan kredit calon nasabah/ anggota selalu menyatakan tujuan peminjaman kreditnya untuk modal usaha namun pada kenyataannya kredit tersebut hanya sebagian yang dipergunakan untuk modal usaha dan sebagian lagi dipergunakan untuk biaya sekolah anak, memperbaiki rumah, dan membeli kebutuhan lainnya.

Dari hasil tersebut maka di dapatkan kesimpulan bahwasannya anggota yang lancar pengembalian kreditnya adalah orang yang menggunakan kreditnya dengan cara yang tepat yaitu untuk usaha produktif sebaliknya penggunaan kredit yang tidak tepat menyebabkan seseorang berisiko menunggak dalam pembayaran kreditnya karena kredit yang seharusnya digunakan untuk usaha produktif digunakan menyimpang dengan menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga/kebutuhan mendesak diluar modal usaha sehingga peminjam hanya terlepas sesaat dari kebutuhan mendesak namun tidak punya modal untuk kebutuhan jangka panjang.

4.6.1.2. Pengalaman usaha dan pengalaman meminjam kredit.

Dalam pengembalian kredit lama berusaha dan pengalaman meminjam kredit merupakan salah satu yang harus di perhatikan karena dari situ dapat dinilai pengalaman nasabah/peminjam dalam melakukan pinjaman pada lembaga permodalan sehingga dapat diketahui kemungkinan takut atau tidak seseorang tersebut dalam berhutang. Untuk lebih jelas lihat Tabel 23.

Tabel 23. Pengalaman usaha dan pengalaman meminjam kredit anggota LKM-A

No		kategori						Total	
		Lancar		Kurang lancar		Macet			
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Pengalaman usaha								
	<5 tahun	2	8,3	3	21,4	2	14,3	7	13,5
	5-25 tahun	14	58,4	7	50,0	5	35,7	26	50
	26-60 tahun	6	25,0	3	21,4	5	35,7	14	27
	>60 tahun	2	8,3	1	7,2	2	14,3	5	9,7
	Total	24	100	14	100	14	100	52	100
2	Pengalaman meminjam kredit								
	0 atau tidak pernah	3	12,5	5	35,7	4	28,6	12	23
	1-3 kali	20	83,3	9	64,3	8	57,1	37	71,1
	>3 kali	1	4,2	-	-	2	14,3	3	5,9
	total	24	100	14	100	14	100	52	100

Dari Tabel 23 diatas dapat dilihat bahwasannya dari tiap strata terdapat perbedaan dari segi umur dan pengalaman berusaha mereka serta berapa kali pengalaman mereka dalam meminjam kredit di luar kredit PUAP yang dari strata lancar yaitu cukup banyak 16 orang responden atau sebanyak 66,7% dengan tingkat umur produktif serta dari segi umur kurang/tidak produktif yang berjumlah 8 responden atau sebesar 33,3% mempunyai latar belakang pengalaman usaha dibawah 26 tahun sebanyak 16 orang atau sebanyak 66,7% serta 26 - 60 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 25,0% dengan mata pencaharian sebagai petani dan usaha lainnya yang berarti telah cukup berpengalaman dalam berusaha dan responden yang telah lebih dari 60 tahun berusaha tani sebanyak 2 orang responden atau sebesar 8,3% sudah lebih dari 60 tahun yang berarti telah lebih berpengalaman dalam berusaha dari responden strata lancar lainnya, namun dalam hal pengalaman meminjam kredit pada responden strata lancar 3 orang responden

atau sebanyak 12,5% tidak pernah sama sekali meminjam kredit diluar kredit PUAP.

Untuk yang berpengalaman dalam meminjam kredit pada strata lancar terdapat 21 orang atau sebanyak 87,5% telah lebih berpengalaman meminjam kredit. Hal ini berbeda dengan strata kurang lancar yang dari segi umur 8 orang atau sebesar 57,1% responden berada pada umur produktif dengan 6 orang responden atau sebesar 42,9% berada pada umur kurang/tidak produktif lagi dengan pengalaman usaha mereka dibawah 60 tahun sebanyak 13 orang atau 92,8% yang berarti juga cukup berpengalaman, dan 1 orang responden atau 1,2% lebih dari 60 tahun berusaha tani dengan pengalaman peminjaman kredit yang berbeda- beda 5 orang responden atau 35,7% tidak pernah meminjam kredit di luar kredit PUAP dan yang telah berpengalaman terlebih dahulu dalam meminjam kredit ada 9 orang responden atau 64,3%.

Untuk strata macet responden dengan umur produktif ada sebanyak 6 orang responden atau sebesar 42,9% dan untuk tingkat umur kurang/tidak produktif sebanyak 8 orang atau sebesar 57,1% dengan pengalaman usaha dibawah 60 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 85,7% dengan yang telah lebih berpengalaman diatas 60 tahun sebanyak 2 orang atau sebesar 14,3%, berbeda dengan pengalaman meminjam kredit 4 orang responden pada strata ini tidak pernah meminjam kredit sebelumnya dengan 1-3 kali nya ada 8 orang responden serta lebih dari 3 kali pengalaman meminjam kredit ada 2 orang yang berarti telah lebih dulu berpengalaman lebih banyak dari responden lancar namun pada kenyataannya strata yang berpengalaman ini lebih ini responden dengan kategori macet.

Sehingga didapatkan kesimpulan pengalaman meminjam kredit tidak berpengaruh dalam dalam kelancaran pembayaran kredit karena semakin berpengalaman dia dalam meminjam kredit maka semakin besar kemungkinan untuk menunggak. hal ini senada dengan pendapat Handoyo (2009), bahwasannya umur dan pengalaman mengambil kredit, semakin tua umur pengusaha maka akan semakin lancar pengembalian kreditnya. Kemudian semakin sering pengusaha mengambil kredit maka akan semakin tidak lancar pengembalian kreditnya. Hal

ini karena semakin sering mengambil kredit akan meningkatkan pengalaman dalam peminjaman dan lebih berani mengambil resiko menunggak.

4.6.1.3. Keadaan usaha

Perkembangan sebuah usaha dapat dilihat dari masih dijalankannya sebuah usaha atau kurang berjalannya sebuah usaha, hasil yang diterima dari usaha yang dilaksanakan, hasil yang diterima dari beberapa kali panen dari usaha yang dilaksanakan serta pengaruh jumlah hasil yang diterima terhadap kondisi ekonomi keluarga ini merupakan keadaan usaha mereka yang berupa dampak dari pemberian kredit dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Perkembangan Usaha Anggota

No	Keterangan	Kategori Responden						Total	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet			
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Masih dijalankan	24	100	5	35,7	5	35,7	34	65,4
2	Kurang berjalan	-		5	35,7	3	21,4	8	15,4
3	Tutup			4	28,6	6	42,9	10	19,2
Total		24	100	14	100	14	100	52	100

Dari Tabel 24 terlihat pada strata lancar seluruh anggotanya usahanya berkembang dengan jumlah anggota 24 orang atau sebanyak 100 % dan usaha yang mereka laksanakan masih berkembang sampai sekarang. Untuk strata kurang lancar berjumlah 5 orang atau sebesar 35,7 % usahanya masih dijalankan, dan 5 orang atau 35,7% usahanya kurang berjalan. Kemudian 4 orang nya atau sebesar 28,6% usahanya ditutup. Sedangkan untuk strata macet 5 orang atau sebesar 35,7% usaha mereka tetap dijalankan sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 21,4% adalah kurang berjalan dan 6 orangnya 42,9% usahanya tidak berjalan sama sekali atau dapat dikatakan ditutup.

Berkembangnya usaha sebagai dampak dari penggunaan kredit akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima. Pada LKM-A berkaitan dengan alokasi penggunaan kredit oleh sebagian besar anggotanya merasakan dampak dari penggunaan dari kredit yang mereka pinjam. Bagi anggota yang menggunakan kredit pinjaman untuk modal usaha, hasil usahanya dapat digunakan untuk membayar angsuran kredit sehingga lancar dalam pengembalian

kredit, tetapi bagi anggota yang menggunakan kredit pinjaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka akan sulit dalam membayar angsuran kredit kepada LKM-A. Hal ini disebabkan karena pada awal peminjaman kredit penggunaannya sudah menyimpang dari tujuan peminjaman.

Berdasarkan kondisi diatas, dari segi dampak kredit bagi anggota terlihat bahwa anggota yang usahanya masih berjalan adalah anggota yang mengembalikan kredit secara lancar, dan anggota yang kurang lancar sebagian nya mempunyai usaha yang masih berjalan dengan alasan pendapatan hanya mencukupi kebutuhan rumah tangga saja belum cukup untuk hutang atau pembayaran kredit. Selebihnya usahanya ada yang kurang berjalan dan adapula yang ditutup. Untuk strata dengan tingkat pengembalian macet sebagian anggota nya mempunyai usaha yang kurang berjalan dan bahkan sampai tutup. Sedangkan sedikitnya atau sebanyak 5 orang nya atau sebesar 35,7% yang masih dijalankan. Hal ini memperlihatkan keadaan anggota yang macet tersebut mempergunakan dana kredit tersebut hampir keseluruhannya adalah menyimpang sehingga usaha yang dijalankan tidak bertahan lama.

Dari ketiga variabel yang meliputi alokasi penggunaan kredit serta keadaan usaha ikut mempengaruhi pengembalian kredit oleh anggota LKM-A Masra karena kedua variabel saling terkait. Namun tidak dengan pengalaman usaha dan meminjam kredit dari hasil yang didapat tidak menunjukkan ada pengaruh terhadap pengembalian kredit oleh anggota maka dapat disimpulkan faktor profil usaha tidak terlalu berpengaruh dalam pengembalian kredit oleh anggota LKM-A.

4.6.2. Faktor Mekanisme Pembiayaan

Untuk faktor berikut ini yaitu mekanisme pembiayaan merupakan suatu bentuk mekanisme pembayaran kredit yang dilakukan oleh LKM-A yang diantaranya terdapat jarak rumah ke tempat pengembalian kredit, Pengelolaan administrasi dan pembukuan oleh pengurus dalam pembayaran kredit tiap bulan serta sanksi keterlambatan kepada anggota LKM-A.

Berikut ini yang dapat dilihat dari mekanisme pembiayaan adalah sebagai berikut:

4.6.2.1. Jarak rumah ke tempat pembayaran kredit

Merupakan jarak rumah responden terhadap tempat pembayaran kredit, hampir sebagian anggota pembayaran angsuran kredit nya dijemput oleh pengurus karena seperti yang di jelaskan sebelumnya selain menjadi pengurus LKM-A bendahara sekaligus sekretaris LKM-A yang bernama mayarni berprofesi sebagai kepala arisan/julo-julo yang menagih pinjaman kepada anggota julo-julo nya yang sebagian besar adalah anggota LKM-A yang rumahnya dapat dijangkau oleh pengurus atau sejauh 1 km dari rumah pengurus, namun jarak rumah pengurus dan anggota tidak semuanya dapat dijangkau pengurus karena sebagian besar jarak rumah anggota mempunyai jarak rumah yang cukup jauh dan berada jarang dirumah. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 25 berikut ini.

Tabel 25. Jarak Rumah Anggota Dengan Tempat Pembayaran Kredit

No	Keterangan	Kategori Responden						Total	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet			
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Dekat dari rumah pengurus /Dapat dijangkau oleh pengurus (1 KM dari rumah pengurus)	22	91,7	13	92,8	11	78,6	46	88,5
2	Jauh dari rumah pengurus / diluar jangkauan pengurus > 1 KM dari rumah pengurus.	2	8,3	1	7,2	3	21,4	6	11,5
Total		24	100	14	100	14	100	52	100

Dari tabel diatas terlihat bahwasannya jarak rumah anggota LKM-A terhadap tempat pengembalian kredit dari 52 orang anggota yang dapat di jangkau oleh pengurus ada 46 orang atau sebanyak 88,5% yang strata lancar berjumlah 22 orang atau sebanyak 91,7%, strata kurang lancar berjumlah 13 orang atau sebanyak 92,8% dan macet berjumlah 11 orang atau sebanyak 88,5% Sedangkan anggota dengan jarak rumah nya jauh dari rumah pengurus/tempat pembayaran kredit dari 52 orang anggota adalah 6 orang atau sebesar 11,5%. Dengan strata lancar ada 2 orang, 1 orang strata kurang lancar dari 14 anggota mempunyai jarak jauh dari rumah pengurus dan pada strata macet 3 orang nya adalah jauh dari

rumah pengurus namun cara pengembalian kredit yang dipilih oleh Responden berbeda- beda dapat dilihat pada halaman 80 tentang cara pengembalian kredit dari strata lancar 5 orang memilih mengantar kredit 2 diantaranya karena rumah jauh dan 3 diantaranya karena kesibukan lain diluar rumah.

Pada strata kurang lancar dari 13 orang anggota yang jarak rumah nya dekat dengan tempat pembayaran 2 orang anggota lebih memilih di jemput oleh pengurus karena beralasan jarang di rumah. dan untuk strata macet 11 orang anggotanya mempunyai jarak rumah yang dekat dengan pengurus namun tidak pernah menghantar kan kepada pengurus karena itu pengurus memilih menjemput langsung ke rumah anggota.

Hal ini memperlihatkan hasil bahwasannya jarak rumah anggota dengan tempat pembayaran kredit tidak berpengaruh karena pengurus telah mempertimbangkan hal ini sebelumnya bahwasannya tidak efektif jika pembayaran ini di tunggu dari hantaran anggota saja tapi harus ada penjemputan agar anggota merasa punya rasa malu karena ada penjemputan.

4.6.2.2. Pengelolaan administrasi dan Pembukuan oleh pengurus dalam pembayaran kredit tiap bulan.

Merupakan pembuatan pembukuan oleh pengurus yang akan menjadi laporan perkembangan dana anggota LKM-A yang di dalamnya terdapat jumlah angsuran tiap anggota yang membayar, jumlah bunga dan jumlah anggota yang menunggak serta jumlah perkembangan dana LKM-A.

Pengelolaan administrasi pada LKM-A Masra termasuk dalam kategori teratur dan cukup bagus, karena selalu dibimbing oleh PPL dan PMT dalam hal pembukuan yang tiap bulannya dijemput oleh PMT Kota Padang yang kemudian di rekap sampai 1 tahun atau tiap akhir evaluasi per tahap periode kemudian di laporkan kepada UPK dalam hal ini adalah sekretariat PUAP Kota Padang karena menurut PMT Kota Padang LKM-A Masra merupakan LKM-A yang paling mandiri dalam pembukuan dan awalnya memang mengalami kesulitan dalam hal pembukuan di karenakan tenaga muda yang mempunyai SDM dalam membuat pembukuan dengan sistem komputer tidak ada di LKM-A, namun karena intensitas pembimbingan pengajaran oleh PMT ditemani PPL sekarang pengurus mampu membuat laporan tiap bulan dengan komputer dan melibatkan anak

pengurus yang juga ikut membantu. Serta pembukuan dapat dikatakan baik karena hal ini terlihat dari terpisahnya antara berkas-berkas pinjaman anggota dengan berkas-berkas lainnya.

Maka tidak terdapat indikasi yang memperlihatkan bahwasannya pengelolaan dan pembukuan mempengaruhi kelancaran dalam pengembalian kredit.

4.6.3.3. Sanksi keterlambatan

Pada tahap I tahun 2009-2010 LKM-A memberikan sanksi jika ada anggota yang terlambat dalam membayar pinjaman dari jangka waktu 10 bulan yang telah ditetapkan. Untuk anggota LKM-A yang macet dalam pembayaran maka langkah awal yang dilakukan adalah memberi surat teguran, setelah itu perwakilan pengurus akan mendatangi rumah anggota yang terlambat. Apabila yang bersangkutan tidak bisa membayar angsurannya pada bulan tersebut maka pengurus akan memberi waktu sampai bulan berikutnya.

Setelah bulan berikutnya masih tidak membayar angsuran maka pengurus mengancam akan menambah bunga sebanyak bunga pinjaman, namun itu hanya berupa ancaman saja karena pengurus merasa terlalu keras apabila memakai sistem bunga ber bunga. seandainya belum lunas dalam membayar angsuran maka diancam dengan resiko tidak bisa lagi mengajukan permohonan kredit dan akan di laporkan pada pihak yang berwajib serta pemanggilan lewat masjid/musholla tempat masing- masing RT/RW tiap anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKM-A sampai saat ini cara yang telah ditempuh adalah memberi surat teguran serta mendatangi rumah anggota yang meminjam sambil meminta angsuran kredit yang telah menunggak.

Dari beberapa sanksi yang berlaku di LKM-A beberapa sanksi yang sudah diterapkan atau dijalankan, hal ini disebabkan karena pengurus masih memberikan kesempatan kepada anggota karena kasihan. Dari responden yang di wawancara terdapat beberapa orang yang mendapatkan surat teguran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 26 dibawah ini :

Tabel 26. Sanksi Bagi Anggota yang Menunggak

No	Keterangan	Kategori Responden						Total	
		Lancar		Kurang Lancar		Macet			
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Mendapatkan surat teguran	-		14	100	14	100	28	53,8
2	Tidak mendapatkan surat teguran	24	100	-		-		24	46,2
Total		24	100	10	100	13	100	52	100

Dari Tabel 26 terlihat pada strata kurang lancar dan strata macet seluruh anggotanya mendapatkan surat teguran, dimana seluruh anggota pada strata kurang lancar dan macet tidak membayar angsuran kredit sampai waktu yang ditentukan bahkan melebihi batas waktu pengembalian yang diberikan oleh pengurus LKM-A, Kondisi diatas menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tidak tegas tidak mempengaruhi kelancaran dalam pengembalian kredit

Sehingga dapat disimpulkan sanksi keterlambatan yang diberikan dengan memberikan surat teguran tidak membuat anggota yang menunggak dan macet mau mengembalikan kreditnya pada LKM-A sehingga sanksi tersebut tidak berpengaruh terhadap pengembalian kredit oleh anggota LKM-A.

Dari hasil yang didapatkan pada ketiga variabel tersebut yang masuk pada faktor mekanisme pembiayaan menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari ketiga variabel tersebut dalam mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor mekanisme pembiayaan tidak berpengaruh dalam pengembalian kredit oleh anggota LKM-A Masra.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk pelaksanaan pengelolaan Kredit PUAP yang di dalamnya meliputi:
 - a) Proses penyaluran kredit PUAP oleh anggota LKM-A Masra diawali dengan penyeleksian anggota, sosialisasi kepada anggota, menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota, besar kredit yang diberikan, serta besarnya bunga yang dibebankan. Namun belum sepenuhnya proses tersebut sesuai dengan petunjuk teknis PUAP.
 - b) Tingkat pengembalian kredit anggota LKM-AMasra adalah sebagian besar kurang lancar dan macet. Pengembalian dilakukan jangka waktu 10-12 bulan, Cara pengembalian kredit yang dilakukan adalah pembayaran kredit lebih banyak adalah dijemput oleh pengurus, Waktu pengembalian kredit yang paling banyak dipilih oleh anggota adalah pada awal bulan, Tempat pengembalian kredit adalah di dalam kantor/ rumah pengurus. Penggunaan dan kredit oleh anggota berdasarkan RUA adalah untuk usaha produktif. Sistem kontrol dan pengawasan yang rendah untuk Ketua kelompok masing- masing serta pemangku kepentingan namun cukup tinggi dari PPL dan PMT, dan pertemuan kelompok yang jarang untuk LKM-A Masra
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit adalah Perilaku dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan, kemauan, dan kemampuan anggota maka semakin rendah kemacetan kredit. Sementara faktor profil usaha dan mekanisme pembiayaan tidak berpengaruh dalam pengembalian kredit oleh anggota ke LKM-A.

5.2. Saran

1. Agar pengelolaan kredit oleh LKM-A sesuai petunjuk teknis PUAP maka perlu ditingkatkan pengawasan dan penyediaan insentif bagi pengelola agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Berdasarkan temuan diatas, maka di sarankan agar anggota LKM-A Masra ditingkatkan pengetahuannya mengenai ketentuan yang ada dalam LKM-A dan perkreditan, selain itu kredit mesti disalurkan ke masyarakat yang usahanya berpotensi untuk berkembang dengan memperhatikan karakteristik penerima.



DAFTAR PUSTAKA

- Asyik, A. 1999. *Efektifitas Program Pembangunan Pedesaan di Sumbar*. Laporan Penelitian BAPPEDA. Sumbar. Padang
- Anoraga, Panji dan Widiyanti, Ninik. 1995. *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Anwari, Widodo. 2009. *Dana Rp. 100 Juta untuk PUAP*. http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=279%3Adana-rp-100-juta-untuk-puap&catid=208%3Aberita-pertanian&Itemid=221. [11/03/2010].
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Analisis Kebijakan Pertanian 4 (2): 146-164.
- Ashari. 2009. *Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian 7 (1): 21-42.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Daerah Kota Padang 2010*. BPS Sumatera Barat. Padang
- [BPTP] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. 2008. *Petunjuk Pelaksanaan Program PUAP di Sumatera Barat*. Padang. BPTP dan Pemda Sumatera Barat. 30 hal.
- _____. 2009. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PUAP di Sumatera Barat*. Padang. BPTP dan Pemda Sumatera Barat. 47 hal.
- Delfi, Akmaliza. 2010. *Studi Komparatif Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Di Kelompok SPP Beringin Sakti dan Aster Biru Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi. Universitas Andalas Padang.
- Departemen Pertanian. 2002. *Pedoman Umum Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2002*. Jakarta : Departemen Pertanian.
- _____. 2008. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)*. Jakarta : Departemen Pertanian.
- _____. 2009. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta. Departemen Pertanian. 27 hal.
- Dewi, Weni Zetrika. 2008. *Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari tahun 2007 di Nagari Parit Malintang, Kab. Padang*

Pariaman (Studi Kasus : Masyarakat Menerima Kredit Mikro Nagari). Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas.

Downey, W, David dan Erickson, Steven P. 1989. *Manajemen Agribisnis*. Erlangga. Jakarta.

Eaton. J.W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*. (ed).UI Press. Jakarta

Gapoktan Harapan Jaya, 2009. *Laporan Tahunan LKM-A Harapan Jaya*. Padang.

_____, 2009. *AD/ART LKM-A Masra*. Padang.

_____, 2009. *Profil Gapoktan Harapan Jaya*. Padang.

Hadiwidjaya dan Rivai Wirasaamita. 2000. *Analisa Kredit (Dilengkapi Talaah Usu) Pionir Jaya : Bandung*

Haloho, Fransiscus.2010. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Mikro PT BPD Jabar Banten KCP Dramaga*". Skripsi. Institut Pertanian Bogor .

Handayani, Sri Putri. 2010. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit PKPS-BBM pada Koptan Saiyo dan Koptan Sejahtera Abadi*". Skripsi Universitas andalas padang.

Handoyo, Mastuti. 2009. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah untuk UMKM Agribisnis pada KBMT Wihdatul Ummah Kota Bogor*". Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/14054/H09mha.pdf?sequence=2>

Helmi, Efrida. 2006. *Perbandingan Kriteria Kemiskinan Menurut Pemerintah Dengan Masyarkat Miskin dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Miskin di Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang [Skripsi]*. Padang. Universitas Andalas.

Hendayana, R dan Bustamam, S. 2008. *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dana Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan*.
http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/Semnas4Des07_MP_A_Rachmat.pdf. [18/02/2010].

Horizon. 2006. *UKM dan Koperasi dari Bank Hingga Premanisme*.
www.Depkop.go.id

Israel, Arturo. 1990. *Pengembangan Kelembagaan; Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Jakarta. LP3ES.
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_13/artikel_1.htm. [18/02/2010].

- Ismawan, Bambang. 2003. *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. II - No. 1.
- Kasmir. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Kartonegoro, Sentoso. 1994. *Manajemen Organisasi*. Widya Press. Jakarta
- Kartasapoetra, G. 1993. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Penerbit Rhinegara Cipta. Jakarta.
- _____. 2003. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Penerbit Rhinegara Cipta. Jakarta
- Kementrian Pertanian. 2010. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta. Departemen Pertanian. 40 hal.
- Krishnamurti, B. 2003. *Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan*. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 2- Juni 2006.
- Mayrowani, Henny. 2008. *Evaluasi Kebijakan Subsidi Benih Jagung (Kasus Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan)*. Analisis Kebijakan Pertanian 6 (3): 256-271.
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. P3PK. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Mubyarto. 1987. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta. LP3ES.
- Mustika.F.S. 2000. *Analisa Penyaluran dan Pengembalian Kredit Usaha Tani (KUT) Pada Pola Khusus Pada KUD Sundatar di Kecamatan Lubuk Sikaping*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Unand. Padang.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Notoatmodjo, S. 2003. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.<http://forbetterhealth.wordpress.com/2009/04/19/pengetahuan-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi/>
- Petunjuk tehnik, LKM-A Agribinis. 2010. *Pedoman dan Modul Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis pada Gapoktan PUAP*. Kementrian Pertanian. Jakarta
- Subejo. 2007. *Memahami dan Mengkritisi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Analisis Kebijakan, Jurnal STTP. <http://subejo.staff.ugm.ac.id/wp-content/analisis-kebijakan-jurnal-sttp:2007.pdf>

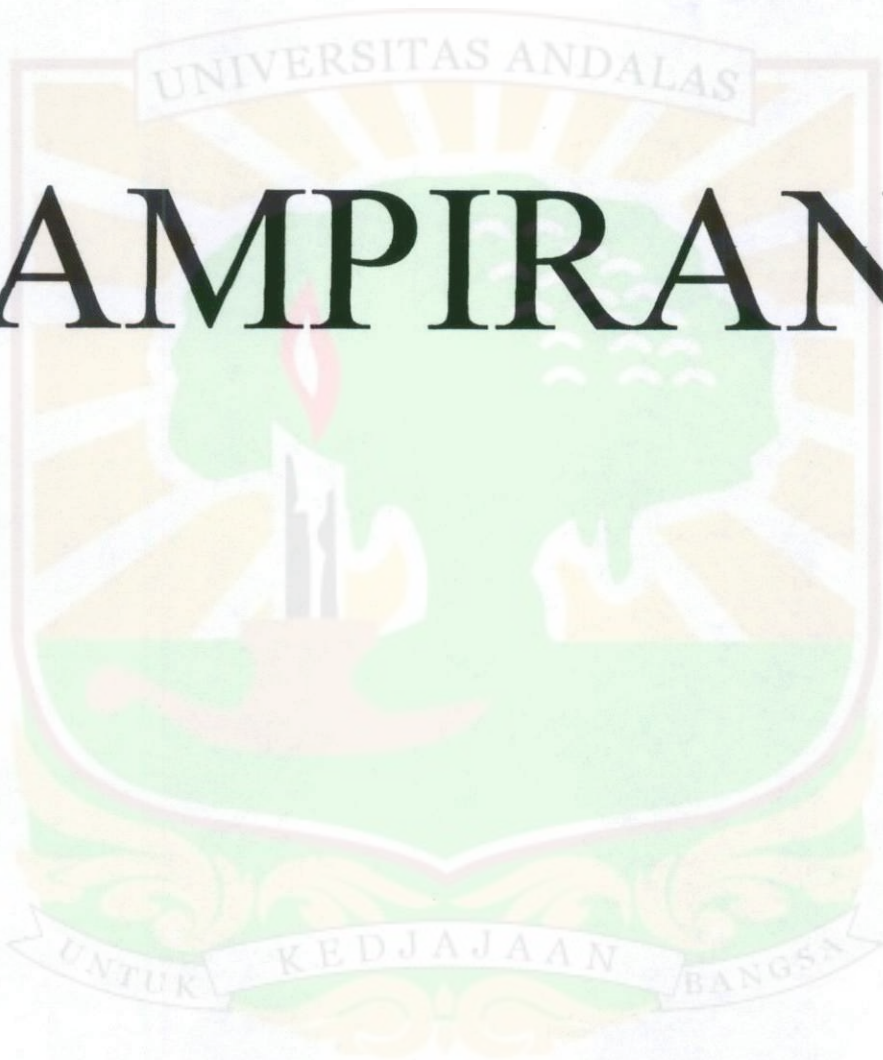
- Silalahi, Herlina Erawati. 2008. *Analisis Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usaha Tani Anggota (Studi Kasus : KSU LKM-A Sukma Karsa Jorong Sariak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 138 hal.
- Sinungan, M. 2000. *Manajemen Dana Bank*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sukmadi dan Sudrajat, 1994. *Mengajukan dan Mengelola Kredit Usaha Tani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 2003. *Optimalisasi Unit Pengelola Keuangan dalam Perguliran Dana sebagai Modal Usaha*. <http://suniscome.50webs.com/data/download/006%20Optimalisasi%20UPKD.pdf>. [18/02/2010].
- Suyatno T, Chalik, Sukada, Ananda YT dan Marala DT. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 126 hal.
- Suyono. 1996. *Koperasi Dalam Sorotan Pers Agenda Yang Tertinggal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Tantawi, Ahmad Rafiqi, dan Suhendi 2009. *Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pengembalian Dana Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) pada Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*. Tesis. Universitas Medan Area. Sumatera utara.
- Trisna Ulfatmi. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pinjaman Bergulir Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi. Universitas Andalas Padang.
- Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi : Yogyakarta
- Usman, Syaikhu, Darmono dan Riantono . 2004. *Laporan Lapangan : Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Indonesia
- Wadi, Syahrul. 2010. *Analisis Fungsi LKM-A "Suri Indah" Gapoktan Sinamar dalam Mengelola Dana Program BLM-PUAP Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota*. Skripsi. Universitas Andalas Padang.
- Walpole. E. Ronald. 1992. *Pengantar Statistika*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. hal 201.
- Widodo S. 2008. *Kelembagaan Kapital Sosial dan Pembangunan*. [terhubung berkala]. <http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/kelembagaan-kapital-sosial-dan-pembangunan/>

- Wijono, W.W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Sakah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, edisi Khusus.ed. [18/02/2010]
- Yasri, Muhammad 1991. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Tani pada KUD Trinari Kec Salimpaung dan KUD Sarasah Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*. Tesis. Universitas Andalas Padang.



UNIVERSITAS ANDALAS

LAMPIRAN



Lampiran 1. Kuota Lokasi Penerima PUAP Menurut Provinsi tahun 2008

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kuota Desa
1	NAD	19	600
2	Sumatera Utara	19	475
3	Sumatera Barat	12	208
4	Riau	10	182
5	Jambi	9	208
6	Bengkulu	9	292
7	Sumatera Selatan	12	369
8	Lampung	9	269
9	Bangka Belitung	6	63
10	Kepulauan Riau	4	54
11	DKI Jakarta	4	15
12	Jawa Barat	19	529
13	Jawa tengah	30	987
14	D.I. Yogyakarta	4	127
15	Jawa Timur	30	987
16	Banten	5	138
17	Bali	9	137
18	NTB	8	220
19	NTT	18	522
20	Kalimantan Barat	11	244
21	Kalimantan Tengah	13	225
22	Kalimantan Timur	10	239
23	Kalimantan Selatan	11	355
24	Sulawesi Utara	9	214
25	Sulawesi Selatan	20	417
26	Sulawesi Tenggara	10	315
27	Sulawesi Barat	4	110
28	Gorontalo	5	134
29	Maluku	7	195
30	Maluku Utara	6	145
31	Papua Barat	8	230
32	Papua	20	505
33	Sulawesi Tengah	9	290

Sumber : (Kebijakan Teknis Program PUAP. 2008)

Lampiran 2. Jumlah Gapoktan, LKMA dan Petani dalam Program PUAP di Sumatera Barat

No	Kabupaten/kota	Tahun 2008		Tahun 2009		Jumlah Gapoktan /LKMA	Jml.petani pelaksana	PMT
		Gapoktan	LKMA	Gapoktan	LKMA			
1	Dharmasraya	10	10	15	15	25	1.902	1
2	Pessel	30	30	30	30	60	5.675	2
3	Sijunjung	27	27	20	20	47	4.509	3
4	Agam	10	10	35	35	45	3.235	1
5	Pasaman	12	12	15	15	27	2.037	1
6	Pas Barat	10	10	32	32	42	2.797	1
7	50-Kota	42	42	32	32	74	7.000	3
8	Solsel	11	11	18	18	29	2.462	1
9	Solok	17	17	28	28	45	5.868	1
10	Pd-Pariaman	22	22	26	26	48	3.302	2
11	Tanah Datar	13	13	25	25	38	2.821	1
12	Ko.Padang	-	-	19	19	19	1.178	1
13	Ko-Pariaman	-	-	26	26	26	1.846	1
14	payakumbuh			8	8	8	560	1
	Jumlah	204	204	329	329	533	45.192	20

(Sumber : Sekretariat PUAP SUMBAR, 2009)



Lampiran 3. Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2009.

NO	NAMA GAPOKTAN	KELURAHAN	KECAMATAN	PENGURUS		
				KETUA	SEKRETARIS	BENDAH ARA
TAHAP I						
1.	Jaya Bersama	Batipuh Panjang	Koto Tengah	Hamzah	Hanafi	Nilawani
2.	Agro Floris	Lb.Minturun S. lareh	Koto Tengah	Jamaris	Syafruddin	Darmiwilis
3.	Harapan Bersama	Limau Manih	Pauh	Yuherman SE	Maizan	Nurhayati
4.	Harapan Jaya	Gurun Laweh	Nanggalo	Ramli RB	Mukhlis	Adek
5.	Harapan Bundo	Lubuk Lintah	Kuranji	Yulisman	Firdaus Syam	Lasmitasari
6.	Batu Gadang Bersama	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	Basri Dt. Rj Usali	Gustina	Yumasri
7.	Sepakat	Kurao Pagang	Nanggalo	Jumlisman	Yumasri	Nurhayati.
TAHAP II						
1.	Fajar Mahkota	Koto Panjang ikur Koto	Koto Tengah	Hafardi	Afrizal	Harni Daswita
2.	Ceno Pulai	Koto Pulai	Koto Tengah	Jafrizal, SPt	Drs. Yurman	Masdaneli
3.	Ambacang Sakato	Pasar Ambacang	Kuranji	Chandra EP	Azwarman	Nurbaiti
4.	Sungai Sapih Jaya	Kel. Sungai Sapih	Kuranji	Desrizal	Zainal Hakim	Nuriya, Spd
5.	Sarik Sati	Gunung Sarik	Kuranji	Zalmadi	Hasan Basri Karim	Fauziati
6.	Sarumpun Boneh	Surau Gadang	Nanggalo	Zainal	Yulia Berti	Burhan
7.	Sejahtera	Kalumbuk	Kuranji	Erman R	Suardi	Zarkasi
8.	Cupak Sepakat	Cupak Tengah	Pauh	Syamsuwirma n	Asrul Wahab Rj. Mangkuto	Bustami
9.	Pisang Sakato	Pisang	Pauh	Masrizal	Ali nursal	Syahrial Sibar
10.	Kapalo Koto Basamo	Kapalo Koto	Pauh	Zainal, RS	Desmawati	M. Yusuf
11.	Minang Sakato	Lambung Bukit	Pauh	Irman, SE	Jonaidi	Suar Taher
12.	Tigo Sarimpun	Panggambiran Ampalu Nan XX	Lb. Bagalung	Syafrizal, SE	Ir. Sugianto	Alwis

Sumber : Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Nanggalo Kota Padang, 2009

NO	Nama Gapoktan/LKM-A tahun	Kec/kel	Jumlah poktan/anggota	Jumlah penerima	Ketua gapoktan/manager LKM-A	Realisasi penyaluran dana ke petani(orang)					Perkembangan dana/aset LKM-A (Rp000)
						1	2	3	4	5	
1	Agrofloris 2008	Koto tengah/ Lubuk minturun	11/178	79	Jamaris/rustam	22	2	1	3	24	176,260
2	Batu gadang bersama 2008	Lubuk kilangan/batu gadang	6/288	126	Basril.dt.rj.usali/syafril	51	7	-	10	80	207,000
3	Harapan bersama 2008	Pauh/limau manis	3/49	47	Herman/aisyah	30	5	-	6	10	111,600
4	Harapan Bundo 2008	Kuranji/lubuk lintah	3/92	59	Yulisman/syamsurizal	28	-	-	8	23	253,690
5	Harapan Jaya 2008	Nanggalo/gurun lawas	3/99	54	Ramli/fitra hadi	29	3	1	10	11	89,500
6	Jaya bersama 2008	Koto tengah/ batipuah panjang	8/288	156	Hamzah/Masriadi	13 5	-	-	-	21	200,400
7	Sepakat 2008	Nanggalo//kuraop pagang	6/158	68	Jumlisman/dam huri	41	8	-	8	11	204,000
TAHAP II TAHUN 2009											
8	Ambacang sakato 2009	Kuranji/pasar ambacang	9/51	35	Candra eka putra/marizal	27	-	-	5	3	61,750
9	Ceno pulai 2009	Koto tengah/koto pulai	6/245	60	Jafrizal/matjon	60	-	-	-	-	112,450
10	Cupak sepakat 2009	Pauh/cupak tengah	2/85	37	Syamsuwirman/yusvi Diana	20	1	-	2	14	103,750
11	Fajar mahkota 2009	Koto tengah/koto panjang ikua koto	8/447	82	Havardi/iflianto	20	14	-	5	43	163,000

	basamo 2009										
13	Minang sakato 2009	Pauh/ lambuang bukik	5/197	42	Irman/randi anggara	41	2	-	2	-	45,680
14	Pisang sakato 2009	Pauh/pisang	6/278	14	Masrial/ali nursal	19	-	-	-	-	60,500
15	Sarik sati 2009	Kuranji/ gunuang sariak	4/161	54	Zaimadi/sudirman	33	1	-	7	13	87,500
16	Sarumpun boneh	Nanggalo/ surau gadang	3/77	149	Zainal/muslim rajo mangkuto	39	-	-	-	136	260,200
17	Sungai sapieh jaya 2009	Kuranji/ sungai sapieh	4/139	75	Desrizal/sri mitrawati	36	3	-	6	30	122,700
18	Sejahtera 2009	Kuranji/ kalumbuk	3/220	60	Erman.r/isrra nurahmi	38	-	3	-	19	125,500
19	Tigo sarumpun 2009	Lubuk begalung/pengambiran ampalu	3/88	96	Syafrizal/syamsudir	75	-	-	-	21	112,095

Sumber: PMT Kota Padang 2010

Ket :

- 1 = (Tanaman Pangan)
 2 = (Tanaman Holtikultura)
 3 = (Tanaman Perkebunan)

- 4 = (Peternakan)
 5 = (Off-Farm) meliputi 1.5- 1.7



Lampiran 5. Nama anggota peminjam Dana PUAP di (LKM-A Masra) HARAPAN JAYA Per Desember 2010

NO	NAMA	Besar Pinjaman	Angsuran	Simpanan wajib	Simpanan pokok	Sisa hutang	Tunggakkan (bulan)	Keterangan
1	Mayarni	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
2	Rosma Nengsih	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
3	Rosni	1.500.000	900.000	15.000	100.000	650.000	4	K. lancar
4	Armison	1.500.000	1.050.000	40.000	100.000	450.000	3	K. Lancar
5	Samsul Hamidi	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
6	Nurcaya	1.500.000	600.000	30.000	100.000	900.000	6	K lancar
7	Sandra dewi	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
8	Fitrahadi	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
9	Nurhaida	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
10	Sapinah	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
11	Kurnia	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
12	Marlis Elita	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
13	Yusnidar	1.500.000	-	15.000	100.000	1.500.000	10	Macet
14	Anas	1.500.000	600.000	40.000	100.000	900.000	6	K. Lancar
15	Yusrizal	1.500.000	450.000	30.000	100.000	1.050.000	7	Macet
16	Zaharuddin	1.500.000	1.500.000	10.000	100.000	-	-	Lancar
17	Jir nawari	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
18	Amri	1.500.000	450.000	30.000	100.000	1.050.000	7	Macet
19	Anidar	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
20	Nuraini	1.500.000	1.200.000	35.000	100.000	300.000	2	Lancar
21	Rudi Kharimuzah	1.500.000	600.000	30.000	100.000	900.000	6	K. Lancar
22	Reni Anggraini	1.000.000	1.000.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
23	Joni Murba	1.500.000	-	15.000	100.000	1.500.000	10	Macet
24	Ilyas Anwar	1.500.000	1.050.000	50.000	100.000	450.000	3	K. Lancar
25	Prima Elfira	1.500.000	1.050.000	50.000	100.000	450.000	3	K. Lancar
26	Muslinda	1.500.000	450.000	20.000	100.000	1.050.000	7	Macet
27	Elma Yeni	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
28	Samsir	1.500.000	600.000	35.000	100.000	900.000	6	k. lancar

29	Marjohan	1.500.000	750.000	30.000	100.000	750.000	5	K. Lancar
30	Yulidar	1.500.000	900.000	55.000	100.000	600.000	4	K. Lancar
31	Zulkifli	1.500.000	-	15.000	100.000	1.500.000	10	Macet
32	Roni andani	1.500.000	1.050.000	50.000	100.000	450.000	3	Lancar
33	Budi Shahrial	1.500.000	1.350.000	60.000	100.000	150.000	1	Lancar
34	Yuliar	1.500.000	600.000	35.000	100.000	900.000	6	K. Lancar
35	Amsir. M	1.500.000	-	15.000	100.000	1.500.000	10	Macet
36	Syarifudin	1.500.000	-	15.000	100.000	1.500.000	10	Macet
37	Yusrizal. Ujang	1.500.000	750.000	30.000	100.000	750.000	5	K. Lancar
38	Mukhlis	1.500.000	1.200.000	40.000	100.000	300.000	2	Lancar
39	Harpin	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
40	Netti	1.500.000	600.000	40.000	100.000	900.000	6	K. Lancar
41	Rustam	1.500.000	1.500.000	40.000	100.000	-	-	Lancar
42	Rayusdi	1.500.000	1.500.000	60.000	100.000	-	-	Lancar
43	Yuniar	1.500.000	450.000	40.000	100.000	1.050.000	7	Macet
44	Frinaldi	1.500.000	1.050.000	50.000	100.000	450.000	3	Lancar
45	Irman	1.500.000	300.000	30.000	100.000	1.200.000	8	Macet
46	Mukhlis/ by pomo	1.500.000	450.000	35.000	100.000	1.050.000	7	Macet
47	Ali ramlan	1.500.000	150.000	30.000	100.000	1.350.000	9	Macet
48	Sulaiman	1.500.000	1.350.000	50.000	100.000	150.000	1	Lancar
49	Nofri Yanti	1.500.000	900.000	55.000	100.000	600.000	4	K. Lancar
50	Awet . in	1.500.000	1.050.000	45.000	100.000	450.000	3	Lancar
51	Zainal adek	1.500.000	-	10.000	100.000	1.500.000	10	Macet
52	Fitria	1.500.000	450.000	20.000	100.000	1.050.000	7	Macet

Sumber : LKM-A HARAPAN JAYA, 2010 (Data diolah)



Lampiran 6. Matriks Data Set Penelitian

Tujuan	Variabel	Indikator	Data dan Sumber data	Analisis data	Teknik pengumpulan data
1. Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan dana LKM-A Harapan Jaya Kota Padang Periode 2008-2011	1. Profil LKM-A Harapan Jaya	a. Gambaran umum wilayah kerja LKM-A b. Sejarah dan Tujuan berdiri c. Organisasi d. Permodalan e. Keanggotaan f. Usaha, produk dan perkembangannya.	Data primer, sekunder dan dari laporan data LKM-A	Deskriptif kualitatif	Wawancara dengan key informan, studi kepustakaan (laporan buku profil dll)
	2. Pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A	a) Dilihat dari proses penyaluran kredit BLM PUAP pada LKM-A Harapan Jaya. meliputi: A. Realisasi pencairan dana BLM-PUAP kepada anggota <ul style="list-style-type: none"> • Proses seleksi anggota calon penerimaan kredit • Proses sosialisasi kepada anggota calon penerimaan kredit • Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk menerima kredit • Besarnya kredit yang diberikan pada anggota penerima • Besar bunga yang dibebankan pada anggota penerima kredit b. Sistem pengembalian kredit <ul style="list-style-type: none"> • Jangkawaktu pengembalian kredit • Cara penagihan kredit • Kesesuaian waktu perolehan pendapatan dengan waktu pengembalian kredit • Tempat pengembalian kredit • Waktu pengembalian kredit 			

		<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana oleh anggota c. Pengawasan dan kontrol			
2. Mengetahui faktor-faktor mempengaruhi pengembalian dana PUAP oleh anggota LKM-A harapan jaya kec nanggalo kota padang.	a. Faktor perilaku b. Faktor profil usaha c. Faktor mekanisme pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahu 2. Mau 3. mampu <ol style="list-style-type: none"> 1. alokasi penggunaan dana 2. keadaan usaha 3. Pengalaman Kredit <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak rumah pemijam dengan tempat pembayaran kredit. 2. Pengelolaan administrasi dan Pembukuan oleh pengurus dalam pembayaran kredit tiap bulan 3. Sanksi keterlambatan 	Data primer, sekunder dan laporan data LKM-A	Deskriptif kualitatif	Wawancara Dengan Key informant, Respon Anggota, Studi Kepustakaan, Data/ Laporan Dari Lkm-A



Lampiran 7. Data jumlah masyarakat miskin kelurahan gurun lawas sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008

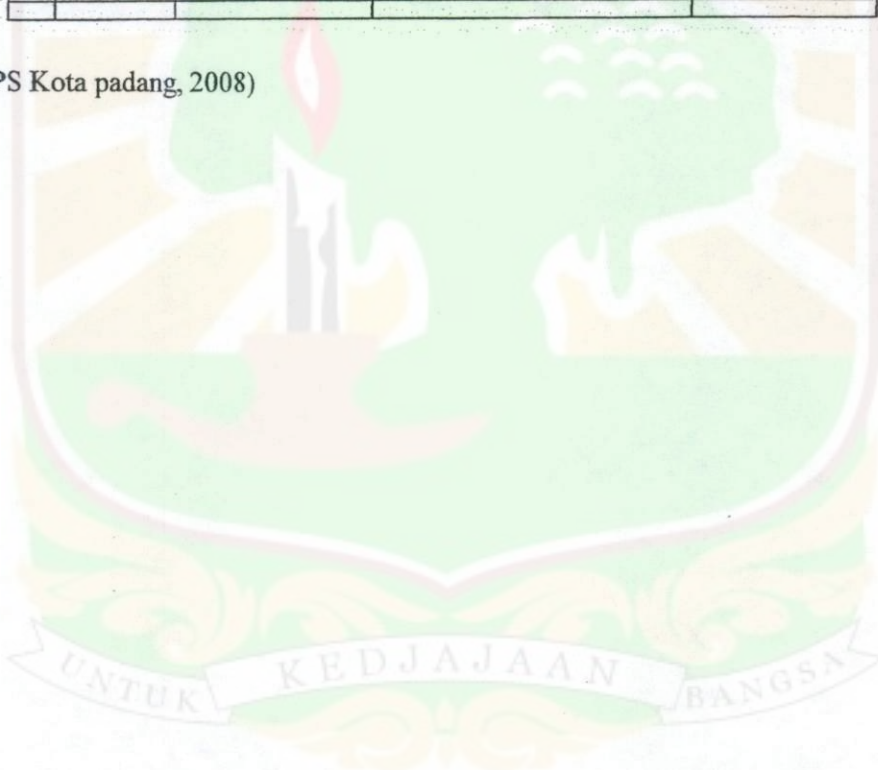
KECAMATAN : NANGGALO
KAB/KODYA : PADANG Tanggal 25-11-2008

1	2	3	4	5
KELURAHAN : GURUN LAWEH				
1	137108000200002	AMAD	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
2	137108000200003	MASRI	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
3	137108000200004	GAPUR	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
4	137108000200005	ZULBAKRI	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
5	137108000200006	ASNI	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
6	137108000200007	ENON	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
7	137108000200008	YUSMAR EMEN	JL KAMPUNG KOTO NO 25 RW I RT 01	GURUN LAWAS
8	137108000200009	BURHANUDIN	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
9	137108000200010	ANTON	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
10	137108000200011	AMIR/IMAN	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
11	137108000200012	STAFRIL INJIN	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
12	137108000200013	HASN BASRI MAGEK	JL KAMPUNG KOTO NO 24 RW I RT 01	GURUN LAWAS
13	137108000200014	MUCHDAR	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 01	GURUN LAWAS
14	137108000200017	IMAN BUDUIK	JL KP KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
15	137108000200018	SIIN LITA NEWAN	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
16	137108000200019	IMAR PIKAJI	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
17	137108000200020	ISAWIR /OYON/MINAH	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
18	137108000200021	NASRUL M/OPET KICUN	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
19	137108000200022	IMAN SIDI	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
20	137108000200023	SYAFRIZAL	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
21	137108000200025	RAKINAS	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
22	137108000200026	KASNI /CILIN	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
23	137108000200028	MASRI/AMAK MINAH	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
24	137108000200029	UWAR	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
25	137108000200030	ANTON SUJIRWO	JL KAMPUNG KOTO RW I RT 02	GURUN LAWAS
26	137108000200031	KERI	RW II RT 01 RW II RT 001	GURUN LAWAS
27	137108000200032	JAWARTI	RW II RT 1 RW II RT 001	GURUN LAWAS
28	137108000200033	NURAINA	RT 1 RW 2 RW II RT 001	GURUN LAWAS
29	137108000200034	RAMILAH	RW 02 RT01 RW II RT 001	GURUN LAWAS
30	137108000200035	ISMAEL	RW II RT 1 RW II RT 001	GURUN LAWAS
31	137108000200036	IRAWATI	RW II RT 1 RW II RT 001	GURUN LAWAS
32	137108000200038	ZULKASNI	RW II RT 1 RW II RT 001	GURUN LAWAS
33	137108000200039	JUSNI	RW II RT 1 RW II RT 001	GURUN LAWAS
34	137108000200040	MURNIK	RW II RT 1 RW II RT 001	GURUN LAWAS
35	137108000200041	KAIRUL	RT2 RW2 RW II RT 002	GURUN LAWAS



1	2	3	4	5
76	137108000200085	ELIMAR	GURUN LAWEH RW III RT 01	GURUN LAWAS
77	137108000200086	MISMULIADI	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
78	137108000200087	SYAMSIDAR GODAT	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
79	137108000200088	YUSNI SYAMSIR	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
80	137108000200089	RAJUNAH	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
81	137108000200090	FARHAN	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
82	137108000200091	ZULMI ACIK	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
83	137108000200092	YULISMAR	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
84	137108000200093	AMRIL	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
85	137108000200094	JUFRI	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
86	137108000200095	OSMAN	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
87	137108000200096	SUPRIADI	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
88	137108000200097	ARON	GURUN LAWEH RW III RT 02	GURUN LAWAS
89	137108000200098	IBRAHIM	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
90	137108000200099	ALI AMRAN	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
91	137108000200100	MUSLIM	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
92	137108000200102	ISMAEL	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
93	137108000200103	ZAINAL	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
94	137108000200104	YULIAR	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
95	137108000200105	CANDRA	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
96	137108000200106	EMANETI	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
97	137108000200107	GUSTAMI	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
98	137108000200108	ANASER	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
99	137108000200110	RIDWAN	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
100	137108000200111	SYAMSIR	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
101	137108000200112	BUYUNG PAMO	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
102	137108000200113	PEBRI ARDIOS	LUBUK LANCIANG RW III RT 03	GURUN LAWAS
103	137108000200117	YUSNIDAR	GURUN LAWAS RT 03 RW 02 RW II RT 03	GURUN LAWAS
104	137108000200118	UMAN	GURUN LAWAS RT 02 RW 03 RW III RT 02	GURUN LAWAS

(Sumber : BPS Kota Padang, 2008)



Lampiran 8. Surat penunjukan pengurus LKM-A

SURAT KEPUTUSAN

**GABUNGAN KELOMPOK TANI "HARAPAN JAYA"
KEL.GURUN LAWEH KEC.NANGGALO KOTA PADANG
Nomor :SK.01/GAPOKTAN-HJ/1/2009**

TENTANG :

**PENETAPAN PERSONIL PENGELOLA
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKMA) "MASRA"**

GAPOKTAN Harapan Jaya Kel.Gurun Laweh ,

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka membantu usaha mikro di bidang pertanian dalam mengakses permodalan maka dipandang perlu dibentuk suatu lembaga keuangan yaitu LKMA MASRA.
- Bahwa untuk terarahnya dan kelancaran pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan personil pengelola lembaga tersebut melalui Surat Keputusan Gapoktan Harapan Jaya.

Mengingat :

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Harapan Jaya Unit Usaha Permodalan Gapoktan.

Memperhatikan :

- Hasil musyawarah Gapoktan tentang Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) "Masra" pada tgl.10 Juni 2009 bertempat di Mushalla Nurul Yakin Gurun Laweh.

MEMUTUSKAN**Menetapkan :**

Pertama : Memutuskan dan Menetapkan nama-nama sebagai berikut :

- FITRA HADI, S.TP, jabatan sebagai Manager Umum.
- MAYARNI, jabatan sebagai Manager Administrasi dan Keuangan.

Kedua : Keterangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Januari 2010

Pengurus Gapoktan Harapan Jaya



Sekretaris

[Handwritten Signature]
MUKHLIS

Lampiran 9. Daftar kehadiran Gapoktan di Kota Padang pada pelatihan dan Sosialisasi LKM-A di Baso

Lampiran 9. Daftar Kehadiran Gapoktan di Kota Padang Pada Pelatihan dan Sosialisasi LKM-A di Baso.

No.	Nama Gapoktan	Nama Peserta	Asal
1	Harapan Bundo	Yulisman	Padang
2	Sungai Sapih Jaya	Roby Jasmara	Padang
3	Fajar Mahkota	Ilfianto	Padang
4	Sarik Sati	Sudirman	Padang
5	Batu Gadang Basamo	Rita Erlinda	Padang
6	Minang Sakato	Mira Maifitri	Padang
7	Cupak Sepakat	Yusvi Diana	Padang
8	Ceno Pulau	Purma Dwi Sinta	Padang
9	Kapalo Koto Basamo	Sri Yeni Hartati	Padang
10	Sejahtera	Isra Nurrahmi	Padang
11	Agrofloris Prima	Emilda Aini Kani	Padang
12	Sepakat	Damhuri	Padang
13	Ambacang Sakato	Azwariman	Padang
14	Tigo Sarumpun	Syamsubir	Padang
15	Jaya Bersama	Masriani	Padang
16	Nusantara	Sumardi	Padang
17	Maju Basamo	Ilham Wahyudi	Padang

Sumber : Sekretariat LKM-A Prima Tani Desember 2010



Lampiran 9 . Daftar Kehadiran Gapoktan di Kota Padang Pada Pelatihan dan Sosialisasi LKM-A di Baso.

No.	Nama Gapoktan	Nama Peserta	Asal
1	Serumpun Boneh	Suci Rakhmelita	Padang
2	Sungai Sapih Jaya	Sri Mitra Wati	Padang
3	Fajar Mahkota	Kurnia Nofri	Padang
4	Sarik Sati	Mulyadi	Padang
5	Minang Sakato	Ruswandi	Padang
6	Cupak Sepakat	Dian Kurniawati	Padang
7	Ceno Pulau	Masdaneli	Padang
8	Kapalo Koto Basamo	Mensufriyenni	Padang
9	Sejahtera	Rini Yusnita	Padang
10	Ambacang Sakato	Chandra Eka Putra	Padang
11	Tigo Sarumpun	Ulfa Sarly	Padang
12	Nusantara	Ali Nursal	Padang

Sumber : Sekretariat LKM-A Prima Tani Oktober 2010



Lampiran 10. pencairan dana 100 juta pada LKM-A Masra.

GABUNGAN KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA

KEL.GURUN LAWEH KEC.NANGGALO – PADANG

Alamat : Jl .Gurun Laweh RT-01 RW 02 Kel. Gurun Laweh Kec.Nanggalo Padang

No : 02 /Gapoktan-HJ/I- 2010

Lamp :-

Perihal : **Pencairan Dana PUAP**

Kepada Yth
Ketua Tim Teknis PUAP Propinsi Sumbar

Di Padang

Dengan hormat

Perlu kami informasikan bahwa LKMA MASRA Kelurahan Gurun Laweh Kec.Nanggalo telah mengadakan rapat anggota hari Senin tanggal 14 Desember 2009 dan telah siap melakukan pembiayaan kepada anggota sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Pinjaman	Jadwal Pemanfaatan
1.	Nan Sepakat	35.000.000	Februari 2010
2.	Sumber Harapan	35.000.000	Februari 2010
3.	Tabek Dorom	30.000.000	Februari 2010
	Jumlah	100.000.000,00	

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak untuk menyetujui dan mentransfer dana PUAP ke rekening LKMA Masra di Kantor Kas Bank BRI Siteba Nomor :

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Mengetahui
PPL Gurun Laweh

Padang, 5 Januari 2010
Ketua Gapoktan Harapan Jaya

(DARDANELLY)

(RAMEL RB)



Lampiran 11. Formulir Rencana Usaha Anggota (RUA)

RENCANA USAHA ANGGOTA

Nama anggota :

Jenis usaha :

Volume :

Kebutuhan biaya :

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah

Padang,

Anggota yang Mengusulkan,

()

Lampiran 13 : RUK (a) kelompok tani Tabek Dorom

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

1. Nama Gapoktan : HARAPAN JAYA
2. Nama Kelompok : TABEK DOROM
3. Ketua Kelompok : MUKHLIS

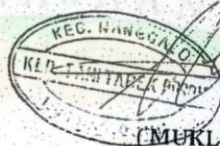
No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Ha, Ekor)	Nilai (Rp)	Jadwal Waktu Pemanfaatan	Tanda Tangan
1	MATINI	T. Pangan	1.1	1 ha	1.500.000		<i>[Signature]</i>
2	PONO	T. Pangan	1.1	1,5 Ha	3.450.000		<i>[Signature]</i>
3	YUSNI	T. Pangan	1.1	1 ha	1.500.000		<i>[Signature]</i>
4	KARTINI	T. Pangan	1.1	1 ha	2.500.000		<i>[Signature]</i>
5	SUDIRMAN	T. Pangan	1;1	1,0 Ha	2.050.000		<i>[Signature]</i>
6	ERY	T. Pangan	1.1	1,0 Ha	1.580.000		<i>[Signature]</i>
7	YUS Gapuk	T. Pangan	1.1	1,0 Ha	1.250.000		<i>[Signature]</i>
8	MUKHLIS	Itik	1.3	60 ekor	3.500.000		<i>[Signature]</i>
9	ZULKIFLI	Ay.Potong	1.3	300 ekor	2.500.000		<i>[Signature]</i>
10	ALNODI	Sapi	1.3	1 ekor	1.750.000		<i>[Signature]</i>
11	JONI	Sapi	1.3	1 ekor	1.750.000		<i>[Signature]</i>
12	HEWALNI	R.Tangga	2.1	-	1.780.000		<i>[Signature]</i>
13	MARAN	Alat Pert	2.3	-	5.000.000		<i>[Signature]</i>
14							
	TOTAL				30.110.000		

Mengesahkan
Penyuluh Pendamping

[Signature]

(Dardanelly, A.Md)
NIP. 080106322

Ketua Kelompok

















(MUKHLIS)

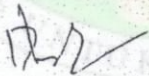
Lampiran 13 (b) : RUK kelompok tani Sumber Harapan

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

7. Nama Gapoktan : HARAPAN JAYA
 8. Nama Kelompok : SUMBER HARAPAN
 9. Ketua Kelompok : MAYARNI

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Praduktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Ha, Ekor)	Nilai (Rp)	Jadwal Waktu Pemanfaatan	Tanda Tangan
1	ANAS	Pangan	1.1	1 ha	2.000.000		
2	BOY	sda	1.1	1 ha	1 000.000		
3	Darwas	Sda	1.1	1 ha	1.500.000		
4	Junedi	sda	1.1	1,5ha	3.000.000		
5	Rosni	Cabe	1.2	0,5	2.000.000		
6	Ermison	sda	1.2	0,5	2.000.000		
7	Desniwati	sda	1.2	0,5	2.000.000		
8	Ramli Rb	Ternak	1.3	500	3.500.000		
9	Sandra	sda	1.3	50	2.000.000		
10	Zulkasni	sda	1.3	50	2.000.000		
11	Mayarni	sda	1.3	100	2.500.000		
12	Khaidir	sda	1.3	1200	7.700.000		
13	Syrifudin	sda	1.3	1	1.000.000		
14	Alriadi	Pemasaran	2.2	-	1.500.000		
15							
16							
17							
18							
19							
	TOTAL				33.700,000		

Mengesahkan
 Penyuluh Pendamping



(Dardanelly, A.Md)
 NIP. 080106322



Lampiran 13 (c) : RUK kelompok tani Nan Sepakat

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

4. Nama Gapoktan : HARAPAN AYA
 5. Nama Kelompok : NAN SEPAKAT
 6. Ketua Kelompok : ZAINAL (ADEK)

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Praduktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Ha, Ekor)	Nilai (Rp)	Jadwal Waktu Pemanfaatan	Tanda Tangan
1	AGUS	Padi	1.1	1 Ha	2.000.000		<i>[Signature]</i>
2	IRMA FITRIA	Sda	1.1	1 Ha	1.750.000		<i>[Signature]</i>
3	UJANG	Sda	1.1	1 Ha	1.750.000		<i>[Signature]</i>
4	IZUL	Sda	1.1	1 Ha	2.000.000		<i>[Signature]</i>
5	YULIDAR	Sda	1.1	½ Ha	1.000.000		<i>[Signature]</i>
6	ZAINAL	Cabe	1.2	1,5 ha	3.507.000		<i>[Signature]</i>
7	YUSRIZAL	Sda	1.2	1.ha	2.200.000		<i>[Signature]</i>
8	SYAFRI, A	Sda	1.2	1 ha	2.599.000		<i>[Signature]</i>
9	AMSIR	Sda	1.2	0,5 ha	1.000.000		<i>[Signature]</i>
10	FITRA HADI	Sda	1.2	1 ha	3,098.000		<i>[Signature]</i>
11	Zaharudin	Ternak	1.3	1000	3.700.000		<i>[Signature]</i>
12	HARPIN	Sda	1.3	52	3.136.000		<i>[Signature]</i>
13	RAMAI	Sda	1.3	1000	2.750.000		<i>[Signature]</i>
14	SYAFINAH	Sda	1.3	50	3.200.000		<i>[Signature]</i>
15	MASRI	Sda	1.3	50	2.500.000		<i>[Signature]</i>
	TOTAL				36.190.000		

Mengesahkan
Penyuluhi.Pendamping

[Signature]
(Dardanelly, A.Md)
NIP. 080106322

Ketua Kelompok



(Zainal Adek)

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Lampiran 14. Rencana Usaha Bersama Gapoktan Harapan Jaya

RENCANA USAHA BERSAMA (RUB)
PUAP

1. Nama Gapoktan : Harapan Jaya
 2. Alamat Gapoktan :
 Kel : Gurun Laweh
 Kec. : Nanggalo
 Kota : Padang
 Prop. : Sumatera Barat
 3. Tanggal Pendirian Gapoktan : 24 Januari 2008
 4. Tanggal Pengukuhan Gapoktan : 3 Juli 2009
 5. Pengurus Gapoktan : Ketua : Ramli RB.
 Sekretaris : Muklis
 Bendahara : Zainal/ADEK.
 6. Nomor rekening Gapoktan : 5475 - 01 - 009468 - 53 - 4
 7. Nama Bank : BRI UNIT SITEBA PADANG
 8. Alamat Bank : JL. Raya Siteba Kec Nanggalo Padang.

No	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor, RT, dll)	Nilai (Rp. 000)
I	Budidaya (On-Farm)		
	1.1. Tanaman Pangan	16 ha	29.830.000.
	1.2. Hortikultura	6.5 ha	18.404.000
	1.3. Peternakan	4315 ekor	43.486.000
	1.4. Perkebunan	-	-
II	Non Budidaya (Of-Farm)		
	2.1. Industry Rumah Tangga Pertanian	1 Rt	1.780.000
	2.2. Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan, dll)	1 Rt	1.500.000
	2.3. Usaha Lain Berbasis Pertanian	1 Rt	5.000.000.
	TOTAL		100.000.000

Disetujui
Ketua Tim Poknis PUAP Kota Padang

Ir. ASNEL M.Si

NIP.1959011419850091001

Ketua Gapoktan Harapan Jaya

Ramli RB

Lampiran 15. Surat ketentuan pinjaman.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
L K M A M A S R A
 Kel.Gurun Laweh Kec.Nanggalo Padang

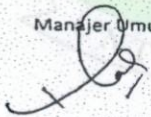
Gr.Laweh, Januari 2009

Ketentuan Umum Usaha Pinjaman LKMA MASRA :

1. Nasabah yang berhak meminjam adalah anggota kelompok tani atau anggota khusus Gapoktan Harapan Jaya yang telah membayar Simpanan Pokok(SIMPOK) sebesar Rp.100.000,- dan Simpanan Wajib(SIMWA) sebesar Rp. 5.000,-per bulan.
2. Besaran pinjaman ditentukan oleh keputusan manajemen LKMA Masra, untuk luncuran pinjaman tahap awal ini adalah berkisar Rp.500.000,- s.d Rp.1.500.000,-. Dibedakan berdasarkan luas lahan olahan/usaha yang dimiliki.
3. Jangka waktu pengembalian pinjaman 6 (enam) bulan atau habis masa panen.
4. Pengembalian pinjaman terdiri dari :
 - Angsuran pokok per bulan atau pembayaran sekaligus 6 bulan / masa panen.
 - Uang jasa sebesar 1 % dari jumlah pinjaman.
5. Nasabah harus mempunyai jaminan berupa :
 - watak bisa dipercaya,
 - usaha agribisnis yang dikelola,
 - aset-aset lainnya.
6. Nasabah harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua Kelompok Tani yang bersangkutan.
7. Bagi anggota yang meminjam dana Program PUAP LKMA Masra untuk pengelolaan usaha produksi padi, dianjurkan untuk dapat menjual hasilnya kepada Gapoktan Harapan Jaya.
8. Syarat-syarat pengajuan permohonan pinjaman
 - Foto KTP dan KK,
 - Surat permohonan pinjaman suami isiri yang telah direkomendasikan oleh Ketua Poktan. (Form.1 PJ)
 - Lampiran Form 2.PJ .Daftar Usaha Nasabah, diketahui oleh Ketua Poktan,
 - Surat Akad/Perjanjian Pinjaman.(Form.3 PJ)
9. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan pinjaman belum dapat dilunasi, maka nasabah yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - Diselesaikan secara asas kekeluargaan.
 - Dilakukan penyitaan terhadap asset rumah tangga yang ada.
 - Diproses secara hukum menurut pengadilan negeri setempat.
 - Nasabah yang bersangkutan diblacklist dan dinyatakan tidak mendapatkan pinjaman serupa dan bantuan apapun dari program pemerintah lainnya.
10. Ketentuan-ketentuan lain dalam usaha pinjaman LKMA dapat ditambahkan kemudian hari bilamana diperlukan.

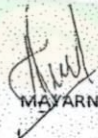
Pimpinan LKMA Masra

Manajer Umum



FITRA HADI R. ENDAH

Manajer Keuangan/Adm



MAYARNI

Lampiran 16. Surat rekomendasi anggota

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS

L K M A M A S R A

Kel. Gurun Laweh Kec. Nanggalo Padang
 Jl. Gurun Laweh RT.01 RW.02 Kel. Gurun Laweh Kec. Nanggalo Padang Phone. 0751-7815666

"SURAT PENGAKUAN"

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Umur :
 No. KTP :
 Pekerjaan :
 No. Telp / HP :

Dan mendapatkan persetujuan dari Suami / Istri / Ortu :

Nama :
 Alamat :
 Umur :
 No. KTP :
 Pekerjaan :
 No. Telp / HP :

Telah melakukan pembiayaan / pinjaman sebanyak Rp. kepada LKMA Masra Kel. Gurun Laweh Kec. Nanggalo dengan ketentuan sebagai berikut :

- Yang berhutang harus membayar provisi sebesar 1% dari pinjaman diatas yaitu 1% x X Rp. = Rp.
- Biaya administrasi sebesar Rp.- dibayar tunai waktu realisasi.
- Atas pinjaman ini dikenakan uang jasa sebesar 1% setiap bulan dari pokok pinjaman.
- Atas pinjaman ini harus dibayar kembali dalam 10x angsuran pokok atau musim panen dan bunga setiap 1 (satu) bulan / musim panen

Demikianlah surat pengakuan hutang ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

Yang Menyetujui
 Suami/Istri/Ortu *

Padang, 20...
 Yang Berhutang

(.....)

(.....)

Diketahui
 Ketua POKTAN

(.....)

Lampiran 17. Surat persetujuan pinjaman

Kepada Yth.
Pimpinan LKMA MASRA Gr.Laweh Nanggalo
 Di
 Nanggalo

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat rumah :
 No.KTP :
 HP/Telpon :
 Jenis Usaha :
 Jenis permohonan : Baru / Lama *
 Pinjaman sebelumnya : Rp. (Jangka waktu : bulan)

Bersama ini saya mengajukan permohonan pinjaman kepada Pimpinan LKMA Masra Gurun Laweh Naggalo sebesar **Rp**
 (..... rupiah),
 dengan jangka waktu (.....) bulan.

Adapun keperluan pinjaman ini adalah untuk :

1.
2.
3.

Sebagai penjelasan dari permohonan tersebut di atas, saya lampirkan pula surat-surat/keterangan yang terdiri dari :

1. Fotocopy KTP Suami/istri (1 lembar)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar)
3. Pas Photo 3x4 (1 buah)
4.

Disamping itu saya berjanji akan mematuhi semua syarat-syarat/ketentuan pemberian pinjaman yang berlaku pada LKMA MASRA.

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Diketahui Suami/istri/orang tua* Gr.Laweh, tgl.....
 Saya yang memohon

Ketua RW : Direkomendasikan oleh :
 Ketua RT...../ RW Ketua Kelompok Tani :

*Coret yang tidak perlu.

Lampiran 18. surat pengakuan hutang

"SURAT PENGAKUAN HUTANG"

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Umur :
 No. KTP :
 Pekerjaan :
 No. Telp / HP :

Dan mendapatkan persetujuan dari Suami / Istri / Ortu*:

Nama :
 Alamat :
 Umur :
 No. KTP :
 Pekerjaan :
 No. Telp / HP :

Telah BERHUTANG kepada LKMA Masra Kel. Gurun Laweh Kec. Nanggalo atas pinjaman sebanyak Rp....., (..... rupiah), dan berjanji memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Pinjaman harus dibayar setiap bulan yang terdiri dari :

- Angsuran pokok = Rp
 - Uang jasa 1% = Rp
 - Simpanan wajib = Rp 5.000 +
 Rp

b. Dikenakan denda atas keterlambatan angsuran dari tanggal jatuh tempo sebesar 0.25 % (nol koma dua puluh lima persen) per bulan dari nilai total pinjaman.

c. Jangka waktu pelunasan adalah paling lambat 10 (sepuluh) bulan.

d. Biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai setiap realisasi pinjaman.

e. Bilamana hutang tidak dapat dilunasi, maka yang bersangkutan diberikan sanksi :

1. Diberi peringatan dan teguran
2. Diumumkan namanya di tempat umum
3. Sanksi moral, karena berani berhutang berani bertanggung jawab secara moral.
4. Seluruh asset yang dimiliki bersangkutan disita.
5. Yang bersangkutan tidak dibenarkan lagi mendapatkan kredit atau pinjaman yang sejenis untuk masa yang akan datang di seluruh lembaga pinjaman.
6. Diproses secara hukum menurut pengadilan setempat.

Demikianlah surat pengakuan hutang ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

Padang, 2010

Disetujui : Pimpinan LKMA

Disetujui : Suami/Istri/Ortu ybs*

Yang berjanji/meminjam

Materai
6000

Lampiran 19. Rekapitulasi peminjaman dan perkembangan periode 2010.

No	Strata	Bulan pinjaman	Bulan pelunasan	Sisa hutang	keterangan
1	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
2	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
3	KL	Feb 2010	1 dec 2010		L
4	KL	Feb 2010		✓	KL
5	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
6	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
7	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
8	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
9	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
10	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
11	KL	Feb 2010	1 dec 2010		L
12	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
13	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
14	KL	Feb 2010		✓	KL
15	M	Feb 2010		✓	M
16	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
17	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
18	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
19	KL	Feb 2010	1 dec 2010		L
20	KL	Feb 2010		✓	KL
21	KL	Feb 2010		✓	KL
22	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
23	M	Feb 2010		✓	M
24	KL	Feb 2010		✓	KL
25	KL	Feb 2010		✓	KL

26	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
27	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
28	M	Feb 2010		✓	M
29	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
30	M	Feb 2010		✓	M
31	L	Feb 2010	1 dec 2010		L
32	KL	Feb 2010	1 dec 2010		L
33	M	Feb 2010		✓	M
34	M	Feb 2010		✓	M
35	M	Feb 2010		✓	M
36	M	Feb 2010		✓	M
37	KL	Mar 2010		✓	KL
38	KL	Mar 2010		✓	KL
39	L	Mar 2010	1 dec 2010		L
40	M	Mar 2010		✓	M
41	L	Mar 2010	1 dec 2010		L
42	L	Mar 2010	1 dec 2010		L
43	M	Mar 2010		✓	M
44	M	Mar 2010	1 jan 2011		L
45	L	Mar 2010	1 dec 2010		L
46	M	Mar 2010		✓	M
47	KL	Mar 2010		✓	KL
48	L	Mar 2010	1 dec 2010		L
49	KL	Mar 2010		✓	KL
50	M	Juli 2010	1 jan 2011		L
51	M	Agust 2010		✓	M
52	KL	Sept 2010		✓	KL

SUMBER :LKM-A Masra, 2011(data diolah)



Lampiran 20. Daftar kehadiran monitoring dan bimbingan lapangan oleh PPL

No.	Nama Gapoktan	Nama Penyuluh Pendamping	BULAN												Jumlah
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	4	5	6							7
1	Jaya Bersama	Alimin, SP	v	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	6
2	Agro floriss	Yuliamilis, S.Pi	v	v	v	v	-	-	-	v	v	-	v	-	7
3	Harapan Bersama	Syaiful Akman	v	v	v	v	v	v	-	-	-	-	v	v	8
4	Harapan Jaya	Dardanelly	-	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	11
5	Harapan Bundo	Yulia Agus	-	v	v	v	v	-	v	v	v	v	v	-	9
6	Batu Gadang Bersama	HERMANTO, S.Pi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
7	Sepakati	Yuli Agustina, S.Pi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
8	Fajar Mahkota	Putri Reni Setia	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
9	Ceno Pulau	Meri Susanti	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
10	Ambawang Sakato	Yenti, S.Pi	-	-	-	-	-	v	v	v	v	-	v	v	6
11	Sungai Sapih Jaya	Jumalia, A.Md	-	-	v	v	v	v	v	-	v	v	v	v	9
12	Sarik Sati	Suci Sofyana, SP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
13	Sarumpun Boneh	Yunis Marni, SP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
14	Sejahtera	Ir. Abdus Salim W.	-	-	v	v	-	v	-	v	v	v	v	v	8
15	Cupak Sepakat	Leni Nofia, SP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
16	Pisang Sakato	Sherli Mega Silvia	v	v	v	v	v	v	-	v	v	v	v	-	10
17	Kapalo Koto Basumo	Niku Aryuni	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12
18	Minang Sakato	Syafril Sartika	v	v	v	v	v	v	-	-	v	v	v	-	9
19	Tigo Sarumpun	Yetty Lasmi	v	v	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-	4

Padang, 20 April 2011




































Sekretariat PUJAP Kota Padang

TETY ISNIATI, SP
NIP. 19710816 199903 2 003



Lampiran 21. Daftar hadir anggota pada RAT LKM-A Masra 2011.

Daftar hadir RAT LKMA MASRA

	Nama	Alamat	Tanda tangan	
1	TITI NI	Gr Laweh		1
2	ZAHARUDIN	"		2
3	AMIR IN	"		3
4	RAHMAD HENDRA	"		4
5	KAHARUDIN	"		5
6	RENI ANGGRAINI	"		6
7	RAYUDI	"		7
8	NEFRIDA	"		8
9	MURHANIDA	"		9
10	MISLILDA	"		10
11	ANDASKIL	"		11
12	Stavira	"		12
13	Harpin	"		13
14	Shamsidar	"		14
15	Hayami	"		15
16	Anda dewi	"		16
17	Puraya	"		17
18	ANAPATI	"		18
19	YALINUS	"		19
20	Roni Andani	Taget dorom		20
21	Samsir	"		21
22	ZULKIFLI	"		22
23	Xumar	"		23
24	MUSKIS	"		24
25	RIZKI	"		25
26	RIAN MAYASARI	"		26
27	Ramli RB	M. K.		27
28	ERMA HB	App. Naungsato		28
29	SIBAWAT	Gr. Laweh		29
30	DARTAN	PP. GR. Laweh		30
31	FITRA HADI	Gr. Laweh		31
32	RIANAWATI, S, MS	K. KOT		32
33	STAFF	PUSKOP Kota Papanga		33
34	MILIBLITA	Rt 3/Rw 3		34
35	TULIDAR	Rt 03/Rw 3		35
36				36
37				37

Sabtu 16 Agst 2011

PP. GR. Laweh.



PP. GR. Laweh.

mpiran 22. Pertanyaan seputar pengetahuan dan sosialisasi

Pertanyaan	Jawaban		Keterangan (T,K,TT)
	Ya (1)	Tidak (0)	
<p>A. Pengetahuan</p> <p>1. Apakah bapak/ ibu tahu tentang program PUAP? Ket:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darimana program tersebut? • Bergerak di bidang apa? • Tujuan dan manfaat program tersebut? <p>2. Apakah sebelumnya ada pemberitahuan tentang PUAP ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapan dan dimana? • Siapa yang memberikan pemberitahuan? • Isi pemberitahuan? <p>3. Apakah tahu bapak/ibu tahu LKM-A?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darimana? • Bergerak dibidang apa? • Hubungannya dengan Gapoktan? <p>4. apakah ibuk tahu syarat pinjaman di LKM-A?</p> <ul style="list-style-type: none"> • berapa bunga? • Aturan pinjaman? • Sanksi keterlambatan? jelaskan <p>Ket:</p> <p>5. Apa pernah dilakukan pertemuan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • materi? • Berapa kali ikut pertemuan? • Siapa yang memberikan penyuluhan pada pertemuan? jelaskan <p>Ket:</p> <p>6. Apakah dana pinjmana berupa kredit? Atau bantuan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikembalikan • Tidak dikembalikan • Boleh hutang <p>7. Apakah bapak/ibu berada pada criteria pengembalian lancar?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalau tidak, pernah mndpt teguran dari pengurus? • Kalau ya, prnah mndpat reward? 			

<ul style="list-style-type: none"> • Apa aturan sudah dijalankan? Ket: 8. Apakah ibuk tahu prosedur peminjaman tersebut? • Tahu darimana? • Sudah mengikuti prosedur dengan benar? • Siapa yang membimbing ? Ket: 9. Jelaskan pengertian kredit? • Apakah pinjaman berbentuk kredit? • Beda dengan BLT? • Pernah meminjam kredit sebelumnya? 10. Apakah ibu/bpk tahu bagaimana menjadi anggota LKM-A? • Pakai syarat? • Bedanya dengan syarat gapoktan? • System peminjaman di LKM-A? 11. Apakah bpk/ibu tahu berapa bunga dan denda yang diberikan? • Berapa pinjaman seharusnya? • Berapa dikembalikan? • Pakai denda? 12. Apakah bapak/ibu tahu siapa yang menjadi pengurus? • Ada hubungan keluarga? • Apa bedanya dengan pengurus gapoktan? • Apa pekerjaannya di LKM-A? 13. Apakah LKM-A rutin mengadakan pertemuan ? • Setiap berapa kali? • Isinya tentang apa? • Materinya? 14. Apakah pengurus sudah cukup aktif dan jujur menurut bapak/ibuk? • Apa pernah diperlihatkan jumlah perkembangan dana LKM-A? • Apa pernah dimintai pungutan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan • Apakah pernah ada aturan baru yang dibuat diluar rapat anggota 15. Apakah bapak/ibu tahu hak dan kewajiban sebagai anggota LKM-A? • Kapan ibu boleh meminjam • Kapan ibu harus mengembalikan pinjaman tersebut 			
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Pernahkah ibu mengikuti rapat anggota 			
<p>B. Sosialisasi</p> <p>16. Apakah pernah diberikan sosialisasi kepada ibu/bapak?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapan • Dimana • Dalam bentuk apa <p>17. Apakah bapak/ibu masih ingat materi sosialisasi tersebut? Ket:</p> <p>18. Apakah ibu ingat berapa kali diberikan sosialisasi Ket:</p> <p>19. Apakah ibu tahu siapa saja yang memberikan sosialisasi? Sebutkan Ket:</p> <p>20. Apakah ibu/bapak masih mau datang jika ada sosialisasi berikutnya?</p>			

erangan :

tahu

kurang tahu

tidak tahu

aban dinilai beserta alasan dan penjelasan dengan bobot:

= 1

k = 0

bila total dari jawaban responden tersebut:

- Baik :Nilai 75% - 100% = Tahu
- Kurang :Nilai 50%-70% = Kurang tahu
- Tidak baik :Nilai < 50% = Tidak tahu

mpiran 23 . Rata-Rata Pendapatan responden berdasarkan srata Lancar, Kurang Lancar dan
 cet pada LKM-A Masra

No.	Pendapatan		
	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Macet (Rp)
1	3.200.000	2.100.000	2.000.000
2	3.200.000	2.500.000	1.500.000
3	2.300.000	2.500.000	1.500.000
4	3.200.000	2.600.000	1.500.000
5	2.700.000	2.600.000	2.500.000
6	2.800.000	2.300.000	1.500.000
7	2.700.000	2.500.000	1.500.000
8	3.200.000	2.500.000	1.500.000
9	2.800.000	2.100.000	1.800.000
10	3.200.000	2.500.000	2.000.000
11	3.200.000	2.100.000	2.000.000
12	3.200.000	2.100.000	1.600.000
13	3.200.000	2.300.000	2.000.000
14	3.200.000	2.300.000	2.000.000
15	3.200.000		
16	3.000.000		
17	2.700.000		
18	2.700.000		
19	2.800.000		
20	2.700.000		
21	2.700.000		
22	2.700.000		
23	2.800.000		
24	3.200.000		
Jumlah	70.600.000	33.000.000	24.900.000
Rata-rata	2.944.166,7	2.357.142,8	1778571,4

ber data: diolah



piran 24. Rumus kategori pendapatan Responden

Untuk mencari kategori pendapatan tiap masing- masing responden maka dicari terlebih dahulu standar error nya dengan rumus Walpole, 1992 berikut :

$$Se^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n-1}$$

$$Se = \sqrt{Se^2}$$

$$Se = \frac{33315 \cdot 10^{10} - \frac{1}{52} \cdot (128.500.000)^2}{52-1}$$

$$= \frac{33315 \cdot 10^{10} - \frac{1}{52} \cdot (165123 \cdot 10^{11})}{51}$$

$$= \frac{33315 \cdot 10^{10} - 317543 \cdot 10^9}{51}$$

$$= \frac{156067 \cdot 10^8}{51}$$

$$= 306014 \cdot 10^6$$

$$Se = \sqrt{306014 \cdot 10^6}$$

$$Se = 553.185,32$$

Dengan kategori tinggi, sedang dan rendah apabila:

Rata- rata + Se = Tinggi dari pendapatan tiap anggota — kategorinya *TINGGI*

$$\frac{\text{Rata- rata}}{N} + Se = \left(\frac{128.500.000}{52} \right) + 553.185,32$$

$$= 2.471.153,8 + 553.185,32$$

$$= 3.024.339,12$$

$$\frac{\text{Rata- rata}}{N} - Se = 2471153,8 - 553.185,32$$

$$= 1.917.968,53 \text{ maka kategori pendapatannya adalah } \textit{RENDAH}$$

Sedangkan untuk kategori pendapatan *SEDANG* adalah berkisar dibawah 3.024.339,12 dan diatas 1.917.968,53.

Rata- rata jumlah pendapatan anggota

jumlah populasi

lampiran 25. Keadaan Penerima Tahap I Strata Kurang Lancar Sampai Pada Agustus 2011

No Strata Kurang Lancar	Tunggakan(bulan) Tahun 2010	Tunggakan(bulan) Tahun 2011	Keterangan
1	4	✓ (Lunas)	Mau
2	4	2	Belum mau
3	6	3	Belum mau
4	6	1	Belum mau
5	6	✓ (Lunas)	Mau
6	3	3	Belum mau
7	3	2	Belum mau
8	6	5	Belum mau
9	5	✓ (Lunas)	Mau
10	4	2	Belum mau
11	6	3	Belum mau
12	5	5	Tidak mau
13	6	6	Tidak mau
14	4	✓ (Lunas)	Mau

lampiran 25. Keadaan Penerima Tahap I Strata Macet Sampai Pada Agustus 2011

No Strata macet	Tunggakan(bulan) Tahun 2010	Tunggakan(bulan) Tahun 2011	Keterangan
1	10	10	Tidak mau
2	7	6	Belum mau
3	7	4	Belum mau
4	10	10	Tidak mau
5	7	6	Belum mau
6	10	10	Tidak mau
7	10	10	Tidak mau
8	10	10	Tidak mau
9	8	5	Belum mau
10	10	10	Tidak mau
11	7	✓ (Lunas)	Mau
12	9	8	Belum mau
13	7	✓ (Lunas)	Mau
14	7	5	Belum mau

Keterangan :

Kategori mau, belum mau dan tidak mau diukur oleh peneliti dari kemauan peminjam dalam membayar atau mengangsur pinjaman mulai dari tahap I sampai tahap II agustus 2011 yang mana dilihat apabila:

1. Mau = Telah melunasi pinjaman sampai agustus 2011
2. Belum mau = Sudah mulai mengangsur pinjaman namun belum lunas
3. Tidak mau = Belum pernah membayar/ mengangsur sampai agustus 2011

